KEBIJAKAN AKUNTANSI

www.nutech-integrasi.com

LEMBAR PENGESAHAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PT. NUTECH INTEGRASI

No. : 040/KPG/KOM-DIR/XII/2021
Ditetapkan : 24 Desember 2021

Dewan Komisaris	
Saiful Hidayat	**Ita Yuliati**
Komisaris Utama	**Komisaris**

Direksi	
Dina Hakiki	
Direktur Utama	
Fiqih Syamsu Rohman	**Sigit Adi Pramono**
Direktur	**Direktur**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Dasar 1
1.2. Tujuan 1
1.3. Ketentuan Lain 2
BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 3
2.1. Kebijakan Umum 3
2.2. Pertimbangan, Estimasi, Dan Asumsi Signifikan Pada Laporan Keuangan 5
2.3. Perubahan Kebijakan Akuntansi, Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan 6
2.4. Penjabaran Mata Uang Asing 7
2.5. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan 9
2.6. Transaksi Dengan Pihak Berelasi 9
2.7. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan 10
2.8. Pengukuran Nilai Wajar 11
2.9. Penghapusan Aset 12
2.10. Komponen Laporan Keuangan 12
BAB III INSTRUMEN KEUANGAN 15
3.1. Aset Keuangan 15
3.2. Instrumen Keuangan Majemuk 24
3.3. Liabilitas Keuangan 26
BAB IV PERSEDIAAN 31
BAB V PERPAJAKAN 34
BAB VI ASET TAKBERWUJUD 37
BAB VII ASET TETAP 40
BAB VIII SEWA 48
BAB IX EKUITAS 62
BAB X IMBALAN KERJA 66
BAB XI PENDAPATAN 68

Appendix 1 Simplifikasi Peniliaan Model Bisnis dan Pengujian SPPI 82
BM & SPPI Tools 83
Appendix 2 Position Paper Penurunan Nilai 98
Appendix 3 PD Vasicheck 99

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Tabel 1 - Pengukuran Instrumen Keuangan 17
Tabel 2 - Biaya Persediaan 31
Tabel 4 - Aset Tak Berwujud 38
Tabel 5 - Biaya Perolehan Aset Tetap 41
Tabel 6 - Biaya Perolehan Tanah 42
Tabel 7 - Aset Tetap 43
Tabel 8 - Kriteria *Life Time* dan *Point of Time* 77
Tabel 9 - Kriteria Prinsipal dan Agen 80

Gambar 1 - Instrumen Keuangan Majemuk 24
Gambar 3 - Modifikasi Kontrak 70

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Dasar

Kebijakan dan pedoman akuntansi PT Nutech Integrasi diterbitkan sebagai dasar atas Keputusan Direksi Nomor: C.Tel.26/KU 710/JMET-00100000/2020 tanggal 26 Juni 2020, dengan tetap mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang relevan dengan pelaporan keuangan.
2. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang berlaku efektif per 1 Januari 2020.
3. Peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan publik.
4. Praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum

Jika Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan pilihan atas perlakuan akuntansi, maka diwajibkan untuk mengikuti ketentuan perseroan.

1.2. Tujuan

Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan dan praktik tertentu yang diterapkan perusahaan dalam penyusunan (pengakuan dan pengukuran) serta penyajian laporan keuangan. Contoh kebijakan akuntansi adalah pengukuran aset tetap apakah menggunakan metode biaya atau revaluasi.

Tujuan yang ingin dicapai melalui penetapan kebijakan akuntansi ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan dasar hukum dalam penyusunan dan untuk memberikan suatu panduan penyajian laporan keuangan perusahaan.
2. Sebagai acuan dalam penyusunan pedoman/juklak akuntansi (*accounting manual*) dan penyusunan laporan keuangan perusahaan.
3. Sebagai sumber rujukan/referensi dalam memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan dan perlakuan akuntansi terhadap suatu transaksi, sehingga konsistensi dan keseragaman dapat dipelihara.

Proses penyusunan Kebijakan Akuntansi yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip kewajaran dalam penyajian dimaksudkan agar memperoleh keseragaman bahasa antara pembaca/pemakai laporan keuangan dengan pihak yang menyajikan laporan keuangan perusahaan, sehingga dapat memberikan kualitas penyajian dan pengungkapan yang memadai bagi pengguna informasi. Pihak pembaca dan pemakai laporan keuangan adalah siapa saja yang membaca laporan keuangan mencakup masyarakat, pemegang saham, kreditur, manajemen, dewan pengawas dan lainnya. Sedangkan pihak yang menyajikan laporan keuangan adalah manajemen beserta unsur- unsur dalam perusahaan yang terlibat sebagai pusat pertanggungjawaban terjadinya transaksi keuangan. Kebijakan akuntansi disusun berdasarkan prinsip

akuntansi yang berlaku secara umum dan dengan menggunakan referensi-referensi yang relevan dengan industri Teknologi, Media, dan Telekomunikasi.

1.3. Ketentuan Lain

Kebijakan ini secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan produk perusahaan, ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan ketentuan lainnya yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya kebijakan ini akan disesuaikan dan disempurnakan secara berkala.

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

2.1. Kebijakan Umum

1. Asumsi dasar, dasar pengukuran dan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian
   a. Dasar pengaturan asumsi dasar, dasar pengukuran dan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian menggunakan SAK efektif per 1 Januari 2020:
      i. Kerangka Konseptual Laporan Keuangan
      ii. PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan
      iii. PSAK 65 : Laporan Keuangan Konsolidasian
   b. Laporan Keuangan Konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali Laporan Arus Kas Konsolidasian yang menggunakan dasar kas.
   c. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian terdiri atas[1]:
      i. Biaya historis
         Aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dan imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dan kewajiban atau dalam keadaan tertentu dalam jumlah kas (setara kas) yang diharapkan akan dibayar untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal.
      ii. Biaya kini
         Aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan (*undiscounted*) yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) sekarang.
      iii. Nilai realisasi
         Aset dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dan pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Kewajiban dinyatakan sebesar arus kas keluar bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.
   d. Laporan Arus Kas Konsolidasian dan Laporan Keuangan Perusahaan disajikan dengan metode langsung *(direct method)* dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

2. Mata uang penyajian[2]
   a. Dasar pengaturan mata uang penyajian menggunakan SAK efektif per 1 Januari 2020:
      i. PSAK 10 : Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing

[1] KPPK p.4.55
[2] PSAK 10 p.38

b. Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah ("Rp") yang merupakan mata uang fungsional perusahaan[3].
c. Mata uang fungsional sama dengan mata uang penyajian.
d. Angka yang terdapat didalam laporan keuangan disajikan dalam rupiah.

3. Periode pelaporan
   a. Dasar pengaturan periode pelaporan menggunakan SAK efektif per 1 Januari 2020:
      i. PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan
      ii. PSAK 3 : Laporan Keuangan Interim
   b. Perusahaan menyajikan laporan keuangan lengkap (termasuk informasi komparatif) secara tahunan dan menyajikan laporan keuangan interim per-*quarter* yang dilaporkan kepada pemegang saham. Tahun buku perusahaan mencakup periode satu tahun, yang dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.

4. Saling Hapus / *Offsetting*[4]
   a. Dasar pengaturan periode pelaporan menggunakan SAK efektif per 1 Januari 2020:
      i. PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan
   b. Perusahaan tidak melakukan saling hapus atas aset dan liabilitas atau pendapatan dengan beban, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh PSAK
      i. Sebagai contoh:
         Beban bunga (*interest expense*) dan penghasilan bunga (*interest revenue*) tidak boleh disalinghapuskan dan harus disajikan terpisah, sedangkan keuntungan dan kerugian kurs disalinghapuskan, demikian juga dengan liabilitas pajak kini harus disalinghapuskan /dikompensasi dengan aset pajak kini dan jumlah nettonya harus disajikan pada laporan posisi keuangan.

5. Konsistensi penyajian[5]
   a. Dasar pengaturan periode pelaporan menggunakan SAK efektif per 1 Januari 2020:
      i. PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan
   a. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:
      i. Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi perusahaan atau kajian ulang atas laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian dan pengklasifikasian yang lain akan lebih tepat digunakan dengan mempertimbangkan kriteria untuk penentuan dan penerapan kebijakan akuntansi.
      ii. Perubahan tersebut dipersyaratkan oleh PSAK.
   b. Apabila dilakukan perubahan terhadap penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan maka penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk memastikan daya banding. Agar sifat, jumlah, serta alasan reklasifikasi harus diungkapkan.

[3] PSAK 10 p.38
[4] PSAK 1 p.32 – p.35
[5] PSAK 1 p.45 – p.46

c. Apabila reklasifikasi tersebut tidak praktis dilakukan maka harus diungkapkan alasan untuk tidak mereklasifikasi jumlah tersebut dan sifat penyesuaian yang dilakukan jika jumlah tersebut tidak direklasifikasi.

6. Materialitas dan penggabungan[6]
   a. Dasar pengaturan materialitas dan penggabungan menggunakan SAK efektif per 1 Januari 2020:
      i. PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan
   b. Material adalah istilah yang digunakan untuk mengemukakan sesuatu yang dianggap wajar untuk diketahui oleh pengguna laporan keuangan. Informasi dianggap material apabila tidak disajikannya (*omission*) atau terdapat kesalahan dalam mencatat (*misstatement*) informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.
   c. Kecuali ditentukan secara khusus, pengertian material mengacu ke Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP- 347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Materialitas untuk tujuan agregasi dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
      i. 5% (lima perseratus) dari jumlah seluruh Aset untuk pos-pos aset
      ii. 5% (lima perseratus) dari jumlah seluruh Liabilitas untuk pos-pos liabilitas
      iii. 5% (lima perseratus) dari jumlah seluruh ekuitas untuk pos-pos ekuitas
      iv. 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan untuk pos-pos laba rugi komprehensif; atau
      v. 10% (sepuluh perseratus) dari laba dari operasi yang dilanjutkan sebelum pajak untuk pengaruh suatu peristiwa atau transaksi.
   d. Akun-akun yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan. Untuk akun-akun yang nilainya tidak material, tetapi merupakan komponen utama laporan keuangan, harus disajikan tersendiri. Sedangkan untuk akun-akun yang nilainya tidak material, dan tidak merupakan komponen utama, dapat digabungkan dalam pos tersendiri, namun harus dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).
   e. Akun yang berbeda tapi mempunyai sifat atau fungsi yang sama dapat digabungkan satu pos jika saldo masing-masing akun tidak material. Contoh hasil penggabungan antara lain Beban Dibayar Dimuka, Pendapatan Diterima Dimuka dan lain sebagainya. Jika penggabungan beberapa akun mengakibatkan jumlah keseluruhan menjadi material, maka unsur yang jumlahnya terbesar agar disajikan tersendiri. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.

2.2. Pertimbangan, Estimasi, Dan Asumsi Signifikan Pada Laporan Keuangan

1. Dasar pengaturan pertimbangan, estimasi, dan asumsi signifikan pada laporan keuangan menggunakan SAK efektif per 1 Januari 2020:
   a. PSAK 57 : Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi

[6] PSAK 1 p.29-p.31

2. Perusahaan membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan senantiasa dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar[7].
3. Provisi dan Kontinjensi[8]
   Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya akan selalu dihadapkan dengan sesuatu yang berkaitan dengan masalah hukum, perundang-undangan dan perpajakan. Manajemen melakukan penilaian untuk mengestimasi risiko yang mungkin terjadi dengan menetapkan provisi dan kontinjensi atas kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada perusahaan. Perusahaan mempersiapkan provisi yang diestimasi sesuai dengan proses hukum yang sedang dihadapi atau liabilitas konstruktif, jika ada, sesuai dengan kebijakan provisinya. Dalam pengakuan dan pengukuran provisi, manajemen mengambil risiko dan ketidakpastian.

2.3. Perubahan Kebijakan Akuntansi, Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan

1. Dasar pengaturan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan menggunakan SAK efektif per 1 Januari 2020:
   a. PSAK 25 : Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
2. Perubahan Kebijakan Akuntansi[9]
   a. Perusahaan mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut:
      i. Dipersyaratkan oleh suatu PSAK; atau
      ii. Menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas perusahaan.
   b. Penerapan perubahan kebijakan akuntansi bergantung kepada:
      i. Perusahaan mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAK tersebut (apabila sebelumnya sudah tersedia)
      ii. Jika perusahaan mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAK yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut, atau perubahan kebijakan dilakukan secara sukarela, maka perusahaan menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif.
   c. Penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Perusahaan menyesuaikan saldo awal komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian awal dan jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut diterapkan sebelumnya.
3. Perubahan Estimasi Akuntansi[10]
   a. Estimasi akuntansi mungkin perlu direvisi jika terjadi perubahan keadaan yang menjadi dasar estimasi atau akibat informasi baru atau tambahan pengalaman. Contoh perubahan estimasi

[7] PSAK 57 p.48-p.50
[8] PSAK 57 p.14-p.26, p.27-p.30, p.31-p.35
[9] PSAK 25 p.14-p.31
[10] PSAK 25 p.32-p.40

akuntansi adalah piutang tak tertagih, umur manfaat aset, metode penyusutan aset, nilai sisa aset. Ketika sulit untuk membedakan suatu perubahan kebijakan akuntansi dengan perubahan estimasi akuntansi, maka perubahan tersebut diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi.

b. Dampak perubahan estimasi akuntansi, diakui secara prospektif dalam laba rugi:
   i. Periode perubahan, jika dampak perubahan hanya pada periode itu.
   ii. Periode perubahan dan periode mendatang, jika perubahan berdampak pada keduanya.
c. Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas, atau terkait dengan suatu pos ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat pos aset, liabilitas, atau ekuitas yang terkait dengan periode perubahan.

4. Kesalahan[11]
   a. Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan unsur-unsur Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tidak sesuai dengan PSAK jika mengandung:
      i. Kesalahan material; atau
      ii. Tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian laporan posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas tertentu.
   b. Kesalahan periode lalu adalah kelalaian mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat, dalam Laporan Keuangan Perusahaan untuk satu atau lebih periode lalu yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan, informasi andal yang tersedia ketika penyelesaian Laporan Keuangan untuk periode tersebut dan secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Contoh kesalahan adalah sebagai berikut:
      i. Dampak kesalahan perhitungan matematis
      ii. Kesalahan penerapan kebijakan akuntansi
      iii. Kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, dan
      iv. Kecurangan
   c. Perusahaan mengoreksi kesalahan material periode lalu secara retrospektif pada Laporan Keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya kesalahan dengan menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode lalu sajian dimana kesalahan terjadi atau jika kesalahan terjadi sebelum periode lalu sajian paling awal, maka menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode lalu sajian paling awal. Kesalahan periode lalu dikoreksi dengan menyajikan kembali secara retrospektif, kecuali tidak praktis untuk menentukan dampak periode tertentu atau dampak kumulatif kesalahan.

2.4. Penjabaran Mata Uang Asing

1. Dasar pengaturan penjabaran mata uang asing menggunakan SAK efektif per 1 Januari 2020:
   a. PSAK 10 : Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
2. Mata uang fungsional dan penyajian[12]

[11] PSAK 25 p.41-p.49
[12] PSAK 10 p.09-p.14, p.38-p.43

a. Item-item yang disertakan dalam laporan keuangan perusahaan menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama di mana perusahaan beroperasi ("mata uang fungsional").
b. Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian.

3. Transaksi dan saldo
   a. Pada pengakuan awal, suatu transaksi mata uang asing harus dicatat dalam mata uang fungsional. Transaksi dalam mata uang asing tersebut dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.
   b. Pada akhir setiap periode pelaporan[13]:
      i. Pos moneter mata uang asing harus dijabarkan menggunakan kurs penutup
      ii. Pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis, dalam suatu mata uang asing harus dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi
      iii. Pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar, dalam mata uang asing harus dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan
   c. Kurs penutup yang digunakan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
   d. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui di dalam Laporan Laba Rugi, kecuali jika ditangguhkan di dalam ekuitas sebagai lindung nilai arus kas dan lindung nilai investasi neto yang memenuhi syarat.
   e. Ketika suatu keuntungan atau kerugian pada suatu pos nonmoneter diakui dalam penghasilan komprehensif lain, setiap komponen perubahan dari keuntungan atau kerugian selisih kurs harus diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sebaliknya, ketika keuntungan atau kerugian pada suatu pos nonmoneter diakui dalam laba atau rugi, setiap komponen perubahan dari keuntungan atau kerugian selisih kurs harus diakui dalam laba atau rugi.
   f. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang berhubungan dengan pinjaman, serta kas dan setara kas disajikan pada Laporan Laba Rugi sebagai "penghasilan atau biaya keuangan".
   g. Keuntungan atau kerugian neto selisih kurs lainnya disajikan pada Laporan Laba Rugi sebagai "(kerugian)/keuntungan lain-lain–neto".
   h. Perubahan nilai wajar efek moneter yang didenominasikan dalam mata uang asing yang diukur melalui laba rugi antara selisih penjabaran yang timbul dari perubahan biaya perolehan diamortisasi efek dan perubahan atas nilai tercatat efek lainnya.
   i. Selisih penjabaran terkait dengan perubahan biaya perolehan diamortisasi diakui di dalam Laporan Laba Rugi, dan perubahan nilai tercatat lainnya diakui pada laba komprehensif lainnya.
   j. Selisih penjabaran aset dan liabilitas keuangan nonmoneter yang dicatat pada nilai wajar diakui sebagai bagian keuntungan atau kerugian perubahan nilai wajar. Sebagai contoh, selisih penjabaran aset dan liabilitas keuangan nonmoneter seperti ekuitas yang dimiliki dan dicatat pada nilai wajar melalui Laporan Laba Rugi diakui pada Laporan Laba Rugi (L/R) sebagai bagian keuntungan atau

[13] PSAK 10 p.23

kerugian nilai wajar dan selisih penjabaran aset nonmoneter seperti ekuitas yang diukur melalui laba komprehensif lainnya diakui dalam Laporan Penghasilan Komprehensif Lainnya (*OCI*).

2.5. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan

1. Dasar pengaturan selisih kurs karena penjabaran Laporan Keuangan menggunakan SAK efektif per 1 Januari 2020:
   a. PSAK 10: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
2. Penjelasan[14]
   a. Selisih kurs yang muncul akibat mata uang fungsional berbeda dengan mata uang penyajian sehingga aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban harus dijabarkan ke mata uang penyajian.
   b. Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi yakni lingkungan entitas tersebut utamanya menghasilkan dan mengeluarkan kas.

2.6. Transaksi Dengan Pihak Berelasi

1. Dasar pengaturan transaksi dengan pihak berelasi menggunakan SAK efektif per 1 Januari 2020:
   a. PSAK 7 : Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi
2. Pihak berelasi adalah orang atau perusahaan yang terkait (sebagai Perusahaan Pelapor) yang meliputi[15]:
   a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perusahaan Pelapor jika orang tersebut:
      i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan Pelapor
      ii. Memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan Pelapor, atau
      iii. Personil manajemen sebagai kunci Perusahaan Pelapor atau Perusahaan induk atas Perusahaan Pelapor.
   b. Satu perusahaan berelasi dengan Perusahaan Pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
      i. Perusahaan dan Perusahaan Pelapor adalah anggota dari perusahaan yang sama (artinya perusahaan induk, perusahaan anak, dan perusahaan anak berikutnya terkait dengan Perusahaan lain)
      ii. Suatu perusahaan adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari perusahaan lain (atau Entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Perusahaan, yang mana Perusahaan lain tersebut adalah anggotanya)
      iii. Kedua perusahaan tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama
      iv. Satu perusahaan adalah ventura bersama dari perusahaan ketiga dan perusahaan yang lain adalah entitas asosiasi dari perusahaan ketiga
      v. Perusahaan tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu Perusahaan Pelapor atau perusahaan yang terkait dengan Perusahaan Pelapor. Jika Perusahaan Pelapor adalah perusahaan yang menyelenggarakan program tersebut, maka perusahaan sponsor juga berelasi dengan Perusahaan Pelapor
      vi. Perusahaan yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam

[14] PSAK 10 p.38
[15] PSAK 7 p.09

huruf (a)

vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan atau personil manajemen kunci Perusahaan (atau Perusahaan induk dari Perusahaan)

3. Perusahaan yang berelasi dengan Pemerintah adalah perusahaan yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada Pemerintah, instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.
4. Perusahaan yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa Perusahaan yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham Perusahaan, atau perusahaan yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

2.7. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

1. Dasar pengaturan periode setelah periode pelaporan menggunakan SAK efektif per 1 Januari 2020:
   a. PSAK 8 : Periode Setelah Periode Pelaporan
2. Penjelasan[16]
   a. Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, yang terjadi di antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal yang lebih awal antara tanggal manajemen telah memberikan asersi bahwa laporan keuangan telah diselesaikan dan tanggal manajemen bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut.
   b. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit bukanlah tanggal persetujuan laporan keuangan oleh pemegang saham. Perusahaan mengungkapkan tanggal laporan yang diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.
   c. Peristiwa setelah periode pelaporan dapat dibagi menjadi beberapa bagian:
      i. Peristiwa penyesuai yakni peristiwa yang perlu disesuaikan dalam laporan keuangan. Berikut ini merupakan contoh peristiwa yang perlu dilakukan penyesuaian jumlah dalam laporan keuangan:
         - Penyelesaian kasus pengadilan setelah periode pelaporan yang memutuskan Perusahaan memiliki kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Perusahaan menyesuaikan provisi yang terkait kasus pengadilan tersebut.
         - Penerimaan informasi setelah periode pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset setelah periode pelaporan.
         - Penentuan nilai biaya perolehan aset setelah periode pelaporan atas aset yang dibeli/jual sebelum akhir periode pelaporan.
         - Penentuan jumlah pembayaran bagi laba atau bonus setelah periode pelaporan.
         - Penemuan kecurangan atau kesalahan yang menunjukkan laporan keuangan tidak benar.
      ii. Peristiwa non penyesuai yakni peristiwa yang tidak perlu disesuaikan dalam laporan keuangan namun perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Berikut ini merupakan contoh

[16] PSAK 9 p.3-p.10

peristiwa yang tidak perlu dilakukan penyesuaian jumlah dalam laporan keuangan namun perlu dilakukan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan:

- Penurunan nilai wajar investasi di antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.
- Pengumuman dividen setelah periode pelaporan dan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.
- Kombinasi bisnis signifikan setelah periode pelaporan.
- Pengumuman untuk menghentikan suatu operasi.
- Pembelian aset yang signifikan, pengklasifikasian aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual, pelepasan aset, atau pengambilalihan aset yang signifikan oleh Pemerintah.
- Kerusakan gedung/ aset akibat kebakaran/bencana.
- Perubahan signifikan atas harga aset dan kurs valuta asing.
- Perubahan tarif pajak atau peraturan perpajakan yang berlaku atau diumumkan setelah periode pelaporan dan memiliki pengaruh signifikan pada aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan.

iii. Perusahaan mengungkapkan informasi terkait untuk peristiwa nonpenyesuai:

- Sifat peristiwa
- Estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat

2.8. Pengukuran Nilai Wajar

1. Dasar pengaturan pengukuran nilai wajar menggunakan SAK efektif per 1 Januari 2020:
   a. PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar
2. Nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antar pelaku pasar pada tanggal pengukuran[17].
3. Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar[18]:
   a. Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1)
   b. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2)
   c. Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3)
4. Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, perusahaan sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi.
5. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan

[17] PSAK 68 p.9
[18] PSAK 68 p.72-p.90

input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

6. Perpindahan antara level hirarki wajar diakui oleh perusahaan pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

2.9. Penghapusan Aset

Kebijakan terkait penghapusan aset mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan.

2.10. Komponen Laporan Keuangan

Dasar pengaturan komponen laporan keuangan menggunakan SAK efektif per 1 Januari 2020:

1. PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAK 2 : Laporan Arus Kas

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan lengkap terdiri dari[19]:

1. Laporan Posisi Keuangan
   Laporan Posisi Keuangan adalah sebuah laporan yang menggambarkan posisi keuangan yaitu posisi aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu.
   a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik masa depan diharapkan akan mengalir ke perusahaan.
   b. Liabilitas adalah kewajiban kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomik.
   c. Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh liabilitas
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
   a. Laporan Laba Rugi dan Komprehensif Lain menyajikan:
      i. Laba Rugi
      ii. Total Penghasilan Komprehensif Lain
      iii. Penghasilan Komprehensif untuk periode berjalan, yaitu total laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
   b. Perusahaan menyajikan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dalam satu laporan
   c. Perusahaan juga menyajikan jumlah laba rugi periode berjalan dan penghasilan komprehensif lain yang dapat diatribusikan kepada:
      i. Pemilik Perusahaan induk
      ii. Kepentingan Non Pengendali
   d. Bagian penghasilan komprehensif lain diklasifikasikan berdasarkan sifat dan dikelompokkan sesuai dengan SAK yaitu:

[19] PSAK 1 p.9-p.14

i. Tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
   - Perubahan dalam surplus revaluasi
   - Keuntungan dan kerugian dari aktuarial program manfaat pasti

ii. Akan direklasifikasi ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi
   - Keuntungan dan kerugian dari pengukuran nilai wajar melalui laba rugi (L/R)
   - Keuntungan dan kerugian dari penjabaran laporan keuangan perusahaan asing
   - Bagian efektif dari instrumen lindung nilai arus kas

e. Perusahaan menyajikan komponen penghasilan komprehensif lain secara neto dari dampak pajak terkait.

3. Laporan Perubahan Ekuitas
   a. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan perubahan ekuitas pemilik dalam satu periode.
   b. Laporan Perubahan Ekuitas mencakup informasi sebagai berikut:
      i. Total penghasilan komprehensif selama periode berjalan.
      ii. Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan restrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25.
      iii. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.
4. Laporan Arus Kas[20]

   Laporan Arus Kas adalah laporan yang disusun untuk memberikan informasi yang relevan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas dari suatu perusahaan selama suatu periode. Laporan ini disajikan dengan membagi arus kas dalam 3 aktivitas sebagai berikut:

   a. Arus kas dari aktivitas operasi

      Berasal dari transaksi yang merupakan penghasil utama pendapatan Perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan.
   b. Arus kas dari aktivitas investasi

      Berasal dari transaksi perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
   c. Arus kas dari aktivitas pendanaan

      Berasal dari transaksi yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisisi kontribusi modal dan pinjaman perusahaan.

   Metode penyusunan arus kas dari aktivitas operasi dengan metode langsung. Dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Dengan metode langsung, informasi mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan atau dengan menyesuaikan pendapatan dan beban operasi lainnya dalam Laporan Laba Rugi.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

   Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keempat laporan keuangan lainnya. Bagian ini berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan dari akun-akun dalam setiap laporan keuangan.
6. Laporan Posisi Keuangan pada awal periode komparatif

[20] PSAK 2 p.6

Laporan Posisi Keuangan pada awal periode komparatif disajikan ketika perusahaan menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika perusahaan mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

BAB III
INSTRUMEN KEUANGAN

3.1. Aset Keuangan

1. Dasar pengaturan aset keuangan menggunakan SAK efektif per 1 Januari 2020:
   a. PSAK 50 Instrumen Keuangan : Penyajian
   b. PSAK 71 Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran
2. Penjelasan
   a. Aset keuangan biasanya lebih likuid daripada aset berwujud, seperti tanah atau *real estate*, dan diperdagangkan di pasar keuangan. Sebagai contoh aset keuangan yaitu deposito bank, obligasi, saham, dan lainnya. Aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk[21]:
      i. Kas
      ii. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan lain, misalnya saham perusahaan lain
      iii. Hak kontraktual, yaitu hak yang timbul dari kesepakatan, baik tertulis maupun tidak tertulis untuk:
         - Menerima kas atau aset keuangan lainnya dari perusahaan lain, misalnya obligasi yang diterbitkan perusahaan lain
         - Mempertukarkan aset atau liabilitas keuangan dengan aset atau liablitas keuangan perusahaan lain dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan.
   b. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan merupakan:
      i. Nonderivatif di mana perusahaan harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan perusahaan; atau
      ii. Derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan perusahaan. Untuk tujuan ini, instrumen ekuitas yang diterbitkan perusahaan tidak termasuk instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual (*puttable financial instruments*) yang dikategorikan sebagai instrumen ekuitas.
   c. Berikut adalah uraian atas kebijakan terkait instrumen keuangan:
      i. Klasifikasi Aset Keuangan[22]
         Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori sebagai berikut:
         - Biaya perolehan diamortisasi (*Amortized cost*)
         - Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (*Fair Value Through Other Comprehensive Income* / *FVTOCI*)
         - Nilai wajar melalui laba rugi (*Fair Value Through Profit Loss* / *FVTPL*)

         Klasifikasi aset keuangan ditentukan oleh dua hal yaitu model bisnis dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan. Manajemen melakukan pengujian atas model bisnis dan karakteristik arus kas kontraktual menggunakan kertas kerja

[21] PSAK 50 p.11
[22] PSAK 71 p.4.1.1-p.4.4.3, p.PP4.1.1-p.PP4.1.26

klasifikasi dan pengukuran *BM & SPPI Checklist Tools* (lihat ***Appendix 1***). Pengujian tersebut dilakukan pada saat pengakuan awal dan pada saat terjadi perubahan model bisnis dan/atau perubahan arus kas kontraktual.

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*Amortized Cost*) jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
  - Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
  - Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest*) dari jumlah pokok terutang.
- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (*FVTOCI*) jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
  - Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan, dan
  - Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.
- Aset keuangan yang tidak diukur melalui *amortized cost* atau *FVTOCI*, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (*FVTPL*).

ii. Metode Suku Bunga Efektif[23]

- Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan.
- Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.
- Pada saat menghitung suku bunga efektif, perusahaan mengestimasi arus kas ekspektasian dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit ekspektasian. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.
- Terdapat praduga bahwa arus kas dan perkiraan umur dari kelompok instrumen keuangan yang serupa dapat diestimasi dengan andal. Akan tetapi, dalam kasus yang jarang terjadi, apabila tidak mungkin mengestimasi arus kas atau perkiraan umur instrumen keuangan (atau kelompok instrumen keuangan) secara andal, perusahaan menggunakan arus kas kontraktual

[23] PSAK 71 p.PP5.4.1-p.PP5.4.7

selama jangka waktu kontrak dari instrumen keuangan (atau kelompok instrumen keuangan) tersebut.

iii. Reklasifikasi Aset Keuangan[24]

- Reklasifikasi aset keuangan diperkenankan sepanjang perusahaan mengubah model bisnis pengelolaan aset keuangan tersebut. Perubahan tersebut diperkirakan sangat jarang terjadi. Perubahan tersebut ditentukan oleh manajemen sebagai hasil dari perubahan eksternal atau internal dan harus signifikan pada kegiatan operasi perusahaan dan dapat dibuktikan pada pihak eksternal. Sejalan dengan hal tersebut, perubahan pada model bisnis akan terjadi hanya jika perusahaan memulai atau berhenti untuk melaksanakan aktivitas yang signifikan terhadap kegiatan operasinya; sebagai contoh, ketika perusahaan telah memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri lini bisnis.
- Jika perusahaan mereklasifikasi aset keuangan maka perusahaan menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Perusahaan tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.
- Perlakuan akuntansi reklasifikasi aset akan diatur pada nomor 3 huruf c.

3. Perlakuan Akuntansi

a. Pengakuan awal dan pengukuran saat pengakuan awal[25]

i. Perusahaan mengakui aset keuangan dalam laporan posisi keuangan, ketika perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat Perusahaan pertama kali mengakui aset keuangan, perusahaan mengklasifikasikannya sesuai klasifikasi di atas dan mengukurnya sesuai ketentuan pengukuran.

ii. Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (reguler) diakui pada tanggal perdagangan – tanggal dimana perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

iii. Pengukuran saat pengakuan diatur di nomor 3 poin b.

b. Pengukuran setelah pengakuan awal[26]

Pengukuran instrumen keuanngan akan dijelaskan pada tabel dibawah ini yang telah disesuaikan dengan klasifikasi atas setiap instrumen keuangan

Tabel 1 - Pengukuran Instrumen Keuangan

Instrumen Keuangan		Pengukuran	
		Pengukuran saat pengakuan awal	Pengukuran setelah pengakuan awal
Aset Keuangan	Biaya Perolehan (*Amortized Cost*)	Diukur pada nilai wajar (+/- biaya transaksi)	Biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif

[24] PSAK 71 p.4.4.1-p.4.4.3
[25] PSAK 71 p.3.1.1-p.3.1.2, p.5.1.1-p.5.1.3
[26] PSAK 71 p.5.2.1-p.5.2.3

Instrumen Keuangan		Pengukuran	
		Pengukuran saat pengakuan awal	Pengukuran setelah pengakuan awal
	Instrumen Utang – nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (*FVTOCI*)		Nilai wajar dan biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif
	Instrumen Ekuitas – nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (*FVTOCI*)	Nilai Wajar	Nilai Wajar**
	Nilai wajar melalui laba rugi (*FVTPL*)	Nilai Wajar	Nilai Wajar
Liabilitas Keuangan	Biaya Perolehan (*Amortized Cost*)	Diukur pada nilai wajar (+/- biaya transaksi)	Biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif
	Liabilitas Keuangan melalui laba rugi (*FVTPL)*	Nilai Wajar	Nilai Wajar***

i. Penjelasan atas biaya transaksi:
   - Untuk instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai *amortised cost* atau FVTOCI, biaya transaksi termasuk dalam perhitungan *effective interest rate,* sehingga biaya transaksi tersebut diamortisasi melalui laba atau rugi selama jangka waktu instrumen keuangan tersebut.
   - Untuk investasi dalam instrumen ekuitas yang ditentukan pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain (*FVTOCI*), biaya transaksi tetap dalam pendapatan komprehensif lain dan tidak direklasifikasi ke laba rugi. Perusahaan dapat mereklasifikasi akumulasi keuntungan atau kerugian dari penghasilan komprehensif lain ke laba ditahan, misalnya ketika investasi tersebut dihentikan pengakuannya.
   - Untuk instrumen keuangan yang diklasifikasikan sebagai *FVTPL*, biaya transaksi diakui dalam Laporan Laba Rugi segera pada saat pengakuan awal.

ii. Penjelasan atas pengukuran:
   - Perubahan nilai wajar akan diakui di pos pendapatan komprehensif lain sementara biaya perolehan diamortisasi diakui didalam laba rugi
   - **Perubahan nilai wajar tidak dapat diakui di laba rugi kecuali pendapatan dividen
   - *** Perubahan nilai wajar akibat risiko kredit diakui didalam penghasilan komprehensif lain

c. Perlakuan akuntansi untuk reklasifikasi aset keuangan adalah sebagai berikut[27]:
   i. Dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi
      - Nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi.
      - Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.
   ii. Dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi
      - Nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.
   iii. Dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
      - Nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi.
      - Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.
      - Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.
   iv. Dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi
      - Aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi.
      - Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.
      - Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortasi.
      - Penyesuaian ini mempengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak mempengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi.
   v. Dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi
      - Aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi.
      - Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi ke laba rugi.
   vi. Dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

[27] PSAK 71 p.5.6.1-p.5.6.7

- Aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi
- Akan tetapi, perusahaan tidak mengakui secara terpisah pendapatan bunga atau keuntungan atau kerugian penurunan nilai untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Sebagai konsekuensinya atas reklasifikasi tersebut, suku bunga efektif ditentukan pada dasar nilai wajar aset keuangan dari tanggal reklasifikasi, tanggal reklasifikasi diperlakukan sebagai tanggal pengakuan awal.

d. Penurunan nilai aset keuangan[28]

i. Pada setiap akhir periode pelaporan, perusahaan harus melakukan evaluasi untuk menentukan apakah aset keuangan mengalami penurunan nilai dengan menggunakan pendekatan *Expected Credit Loss (ECL)* atau metode kerugian kredit ekspektasian dalam mengukur kerugian penurunan nilai aset keuangan. Model penurunan nilai ini lebih berorientasi pada kemungkinan terjadinya kerugian dimasa depan, dengan demikian perusahaan harus mempertimbangkan informasi yang bersifat *forward-looking*.

ii. Metode *ECL* ini digunakan untuk dua klasifikasi aset keuangan yaitu:
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

iii. Untuk aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui Laporan Laba Rugi, tidak perlu dilakukan penurunan nilai. Hal ini dikarenakan perubahan nilai wajar untuk aset tersebut sudah diakui dalam laba rugi periode berjalan.

iv. Terdapat dua pendekatan dalam menghitung *ECL*, yaitu pendekatan umum (*general approach*) dan pendekatan yang disederhanakan (*simplified approach*). Pendekatan yang disederhanakan hanya dapat diterapkan atas[29]:
- Piutang usaha atau aset kontrak yang dihasilkan dari transaksi yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan:
  - Tidak mengandung komponen pendanaan yang signifikan (atau ketika perusahaan menerapkan cara praktis untuk kontrak satu tahun atau kurang) sesuai dengan PSAK 72
  - Mengandung komponen pendanaan yang signifikan sesuai dengan PSAK 72, jika perusahaan memilih kebijakan akuntansi untuk mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Kebijakan akuntansi tersebut diterapkan untuk seluruh piutang dagang atau aset kontrak, tetapi dapat juga diterapkan secara terpisah untuk piutang dagang dan aset kontrak.
- Piutang sewa yang dihasilkan dari transaksi dalam ruang lingkup PSAK 73: Sewa, jika perusahaan memilih kebijakan akuntansi untuk mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Kebijakan akuntansi tersebut dapat diterapkan untuk seluruh piutang sewa, tetapi dapat juga diterapkan secara terpisah untuk piutang sewa pembiayaan dan piutang sewa operasi.

v. Berdasarkan pendekatan umum, terdapat tiga *stage* penurunan nilai yang didasarkan pada

[28] PSAK 71 p.5.5.1-p.5.5.20, p.PP5.5.1-p.PP5.5.24
[29] PSAK 71 p.5.5.15

perubahan risiko kredit aset keuangan. Dalam melakukan penilaian atas perubahan risiko kredit, Perusahaan membandingkan estimasi risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal dengan estimasi risiko gagal bayar pada tanggal pelaporan. Perusahaan menggunakan indikator kualitatif (sebagai contoh, kovenan keuangan) sebagai indikator perubahan risiko kredit. Suatu aset keuangan dianggap mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan jika aset keuangan tersebut telah menunggak tidak lebih dari 30 hari tunggakan[30].

Perusahaan memilih untuk menggunakan praduga tersebut, sehingga kriteria kenaikan kredit yang signifikan adalah 30 hari tunggakan untuk kas, deposito, giro, surat berharga, piutang usaha, piutang lain-lain, aset kontrak, dan piutang sewa. Kriteria ini menunjukkan bahwa penyisihan sepanjang umur (lifetime) akan diakui untuk setiap aset keuangan yang telah menunggak lebih dari 30 hari (bukan karena alasan administratif).

Kriteria kenaikan risiko kredit tidak diberlakukan untuk piutang usaha, aset kontrak, piutang lain-lain dan piutang sewa karena perusahaan telah memilih panduan praktis (penyisihan sepanjang umur/lifetime) atau metode yang disederhanakan. Namun, kriteria kenaikan risiko kredit diberlakukan untuk kas, deposito, giro, surat berharga dan instrument keuangan sejenis. Di samping kriteria risiko kredit yang signifikan, perusahaan juga menentukan definisi default/gagal bayar/wanprestasi sesuai dengan praduga pada IFRS 9 yaitu 90 hari tunggakan.

Sehingga dapat disimpulkan, untuk piutang usaha, piutang lain-lain, piutang sewa, aset kontrak dan aset keuangan selain kas, deposito atau instrument sejenis tidak terdapat pengelompokan staging karena perusahaan telah mengadopsi practical expedient dan sudah mengakui penyisihan sepanjang umur atau metode yang disederhanakan.

Berikut ini adalah ketentuan penurunan nilai berdasarkan pendekatan umum:

- *Stage 1 : Performing*
  Jika aset keuangan tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal atau memiliki risiko kredit yang rendah pada saat tanggal pelaporan maka perusahaan mengukur penyisihan aset keuangan menggunakan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*12-month ECL*). Pengakuan pendapatan bunga dihitung berdasarkan nilai tercatat bruto aset (tanpa dikurangi penyisihan kredit).
- *Stage 2 : Under-Performing*
  Jika aset keuangan mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal, maka perusahaan mengukur penyisihan kerugian menggunakan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*lifetime ECL*). Pengakuan pendapatan bunga dihitung berdasarkan nilai tercatat bruto aset (tanpa dikurangi penyisihan kredit).
- *Stage 3 : Non-Performing*
  Jika aset keuangan memiliki bukti objektif adanya penurunan nilai saat tanggal pelaporan, maka perusahaan mengukur penyisihan kerugian keuangan menggunakan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (lifetime *ECL*), sama seperti *Stage 2*. Namun, pengakuan pendapatan bunga dihitung berdasarkan nilai tercatat bersih (setelah dikurangi penyisihan kredit).

[30] PSAK 71 p.PP5.5.36-p.PP5.5.37

vi. Berikut adalah contoh bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:
- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga.
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya.
- Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar;
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset tersebut, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
  - Memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; atau
  - Kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkolerasi dengan gagal bayar atas aset dalam kelompok tersebut.

vii. Berdasarkan pendekatan yang disederhanakan, perusahaan tidak perlu melakukan penilaian atas perubahan risiko kredit. Pendekatan ini mengharuskan perusahaan untuk mengukur penyisihan aset keuangan menggunakan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*lifetime ECL*). Pengakuan pendapatan bunga dihitung berdasarkan nilai tercatat bruto aset (tanpa dikurangi penyisihan kredit).[31]

viii. Dengan metode *ECL*, Perusahaan menentukan jumlah kerugian kredit ekspektasian berdasarkan probabilitas tertimbang atas selisih antara arus kas sesuai dengan ketentuan kontraktual dan arus kas yang diharapkan akan diterima oleh perusahaan. Perusahaan mengukur kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dalam suatu cara yang mencerminkan[32]:
- Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
- Nilai waktu uang; dan
- Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

ix. Ketentuan penurunan nilai untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi adalah sebagai berikut:
- Ketika terjadi penurunan nilai, nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi,

[31] PSAK 71 p.5.5.18-p.5.5.20
[32] PSAK 71 p.5.5.17

menggunakan pos cadangan aset keuangan terkait yaitu penyisihan kas dan setara kas dan pencadangan piutang usaha. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi.

- Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, menyesuaikan pos cadangan aset keuangan terkait yaitu penyisihan kas dan setara kas dan pencadangan piutang usaha.
- Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada Laporan Laba Rugi.

x. Ketentuan penurunan nilai untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut[33]:

- Penurunan nilai untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tercermin dalam penurunan nilai wajar pada tanggal pelaporan.
- Namun demikian, ketika terjadi penurunan nilai wajar atas aset keuangan tersebut, perlu dievaluasi terlebih dahulu apakah penurunan tersebut berasal dari perubahan nilai pasar atau berasal dari risiko kredit.
- Saat penurunan nilai aset keuangan disebabkan penurunan nilai wajar, selisih atas penurunan nilai tersebut akan diakui didalam Penghasilan Komprehensif Lain. Sedangkan saat penurunan nilai aset keuangan disebabkan dari peningkatan risiko kredit maka selisih penurunan nilai tersebut akan diakui didalam Laporan Laba Rugi.

Manajemen melakukan evaluasi penurunan nilai atas aset keuangan berupa Deposito, *Restricted Cash*, dan Bank Garansi (lihat ***Appendix 3***), Piutang Usaha (lihat ***Appendix 2***), dan Piutang Lain-lain (lihat ***Appendix 4***).

e. Penghentian pengakuan[34]

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut telah jatuh tempo atau telah dialihkan dan perusahaan telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

f. Penyajian[35]

i. Perusahaan menyajikan aset keuangan dalam Laporan Posisi Keuangan berdasarkan:

- Nilai perolehan untuk aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost)*
- Nilai wajar untuk aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai *FVTPL* maupun *FVTOCI*

ii. Penyajian keuntungan maupun kerugian akibat pengukuran nilai wajar aset keuangan, keuntungan dan kerugian tersebut disajikan secara terpisah dalam Laporan Laba Rugi apabila aset keuangan tersebut diklasifikasikan sebagai *FVTPL* dan disajikan di dalam Laporan Penghasilan Komprehensif Lain apabila aset keuangan tersebut diklasifikasikan sebagai *FVTOCI*.

iii. Penyajian penurunan nilai atas aset keuangan disajikan pada beban sebagai berikut:

[33] PSAK 71 p.5.7.10-p.5.7.11
[34] PSAK 71 p.3.2.1-p.3.2.23
[35] PSAK 50 p.13-p.50, p.PP03-p.PP12

- Beban penyisihan kas dan setara kas
- Beban penyisihan piutang usaha
- Beban penyisihan piutang lain-lain

Beban tersebut disajikan dalam Laporan Laba Rugi pada periode terjadinya penurunan nilai.

3.2. Instrumen Keuangan Majemuk

1. Dasar pengaturan instrumen keuangan majemuk menggunakan SAK efektif per 1 Januari 2020:
   a. PSAK 50 Instrumen Keuangan : Penyajian
2. Penjelasan[36]
   a. Penerbit instrumen keuangan nonderivatif mengevaluasi persyaratan instrumen keuangannya untuk menentukan apakah instrumen tersebut mengandung komponen ekuitas dan liabilitas.
   b. Komponen-komponen tersebut diklasifikasikan secara terpisah sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas.
   c. Perusahaan mengakui secara terpisah komponen-komponen instrumen keuangan yang:
      a. Menimbulkan liabilitas keuangan bagi perusahaan, dan
      b. Memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengkonversi instrumen keuangan tersebut menjadi instrumen ekuitas dari perusahaan yang bersangkutan.
   d. Ilustrasi instrumen keuangan majemuk

Gambar 1 - Instrumen Keuangan Majemuk

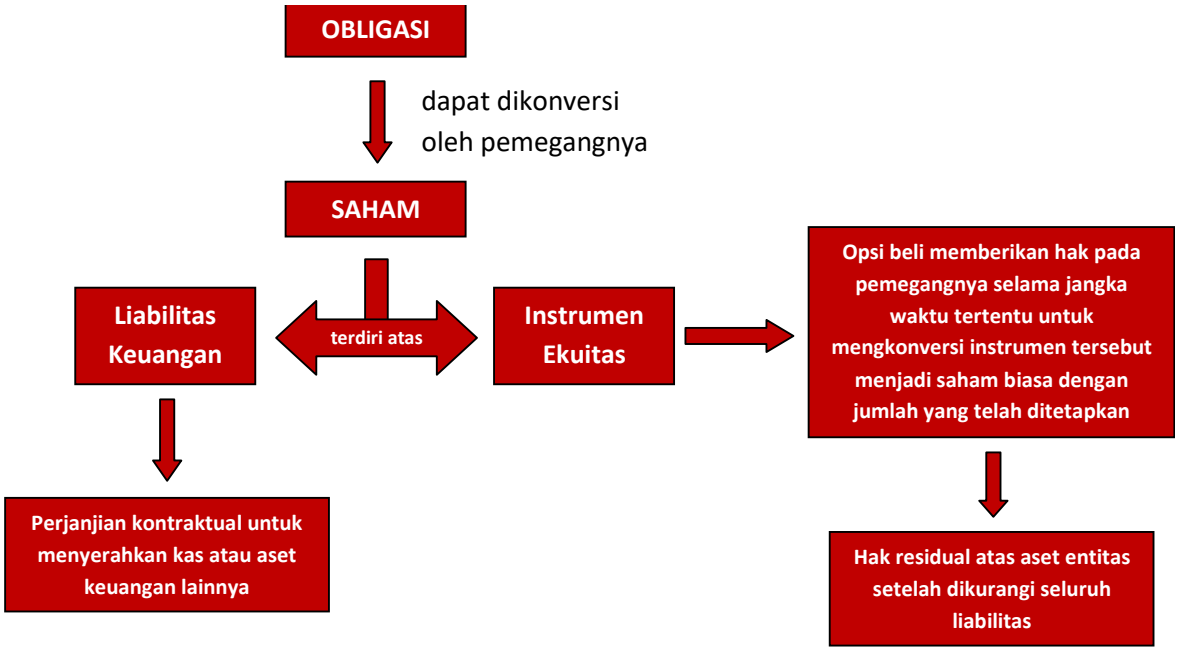

Ketika nilai tercatat awal suatu instrumen keuangan majemuk dialokasikan pada komponen ekuitas dan liabilitas, maka komponen ekuitas yang dialokasikan adalah jumlah residu dari nilai wajar instrumen keuangan secara keseluruhan dikurangi dengan nilai komponen liabilitas yang ditetapkan

[36] PSAK 50 p.28-p.32

secara terpisah.

e. Nilai dari setiap fitur derivatif (seperti opsi beli) yang melekat pada instrumen keuangan majemuk selain komponen ekuitas (seperti opsi konversi ekuitas) merupakan bagian dari komponen liabilitas.
f. Jumlah nilai tercatat yang dialokasikan ke komponen liabilitas dan ekuitas pada saat pengakuan awal selalu setara dengan nilai wajar dari instrumen tersebut secara keseluruhan. Tidak ada keuntungan atau kerugian yang timbul dari pengakuan awal komponen instrumen secara terpisah.

3. Perlakuan akuntansi[37]
   a. Pengakuan awal dan pengukuran awal
      i. Pada saat pengakuan awal, nilai wajar komponen liabilitas adalah nilai kini dari serangkaian arus kas masa depan yang telah ditetapkan dalarn kontrak, yang didiskonto dengan suku bunga yang digunakan oleh pasar pada saat itu terhadap instrumen yang memiliki status kredit yang dapat dibandingkan dan menghasilkan arus kas yang secara substansial sarna, dalam persyaratan yang sarna, namun tanpa opsi konversi.
      ii. Instrumen ekuitas merupakan opsi yang melekat untuk mengkonversi liabilitas menjadi ekuitas penerbit. Opsi ini rnemiliki nilai pada saat pengakuan awal sekalipun jika saat itu opsi berada dalarn kondisi posisi tidak untung.
   b. Pengukuran setelah pengakuan awal
      i. Sekali alokasi imbalan tersebut dilakukan, maka setiap keuntungan atau kerugian .yang timbul diperlakukan sesuai prinsip akuntansi yang dapat diterapkan pada komponen terkait, sebagai berikut:
         - Jumlah keuntungan atau kerugian yang terkait dengan komponen liabilitas diakui dalarn laba rugi
         - Jumlah imbalan yang terkait dengan komponen ekuitas diakui dalam ekuitas
      ii. Perusahaan dapat mengubah persyaratan instrumen dapat dikonversi untuk mendorong dilakukannya konversi dini, sebagai contoh dengan menawarkan rasio konversi yang Iebih menarik atau menawarkan imbalan tarnbahan lain jika konversi dilakukan sebelum tanggal yang ditetapkan. Perbedaan, pada tanggal dilakukan perubahan persyaratan, antara nilai wajar dari imbalan yang diterirna pemegang instrumen pada saat ditakukan konversi berdasarkan persyaratan yang telah diubah dan nilai wajar dari imbalan yang akan diterima pemegang instrumen berdasarkan persyaratan awal diakui sebagai kerugian dalam laba rugi.
   c. Penghentian Pengakuan
      i. Saat dilakukan konversi atas instrumen dapat dikonversi pada saat jatuh tempo, menghentikan pengakuan komponen kewajiban dan mengakuinya sebagai ekuitas. Komponen awal ekuitas tetap sebagai ekuitas (walaupun komponen tersebut mungkin dipindahkan dari satu pos ke pos lain dalarn ekuitas). Tidak terdapat pengakuan keuntungan atau kerugian pada saat dilakukan konversi saat jatuh tempo.
      ii. Jika perusahaan menghapuskan instrumen dapat dikonversi sebelum jatuh tempo melalui penebusan atau pembelian kembali secara dini yang tidak mengubah hak konversi semula, maka perusahaan mengalokasikan imbalan yang dibayarkan dan biaya transaksi untuk pembelian kembali atau penebusan secara dini tersebut ke komponen liabilitas dan komponen ekuitas

[37] PSAK 50 p.PP30-p.PP35

instrumen tersebut pada tanggal transaksi. Metode yang digunakan untuk mengalokasikan imbalan yang dibayarkan dan biaya transaksi ke komponen terpisah adalah konsisten dengan metode yang digunakan untuk alokasi awal ke komponen terpisah atas hasil yang diperoleh dari penerbitan instrumen yang dapat dikonversi tersebut.

d. Penyajian

Perusahaan menyajikan instrumen keuangan majemuk secara terpisah atas komponen liabilitas maupun ekuitas di Laporan Posisi Keuangan. Sedangkan untuk keuntungan maupun kerugian akibat pengukuran setelah pengakuan instrumen keuangan majemuk, disajikan secara terpisah dalam Laporan Laba Rugi apabila instrumen keuangan majemuk tersebut diklasifikasikan sebagai *FVTPL* dan disajikan di dalam Laporan Penghasilan Komprehensif Lain apabila instrumen keuangan majemuk tersebut diklasifikasikan sebagai *FVTOCI*.

3.3. Liabilitas Keuangan

1. Dasar pengaturan liabilitas keuangan menggunakan SAK efektif per 1 Januari 2020:
   a. PSAK 50 Instrumen Keuangan : Penyajian
   b. PSAK 60 Instrumen Keuangan : Pengungkapan
   c. PSAK 71 Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran
   d. ISAK 28 : Pengakhiran Liabilitas Keuangan
2. Penjelasan
   a. Liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas yang berupa[38]:
      i. Kewajiban kontraktual:
         - Untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada perusahaan lain
         - Untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan perusahaan lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan perusahaan lain tersebut
      ii. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan perusahaan dan merupakan suatu:
         - Nonderivatif dimana perusahaan harus atau mungkin diwajibkan untuk menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan perusahaan; atau
         - Derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan perusahaan. Untuk tujuan pertukaran tersebut, *rights*, opsi atau waran dalam memperoleh suatu jumlah yang tetap atas instrumen ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan untuk jumlah yang tetap dari berbagai mata uang adalah instrumen ekuitas jika perusahaan menawarkan rights, opsi atau waran prorata terhadap seluruh pemilik yang ada saat ini pada kelas yang sama pada instrumen ekuitas nonderivatif yang dimiliki.
   b. Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori sebagai berikut[39]:
      i. Biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost*). Perusahaan mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

[38] PSAK 50 p.11
[39] PSAK 71 p.4.2.1-p.4.2.2

- Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas tersebut, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
- Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
- Kontrak jaminan keuangan yang diterbitkan. Setelah pengakuan awal, kontrak selanjutnya diukur sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
  - Jumlah penyisihan kerugian yang ditentukan sesuai dengan PSAK 71: Instrumen Keuangan, dan
  - Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, jika sesuai.
- Komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar. Setelah pengakuan awal, kontrak selanjutnya diukur sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
  - Jumlah penyisihan kerugian yang ditentukan sesuai dengan PSAK 71: Instrumen Keuangan, dan
  - Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, jika sesuai.
- Imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 22: Kombinasi Bisnis diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya diakui dalam Laporan Laba Rugi.

ii. Nilai wajar melalui laba rugi (*Fair Value Through Profit Loss / FVTPL*). Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah liabilitas keuangan yang memenuhi salah satu dari kondisi berikut ini:
- Memenuhi definisi dimiliki untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan termasuk kedalam kategori dimiliki untuk diperdagangkan (*for trading*) jika liabilitas keuangan tersebut memenuhi salah satu kategori berikut:
  - Liabilitas keuangan yang dimiliki dengan tujuan pembelian kembali dalam waktu dekat
  - Liabilitas keuangan yang pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang diidentifikasi memiliki pola pengambilan keuntungan jangka pendek yang secara aktual terbukti, dan
  - Liabilitas derivatif, kecuali bila derivatif dalam bentuk kontrak jaminan keuangan atau merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditetapkan.

  Fakta bahwa liabilitas digunakan untuk menyediakan pendanaan untuk kegiatan perdagangan tidak dengan sendirinya berarti bahwa liabilitas tersebut harus diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan.
- Pada saat pengakuan awal, perusahaan dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila suatu kontrak mengandung satu atau lebih derivatif melekat dan kontrak utama bukan merupakan aset sesuai ruang lingkup PSAK 71, perusahaan dapat menetapkan seluruh kontrak hibrida untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali:

- Derivatif tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas yang disyaratkan oleh kontrak
- Terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis ketika instrumen hibrida yang serupa pertama kali dipertimbangkan bahwa pemisahan derivatif melekat tersebut tidak diizinkan, seperti opsi pelunasan dipercepat yang melekat dalam pinjaman yang mengizinkan pemegangnya untuk membayar dimuka atas pinjaman tersebut kurang lebih sebesar biaya perolehan amortisasi

Atau jika penetapan akan menghasilan informasi yang lebih relevan karena:

- Mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "*Accounting Missmatch*") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda
- Sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci perusahaan sebagai contoh Dewan Direksi

- Ditetapkan baik pada saat pengakuan awal atau Pengukuran setelah pengakuan pada nilai wajar melalui laba rugi jika perusahaan mengelola seluruh atau sebagian risiko kredit dari suatu instrumen keuangan (eksposur kredit), perusahaan dapat menetapkan instrumen keuangan tersebut sepanjang instrumen keuangan tersebut (yaitu seluruhnya atau sebagian) dikelola sebagai instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika:
  - Nama eksposur kredit (misalnya, peminjam atau pemegang komitmen pinjaman) sesuai dengan perusahaan rujukan dalam derivatif kredit ("kesepadanan dana")
  - Senioritas instrumen keuangan cocok dengan instrumen yang dapat diberlakukan sebagai derivatif kredit

  Perusahaan dapat membuat penetapan ini terlepas dari apakah instrumen keuangan yang dikelola untuk risiko kredit masuk dalam ruang lingkup PSAK 71 (sebagai contoh perusahaan dapat menetapkan komitmen pinjaman yang berada diluar ruang lingkup PSAK 71). Perusahaan dapat menetapkan instrumen keuangan tersebut pada atau setelah pengakuan awal, atau pada saat tidak lagi diakui. Perusahaan mendokumentasikan penetapan tersebut pada saat yang bersamaan.

c. Reklasifikasi liabilitas keuangan[40]

   Reklasifikasi liabilitas keuangan tidak diperkenankan.

3. Perlakuan Akuntansi

   a. Pengakuan awal dan pengukuran saat pengakuan awal[41]

      Perusahaan mengakui liabilitas keuangan dalam Laporan Posisi Keuangan, ketika perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat perusahaan

[40] PSAK 71 p.4.4.2

[41] PSAK 71 p.3.1.1-p.3.1.2

pertama kali mengakui liabilitas keuangan, perusahaan mengklasifikasikannya sesuai dengan klasifikasi di atas dan mengukurnya sesuai ketentuan pengukuran yang telah diatur pada 3.1. Aset Keuangan nomor 3 poin b.

b. Pengukuran setelah pengakuan awal

Perusahaan melakukan pengukuran pada liabilitas keuangan pada nilai wajar seperti yang sudah dijabarkan pada Bab II Nomor 2.11. Pengukuran Nilai Wajar. Setelah itu pengukuran setelah pengakuan awal atas liabilitas keuangan diatur dalam masing-masing jenis klasifikasi liabilitas keuangan pada poin 2a mengenai penjelasan atas klasifikasi liabilitas keuangan.

c. Penurunan Nilai[42]

i. Ruang lingkup penurunan nilai pada liabilitas keuangan diberlakukan sebagai berikut:
   - Komitmen pinjaman yang tidak diklasifikasikan sebagai *FVTPL*
   - Kontrak jaminan keuangan tertulis yang tidak diklasifikasikan sebagai *FVTPL*

ii. Untuk komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, tanggal pada saat perusahaan menjadi pihak dalam suatu komitmen yang tak terbatalkan merupakan tanggal pengakuan awal untuk keperluan penerapan persyaratan penurunan nilai.

iii. Untuk komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit adalah nilai kini dari selisih antara:
   - Arus kas kontraktual yang terutang kepada perusahaan jika pemilik komitmen pinjaman menarik pinjaman
   - Arus kas yang diperkirakan diterima oleh perusahaan jika pinjaman ditarik

iv. Estimasi perusahaan terhadap kerugian ekspektasian atas komitmen pinjaman konsisten dengan ekspektasi penarikan atas komitmen pinjaman tersebut, yaitu Perusahaan mempertimbangkan porsi yang diperkirakan dari komitmen pinjaman yang akan ditarik dalam 12 bulan dari tanggal pelaporan ketika mengestimasi kerugian kredit ekspektasian 12 bulan, dan porsi yang diperkirakan dari komitmen pinjaman yang akan ditarik selama perkiraan umur komitmen pinjaman yang diperkirakan ketika mengestimasi kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya.

v. Untuk kontrak jaminan keuangan, Perusahaan disyaratkan untuk melakukan pembayaran hanya pada peristiwa gagal bayar oleh debitur sesuai dengan persyaratan instrumen yang dijamin. Sejalan dengan hal itu, kekurangan kas adalah pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi dengan jumlah yang diharapkan Perusahaan untuk diterima pemiliknya, debitur atau pihak lain. Jika aset dijamin penuh, estimasi kekurangan kas untuk kontrak jaminan keuangan akan konsisten dengan estimasi kekurangan kas untuk aset yang menjadi subjek jaminan.

vi. Penurunan liabilitas keuangan menggunakan pendekatan umum sebagaimana yang telah diuraikan pada ketentuan penurunan nilai aset keuangan nomor 3 huruf d.

d. Penghentian Pengakuan[43]

Perusahaan mengeluarkan liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) dari Laporan Posisi Keuangan jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan

[42] PSAK 71 p.5.5.3-p.5.5.8, p.PP5.5.30-p.PP5.5.32
[43] PSAK 71 p.3.3.1-p.3.3.4

dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa. Hal ini terjadi antara lain saat:

i. Perusahaan melakukan pembayaran kepada kreditor
ii. Perusahaan secara hukum dibebaskan dari kewajiban kontraktual
iii. Perusahaan mempertukaran liabilitas keuangan
iv. Perusahaan melakukan restrukturisasi atau pembiayaan kembali (*refinancing*) dan syarat-syarat liabilitas keuangan dimodifikasi secara substansial

e. Penyajian[44]

Perusahaan menyajikan liabilitas keuangan dalam Laporan Posisi Keuangan berdasarkan:

i. Nilai perolehan untuk liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost)*
ii. Nilai wajar untuk liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai *FVTPL*

Sedangkan untuk keuntungan maupun kerugian akibat pengukuran nilai wajar atas liabilitas keuangan, keuntungan dan kerugian tersebut disajikan secara terpisah dalam Laporan Laba Rugi.

[44] PSAK 50 p.13-p.50, p.PP03-p.PP12

BAB IV
PERSEDIAAN

1. Dasar pengaturan persediaan menggunakan SAK efektif per 1 Januari 2020:
   a. PSAK 14 : Persediaan
   b. PSAK 72 : Pendapatan dari Kontrak Pelanggan
2. Penjelasan
   a. Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan, jika[45]:
      i. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa
      ii. Dalam proses produksi untuk penjualan
      iii. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.
   b. Persediaan yang dimiliki oleh Perusahaan terdiri atas:
      i. Pekerjaan dalam penyelesaian (*work in progress*)
      ii. Komponen dan material
3. Perlakuan Akuntansi
   a. Pengakuan awal
      Persediaan diakui pada saat baik persediaan atau bahan dan barang dalam proses produksi tersebut diterima oleh Perusahaan dalam kondisi siap dijual.
   b. Pengukuran saat pengakuan awal
      i. Perusahaan mengukur persediaan berdasarkan nilai yang lebih rendah antara biaya atau nilai realisasi bersih (*the lower of cost and net realizable value*). Jenis-jenis biaya dimaksud adalah biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain[46].
      ii. Harga Pokok Persediaan (biaya persediaan) adalah semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan persediaan berada dalam kondisi siap untuk dijual atau dipakai[47].

Tabel 2 - Biaya Persediaan

Biaya Persediaan	
Biaya Pembelian	Harga pembelian
	Bea masuk dan pajak lainnya (kecuali pajak yang kemudian dapat ditagih kembali oleh Perusahaan kepada kantor pajak)
	Biaya pengangkutan
	Penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi

[45] PSAK 14 p.6
[46] PSAK 14 p.28-p.33
[47] PSAK 14 p.10-p.21

Biaya Persediaan	
	Biaya bahan dan jasa
	Diskon atau potongan harga dan pos lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian
Biaya Konversi	Biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi, seperti biaya tenaga kerja langsung
Biaya Lain	Biaya persediaan hanya sepanjang biaya tersebut timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat kini

c. Pengukuran setelah pengakuan awal
   i. Dalam menetapkan besarnya harga pokok (biaya persediaan), Perusahaan menggunakan salah satu metode sebagai berikut[48]:
      - Biaya masuk pertama keluar pertama atau dikenal sebagai *First In First Out* (FIFO)
      - Rata-rata tertimbang (*Weighted Average Cost Method*)
   ii. Sedangkan untuk metode penjurnalan atas persediaan, Perusahaan menggunakan salah satu metode sebagai berikut:
      - Perpetual adalah metode yang mencatatkan setiap persediaan yang masuk dan keluar
      - Periodik adalah metode yang mencatatkan jumlah persediaan hanya diakhir periode

      Metode tersebut disesuaikan dengan karakteristik persediaan yang terdapat didalam Perusahaan.
d. Penurunan nilai[49]
   i. Kerugian penurunan nilai adalah selisih antara biaya perolehan dengan nilai realisasi neto akibat penurunan nilai.
   ii. Biaya persediaan mungkin tidak akan diperoleh kembali jika persediaan rusak, persediaan telah usang atau harga jualnya telah menurun. Oleh karena itu, nilai persediaan tersebut diturunkan ke nilai realisasi neto secara terpisah untuk setiap unit persediaan. Namun demikian, dalam beberapa kondisi, penurunan nilai persediaan mungkin lebih sesuai jika dihitung untuk kelompok unit yang serupa.
   iii. Setiap penurunan nilai akan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut.
   iv. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode pemulihan tersebut. Pemulihan yang diakui adalah dibatasi sebesar jumlah penurunan nilai awal.
   v. Bahan dan perlengkapan lain yang dimiliki untuk digunakan dalam memproduksi persediaan

[48] PSAK 14 p.25-p.27
[49] PSAK 14 p.34-p.35

(persediaan bahan baku) tidak diturunkan nilainya dibawah biaya perolehan jika produk jadi yang dihasilkan diharapkan dapat dijual sebesar atau diatas biaya perolehan. Akan tetapi, ketika penurunan harga bahan mengindikasikan biaya produk jadi yang dihasilkan akan melebihi nilai realisasi neto, maka nilai bahan diturunkan ke nilai realisasi neto. Dalam keadaan tersebut, biaya penggantian bahan merupakan ukuran terbaik sebagai nilai realisasi netonya.

e. Penghentian pengakuan

Persediaan dihentikan pengekuannya pada saat:

i. Tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.
ii. Jika penghentian pengakuan persediaan merupakan akibat dari penjualan, maka terdapat kemungkinan timbul laba (rugi) atas transaksi tersebut.

f. Penyajian[50]

i. Penyajian persediaan dalam Laporan Posisi Keuangan berdasarkan nilai yang lebih rendah antara biaya atau nilai realisasi bersih (*the lower of cost and net realizable value*).
ii. Penyajian harga pokok penjualan dalam Laporan Laba Rugi berdasarkan metode biaya masuk pertama keluar pertama atau dikenal sebagai *First In First Out* (*FIFO*) maupun rata-rata tertimbang (*Weighted Average Cost Method*) disesuaikan dengan metode yang diterapkan oleh Perusahaan.
iii. Penyajian atas penurunan nilai persediaan akan diakui sebagai beban pada terjadinya penurunan nilai dalam Laporan Laba Rugi.

[50] PSAK 1 p.54-p.80a, p.97-p.105

BAB V
PERPAJAKAN

1. Dasar pengaturan perpajakan menggunakan SAK efektif per 1 Januari 2020:
   a. PSAK 46 : Pajak Penghasilan

   Selain menggunakan SAK, pengaturan perpajakan diatur didalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku selama tahun berjalan
2. Penjelasan[51]
   a. Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode.
   b. Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak Perusahaan.
   c. Laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Pajak atas pajak penghasilan yang terutang (dilunasi).
   d. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-udang perpajakan) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.
   e. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya:
      i. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan,
      ii. Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan
      iii. Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.
   f. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
   g. Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:
      i. Pengakuan awal goodwill, atau
      ii. Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).
   h. Manajemen secara periodik mengevaluasi perlakuan pajak yang diterapkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika diperlukan, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada otoritas pajak.
   i. Peraturan perpajakan Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.
   j. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Final adalah jenis pajak yang dikenakan pada nilai bruto

[51] PSAK 46 p.5

atas setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan subjek dan objek dari kedua pajak tersebut. Peraturan pajak bersifat dinamis, yaitu mengikuti ketentuan dari Pemerintah. Oleh karena itu, ketentuan rinci atas PPN maupun Pajak Final mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku selama tahun berjalan.

k. Kredit pajak merupakan perhitungan Pajak Penghasilan yang telah dibayar atau dipungut selama periode berjalan. Dalam setiap Tahun Pajak berjalan, perusahaan harus melunasi pajak yang diperhitungkan akan terutang pada Tahun Pajak tersebut. Pelunasan dilakukan melalui pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak berwenang atau melalui pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.

l. Pembayaran pajak dalam satu Tahun Pajak berjalan dapat dikreditkan yaitu dengan melunasi angsuran pembayaran. Angsuran tersebut diperhitungkan dengan mengkreditkan Pajak Penghasilan yang terutang dalam Tahun Pajak terkait. Ketentuan ini tidak berlaku untuk penghasilan yang dikenai pajak bersifat Final.

3. Perlakuan Akuntansi[52]
   a. Pengakuan awal pajak kini:
      i. Jumlah pajak kini, yang belum dibayar harus diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan.
      ii. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar melebihi jumlah pajak terutang, maka selisihnya, diakui sebagai aset pajak tangguhan.
      iii. Manfaat dari rugi pajak yang dapat ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset pajak tangguhan.
   b. Pengakuan awal aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan :
      i. Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:
         - Pengakuan awal goodwill, atau
         - Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang:
            - Bukan kombinasi bisnis, dan
            - Pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba (rugi) kena pajak.
      ii. Namun, aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang:
         - Bukan kombinasi bisnis, dan
         - Pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).
      iii. Perusahaan mengakui liabilitas pajak tangguhan pada anak, cabang, dan asosiasi, serta pengaturan bersama, kecuali sepanjang kedua kondisi berikut telah terpenuhi:
         - Perusahaan mampu mengendalikan waktu pemulihan perbedaan temporer, dan
         - Kemungkinkan besar perbedaan temporer akan terpulihkan di masa depan.
      iv. Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan dari anak, cabang dan entitas asosiasi, serta pengaturan bersama sepanjang dan hanya sepanjang kemungkinan besar terjadi:

[52] PSAK 46 p.6-p.24

- Perbedaan temporer akan terpulihkan pada masa depan yang dapat diperkirakan, dan
- Laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan.

c. Pengukuran
   i. Liabilitas (aset) pajak kini diukur sebesar jumlah yang diharapkan untuk dibayar (direstitusi) kepada otoritas perpajakan, sesuai dengan tarif pajak (peraturan pajak) pada periode pelaporan.
   ii. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan
   iii. Jika terjadi perubahan tarif di masa mendatang akan mempengaruhi pengakuai aset atau liabilitas pajak tangguhan.
   iv. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

d. Penyajian saling hapus
   i. Perusahaan melakuan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika Perusahaan:
      - Memiliki hak secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui; dan
      - Berniat untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.
   ii. Perusahaan melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika:
      - Perusahaan memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
      - Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas pajak atas Perusahaan kena pajak yang sama atau Perusahaan kena pajak berbeda yang akan merelaisasikan secara bersama

e. Perubahan terhadap liabilitas perpajakan dicatat pada saat diterimanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan SKP diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

BAB VI
ASET TAKBERWUJUD

1. Dasar pengaturan aset takberwujud menggunakan SAK efektir per 1 Januari 2020:
   a. PSAK 19 : Aset Takberwujud
   b. PSAK 48 : Penurunan Nilai Aset
2. Penjelasan
   Definisi aset takberwujud adalah aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Aset takberwujud harus memenuhi semua unsur berikut[53]:
   a. Keteridentifikasian
      Suatu aset dapat dikatakan terindentifikasi jika salah satu terpenuhi:
      i. Dapat dipisahkan, yaitu dapat dipisahkan atau dibedakan dari Perusahaan dan dijual, dipindahkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan, baik secara tersendiri atau bersama-sama dengan kontrak terkait, aset atau liabilitas teridentifikasi, terlepas dari apakah Perusahaan bermaksud untuk melakukan hal tersebut. Contoh, perangkat lunak komputer.
      ii. Timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lain, terlepas dari apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari Perusahaan atau dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya. Contoh hak cipta, paten, *franchise*, merek dagang, daftar pelanggan, dsb.
   b. Pengendalian
      Perusahaan dikatakan mengendalikan aset jika memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari aset dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Pengendalian biasanya timbul dari hak hukum yang dapat dipaksakan dalam pengadilan. Apabila hak legal itu tidak ada, Perusahaan akan lebih sulit menunjukkan adanya pengendalian. Akan tetapi, kekuatan hukum suatu hak bukan merupakan syarat perlu bagi pengendalian karena Perusahaan dapat saja mengendalikan manfaat ekonomis masa depan dengan cara lain.
   c. Manfaat ekonomis masa depan
      Dapat mencakup pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset oleh Perusahaan.
3. Perlakuan akuntansi
   a. Pengakuan awal dan pengukuran saat pengakuan awal[54]
      i. Pada saat pengakuan awal, aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan aset terdiri dari:
         - Harga beli, termasuk bea masuk (impor) dan pajak pembelian yang tidak dapat direstitusi, dan
         - Segala biaya yang terkait secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan. Contohnya, imbalan kerja karyawan, imbalan profesional, dan biaya untuk menguji.

[53] PSAK 19 p.12-p.17
[54] PSAK 19 p.18-p.24

Contoh biaya yang tidak dapat dimasukkan sebagai biaya perolehan:

- Biaya pengenalan produk atau jasa baru (termasuk biaya iklan dan kegiatan promosi)
- Biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi atau pelanggan baru (termasuk biaya pelatihan karyawan)
- Biaya administrasi dan biaya *overhead* umum lain

ii. Aset takberwujud Perusahaan diperoleh dari akuisisi entitas anak dan kombinasi bisnis.

iii. Amortisasi[55]

- Aset takberwujud diamortisasi berdasarkan estimasi masa manfaat. Perusahaan wajib mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud. Apabila nilai tercatat aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset aset tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali.
- Amortisasi dihitung berdasarkan metode garis lurus selama manfaat aset takberwujud. Berikut adalah jenis-jenis aset takberwujud beserta masa manfaatnya:

Tabel 3 - Aset Tak Berwujud

Aset takberwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Hubungan baik dengan pelanggan	4-5
Lisensi	1-20
Software	1 - 20
Trademarks	20

b. Pengukuran setelah pengakuan awal

Untuk melakukan pengukuran setelah pengakuan awal suatu aset takberwujud, Perusahaan menggunakan model biaya (*cost model*).

c. Penurunan nilai[56]

i. Untuk aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas, Perusahaan melakukan pengujian penurunan nilai jika terdapat indikasi (eksternal atau internal) penurunan nilai pada akhir periode pelaporan. Selanjutnya, Perusahaan harus mengestimasi jumlah terpulihkan dari aset tersebut. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Perusahaan melakukan uji penurunan nilai (*impairment test*). Uji penurunan nilai dilakukan dengan mengestimasi jumlah terpulihkan dari suatu aset (*recoverable amount*). Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan (*fair value less cost to sell*) dengan nilai pakai (*value in use*) suatu aset.

[55] PSAK 19 p.97-p.99
[56] PSAK 48 p.7-p.24

ii. Untuk aset takberwujud dengan masa manfaat takterbatas, termasuk *goodwill*, terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai, Perusahaan harus melakukan pengujian penurunan nilai (*impairment test*) minimal setahun sekali, dengan membandingkan jumlah tercatatnya dengan jumlah terpulihkannya. Rugi penurunan nilai *goodwill* dilakukan pada tingkat penurunan nilai Unit Penghasil Kas. Rugi penurunan nilai dialokasikan untuk mengurangi jumlah tercatat aset dari unit tersebut (kelompok dari unit) dengan urutan sebagai berikut:
   - Mengurangi jumlah tercatat atas setiap *goodwill* yang dialokasikan ke unit penghasil kas tersebut (kelompok dari unit); dan
   - Selanjutnya, dialokasikan ke aset lain dari unit penghasil kas tersebut (kelompok dari unit) dengan melakukan alokasi pembagian secara merata (secara *prorate*) berdasarkan jumlah tercatat dari setiap aset dalam unit penghasil kas tersebut (kelompok dari unit).

iii. Jika pada periode selanjutnya terdapat indikasi pemulihan penurunan nilai maka *goodwill* yang telah diturunkan tidak dapat dibalik.

d. Penghentian pengakuan[57]

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya apabila:

i. Tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

ii. Dijual, ditukar, atau sebab-sebab lain sehingga aset takberwujud tersebut dihapuskan.

iii. Penghentian pengakuan aset takberwujud sebagai akibat penjualan atau pertukaran dengan aset lain. Terdapat kemungkinan timbul laba (rugi) atas transaksi pertukaran tersebut.

e. Penyajian[58]

i. Penyajian aset takberwujud dalam Laporan Posisi Keuangan setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi atas aset takberwujud dan disesuaikan dengan model pengukuran setelah pengakuan awal yang digunakan, yaitu model biaya.

ii. Penyajian amortisasi aset takberwujud sebagai beban amortisasi dalam Laporan Laba Rugi.

[57] PSAK 19 p.112-p.117

[58] PSAK 1 p.54-p80a

BAB VII
ASET TETAP

1. Dasar pengaturan aset tetap menggunakan SAK efektif per 1 Januari 2020:
   a. PSAK 16 : Aset Tetap
   b. PSAK 48 : Penurunan Nilai Aset
   c. ISAK 8 : Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa
2. Penjelasan
   a. Aset tetap secara umum[59]
      i. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan admisnistratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.
      ii. Aset tetap diakui jika biaya perolehan aset dapat diukur secara andal dan besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis di masa datang yang berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir ke dalam Perusahaan.
      iii. Aset tetap dapat diperoleh dalam bentuk siap pakai, dibangun terlebih dahulu sampai siap pakai, atau dari transaksi sewa pembiayaan.
      iv. Aset tetap meliputi aset tetap yang telah siap untuk digunakan dan aset tetap dalam proses konstruksi.
      v. Jika aset utama sudah habis manfaat ekonomisnya maka renovasi yang menambah manfaat ekonomis dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan estimasi manfaat aset setelah renovasi. Estimasi manfaat ekonomis dari aset tetap ditetapkan oleh Direksi setelah mempertimbangkan pendapat ahli.
      vi. Pengeluaran untuk perolehan aset tetap yang diakui sebagai aset tetap mengacu pada batasan jumlah yang ditetapkan manajemen.
      vii. Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menelaah manfaat ekonomis, metode penyusutan dan nilai residu aset tetap.
   b. Aset tetap selain tanah[60]
      i. Biaya-biaya perolehan awal
         - Biaya perolehan aset tetap terdiri dari:
            - Harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak yang tidak dapat dikreditkan *(non-refundable),* serta diskon dan potongan lain.
            - Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.
            - Estimasi biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap, serta restorasi lokasi aset tetap.
         - Contoh biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung maupun yang bukan merupakan biaya perolehan aset tetap

[59] PSAK 16 p.6-p.14
[60] PSAK 16 p.15-p.22a

Tabel 4 - Biaya Perolehan Aset Tetap

Biaya Perolehan Aset Tetap	
Biaya diatribusikan secara lansung	Biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan atau akuisisi aset tetap
	Biaya penyiapan lahan
	Biaya *handling* dan penyerahan
	Biaya perakitan dan instalasi
	Biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik
	Komisi profesional, misalnya biaya arsitek
	Beban bunga pinjaman untuk pendanaan pembangunan gedung selama konstruksi
Biaya yang bukan perolehan aset tetap	Biaya pembukaan fasilitas baru, biaya peresmian
	Biaya pengenalan, termasuk biaya iklan dan aktivitas promosi
	Biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok pelanggan baru, termasuk biaya pelatihan staf
	Biaya administrasi dan biaya overhead umum lainnya

- Harga perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- Dalam kondisi yang memenuhi persyaratan tertentu, biaya pinjaman dapat merupakan bagian perolehan aset tetap.
- Biaya-biaya setelah perolehan awal.
  - Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Perusahaan mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal.
  - Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam Laporan Laba Rugi dalam periode keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.
  - Biaya penggantian suatu komponen aset tetap diperlakukan sebagai berikut:
    - Biaya penggantian tersebut menambah jumlah tercatat aset tetap.
    - Jumlah tercatat komponen yang digantikan dihentikanpengakuannya.

c. Aset Tetap Tanah[61]

Biaya perolehan tanah, antara lain, meliputi:

Tabel 5 - Biaya Perolehan Tanah

Biaya Perolehan Tanah
Harga transaksi pembelian tanah termasuk tanaman, prasarana, bangunan diatasnya yang harus dibeli kemudian dimusnahkan
Biaya konstruksi atau pembuatan tanah, bila lahan tanah diciptakan
Biaya ganti rugi penghuni, biaya relokasi
Biaya komisi perantara jual beli tanah
Biaya pinjaman terkapitalisasi ke dalam tanah
Biaya pematangan tanah
Biaya pembelian tanah lain sebagai pengganti

d. Pertukaran Aset Tetap[62]

i. Aset tetap dapat diperoleh dari pertukaran suatu aset tetap dengan aset tetap lainnya, termasuk pembayaran dalam bentuk kas, setara kas, atau aset keuangan lainnya.

ii. Pertukaran aset tetap dievaluasi apakah mengandung substansi komersial atau tidak. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
   - Konfigurasi risiko, waktu, dan jumlah arus kas dari aset yang diterima berbeda dengan aset yang diserahkan; atau
   - Nilai spesifik Perusahaan dari kegiatan operasional yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut berubah; dan
   - Selisihnya adalah relatif signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

iii. Nilai spesifik perusahaan adalah nilai kini dari arus kas suatu perusahaan yang diharapkan timbul dari penggunaan dan pelepasan aset.

iv. Pengukuran biaya perolehan aset tetap baru yang diperoleh dari pertukaran aset tetap.
   - Jika pertukaran aset tetap memiliki substansi komersial, maka aset tetap baru diukur sebesar:
     - Nilai wajar aset tetap yang diserahkan; atau
     - Nilai wajar aset tetap yang diterima, jika lebih jelas.

[61] PSAK 16 p.58-p.59
[62] PSAK 16 p.24-p.25

- Jika pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau nilai wajar dari aset tetap yang diserahkan atau diterima tidak dapat diukur secara andal, maka diukur sebesar nilai tercatat aset tetap yang diserahkan.

e. Penyusutan[63]

i. Aset tetap harus disusutkan secara sistematis selama manfaat ekonomisnya

ii. Penyusutan akan dimulai pada saat aset tetap siap digunakan dan berakhir pada saat penghentian pengakuan atau pada saat terjadi reklasifikasi dari aset tetap ke aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual. Besarnya biaya penyusutan yang diakui setiap periodenya tergantung pada manfaat ekonomis, estimasi nilai residu, dan metode penyusutan yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Perusahaan.

iii. Metode penyusutan digunakan untuk mengalokasikan jumlah tersusutkan dari aset secara sistematis selama manfaat ekonomisnya. Metode penyusutan yang digunakan oleh Perusahaan adalah metode garis lurus. Metode ini menghasilkan pembebanan yang tetap selama manfaat ekonomis aset jika nilai residunya tidak berubah.

iv. Manfaat ekonomis adalah periode penggunaan yang diharapkan dari suatu aset tetap. Berikut adalah daftar manfaat ekonomis serta batasan minimum nilai kapitalisasi untuk setiap aset tetap.

Tabel 6 - Aset Tetap

Aset Tetap	Umur Manfaat (Tahun)	Biaya Perolehan
Bangunan	5-40	Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000
Furniture	4	Rp 50.000.000
Kendaraan	4-8	Rp 100.000 - Rp 10.000.000
Komputer	2-5	Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000
Mechanical Engineering	5-20	Rp 1.000.000
Mesin	4-5	Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000
Peralatan Kantor	2-8	Rp 100.000 - Rp 5.000.000
Peralatan Operasional	2-10	Rp 1.000.000 - Rp 10.000.000
Peralatan Komputer	3-20	Rp 100.000 - Rp 10.000.000
Perlengkapan Kantor	3-20	Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000
Peralatan Laboratorium	4-8	Rp 1.000.000

[63] PSAK 16 p.43-p.62a

Peralatan Listrik dan Mekanik	4-8	Rp 5.000.000 - Rp 10.000.000
Peralatan Pengolahan Data	4	Rp 1.000.000
Prasarana Bangunan	3-7	Rp 5.000.000
Prasarana	3-10	Rp 1.000.000
Renovasi Gedung	4-8	Rp 1.000.000
Transmission Satellite	4-10	Rp 20.000.000

v. Nilai residu adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan.

vi. Aset tetap berupa tanah tidak disusutkan, kecuali:
- Kondisi kualitas tanah tidak layak lagi digunakan dalam operasi utama;
- Sifat operasi utama meninggalkan tanah dan bangunan begitu saja jika proyek selesai;
- Prediksi manajemen atas kepastian perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah besar kemungkinan atau pasti tidak diperoleh.

vii. Jumlah tercatat aset tetap adalah biaya perolehan aset tetap dikurangi nilai residunya dan penurunan nilai, jika ada.

viii. Pada akhir tahun buku pelaporan, Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

3. Perlakuan Akuntansi

a. Pengakuan awal dan pengukuran saat pengakuan awal

i. Perolehan Aset Tetap[64]
- Aset tetap pada awalnya dinyatakan sebesar harga perolehan.
- Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan diakui sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak dengan mengkredit pos modal donasi pada kelompok ekuitas.
- Harga perolehan aset tetap tanah yang dibangun sendiri merupakan akumulasi seluruh biaya perolehan dan pengembangan tanah, berupa biaya pematangan tanah, di luar beban yang ditangguhkan akibat biaya legal pengurusan hak. Jika dalam proses pembangunannya, terdapat beban bunga maka beban tersebut akan dikapitalisasi berdasarkan PSAK 26: Biaya Pinjaman. Berdasarkan PSAK 26, biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban. Aset kualifikasian adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk

[64] PSAK 16 p.15-p.28

digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual.

- Harga perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian dengan aset tetap yang tidak serupa/tidak sejenis atau aset lain. Biaya dari pos semacam itu diukur pada nilai wajar aset yang dilepas atau diperoleh, mana yang lebih andal, setelah disesuaikan dengan jumlah dana yang diterima/diserahkan.

ii. Pengeluaran setelah perolehan awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memenuhi kriteria pengakuan aset dikapitalisasi dan diakui sebagai penambah jumlah tercatat aset tetap.

- Contoh pengeluaran setelah perolehan awal:
  - Biaya perawatan sehari-hari dari aset tetap diakui sebagai beban dalam Laporan Laba Rugi pada saat terjadinya.
  - Biaya lainnya yang dikeluarkan selama penggunaan aset tetap (biaya perbaikan, biaya penggantian, dan biaya penambahan). Biaya tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari aset tetap jika memenuhi kriteria berikut:
    - Besar kemungkinan Perusahaan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut; dan
    - Biaya tersebut dapat diukur secara andal.
  - Batasan kapitalisasi aset tetap telah dijabarkan didalam **Tabel 7 - Daftar Aset Tetap**. Jika biaya perolehan atas aset tetap di bawah nilai pada tabel di atas, maka pengeluaran tersebut langsung dibebankan. Dalam menentukan batasan atas biaya kapitalisasi suatu aset tetap, Perusahaan memutuskan bahwa biaya kapitalisasi yang telah ditentukan tidak mengikat pada setiap aset tetap dan biaya kapitalisasi tersebut dapat ditentukan dari sifat dan tujuan dari aset tetap itu sendiri.
  - Penyusutan

    Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai beban dalam Laporan Laba Rugi pada periode yang bersangkutan.

b. Pengukuran setelah pengakuan awal[65]

Untuk melakukan pengukuran biaya perolehan setelah perolehan awal suatu Aset Tetap, Perusahaan menggunakan model biaya (*cost model*). Pada model biaya (*cost model*) setelah pengakuan awal, aset tetap akan diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.

c. Penurunan Nilai[66]

i. Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mereview apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi penurunan nilai aset, maka manajemen akan menaksir jumlah

[65] PSAK 16 p.29-p.66
[66] PSAK 48 p.7-p.29, p.109-p.116

terpulihkan dari aset tersebut.

ii. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan (*fair value less cost to sell*) dengan nilai pakai (*value in use*) suatu aset.

iii. Nilai wajar aset adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran (lihat PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar). Biaya pelepasan mencakup biaya hukum, materai dan pajak transaksi sejenis, biaya pemindahan aset, dan biaya inkremental langsung untuk menjadikan aset siap dijual.

iv. Nilai pakai (*value in use*) adalah nilai kini dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas.

v. Dalam mengidentifikasi terdapat atau tidaknya penurunan nilai aset tetap, paling tidak harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

- Informasi dari luar:
  - Selama periode tertentu, nilai pasar aset tetap telah turun secara signifikan melebihi penurunan akibat proses normal penyusutan;
  - Telah terjadi dalam periode tertentu, atau akan terjadi dalam waktu dekat, perubahan memburuk yang signifikan dalam teknologi, pasar, kondisi ekonomi atau hukum tempat beroperasi, atau dalam pasar produk atau jasa yang dihasilkan dari aset tetap tersebut;
  - Selama periode tertentu, tarif diskonto pasar atau tingkat pengembalian investasi pasar telah meningkat, dan peningkatan ini cenderung akan menurunkan nilai aset tetap yang dapat diperoleh kembali secara material.
- Informasi dari dalam:
  - Terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset tetap;
  - Telah terjadi, atau akan terjadi dalam waktu dekat, perubahan signifikan yang bersifat merugikan sehubungan dengan cara penggunaan aset tetap;
  - Terdapat bukti dari pelaporan internal yang menunjukkan bahwa kinerja ekonomi aset tetap tidak memenuhi harapan atau akan lebih buruk dari yang diharapkan; dan
  - Aset tetap yang pada tahun terakhir sebelumnya disajikan sebesar nilai pakainya; dimana aliran kas sesungguhnya secara material lebih kecil dari aliran kas taksiran, sebelum memperhitungkan diskonto.

vi. lndikasi penurunan nilai aset yang disajikan di atas belum meliputi seluruh indikasi yang mungkin muncul. Perusahaan akan mengidentifikasi lebih lanjut hal-hal lain yang secara potensial berpengaruh terhadap penurunan nilai aset tetap dan menjadikan indikasi tersebut sebagai dasar untuk menentukan nilai yang dapat diperoleh kembali.

vii. Jika jumlah terpulihkan lebih rendah dibandingkan jumlah tercatat, maka Perusahaan mengakui kerugian penurunan nilai.

viii. Aset tetap tanah yang secara fisik menyusut luasnya karena pengikisan alam, secara proporsional mengurangi nilai tercatatnya dan dibebankan pada Laporan Laba Rugi.

ix. Seluruh kerugian tersebut diakui pada periode terjadinya.

x. Jika terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui pada tahun-tahun sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin menurun, maka Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.
xi. Pembalikan rugi penurunan nilai atas aset selain *goodwill* diakui segera dalam laba rugi.
xii. Setelah pembalikan rugi penurunan nilai diakui, penyusutan yang dibebankan atas aset tetap tersebut disesuaikan pada periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat yang direvisi, dikurangi nilai residu (jika ada), dengan dasar sistematis selama sisa manfaat ekonomis.

d. Penghentian pengakuan[67]
   i. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.
   ii. Aset tetap dihentikan pengakuannya dari kelompok aset tetap jika:
      - Dijual
      - Dihibahkan
      - Ditarik secara permanen dari penggunaannya
   iii. Aset tetap tanah yang diambil alih oleh negara untuk kepentingan umum dibebankan pada Laporan Laba Rugi periode berjalan sebesar jumlah tercatat aset tanah yang diambil alih setelah dikurangi ganti rugi yang diterima.
   iv. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan nilai tercatat dari aset) dikreditkan atau dibebankan pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

e. Penyajian[68]
   i. Penyajian aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai (jika ada) dalam Laporan Posisi Keuangan.
   ii. Tanah disajikan sebagai bagian kelompok aset tetap berwujud sebesar biaya perolehan dalam Laporan Posisi Keuangan.
   iii. Aset yang diperoleh dengan cara sewa pembiayaan disajikan sebagai bagian aset tetap dalam kelompok tersendiri. Liabilitas pembiayaan yang bersangkutan harus terpisah dari liabilitas lainnya.
   iv. Penyajian atas penyusutan aset tetap sebagai beban penyusutan dalam Laporan Laba Rugi

[67] PSAK 16 p.67-p.72
[68] PSAK 1 p.54-p.80a, p.97-p.105

BAB VIII
SEWA

1. Dasar pengaturan sewa pembiayaan menggunakan SAK efektif per 1 Januari 2020:
   a. PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan
   b. PSAK 2 : Laporan Arus Kas
   c. PSAK 48 : Penurunan Nilai Aset
   d. PSAK 73 : Sewa
   e. ISAK 8 : Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa
2. Penjelasan
   a. Mengidentifikasi sewa[69]
      i. Pada tanggal insepsi kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa.
      ii. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.
      iii. Berdasarkan aturan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dua syarat yang harus dipenuhi suatu kontrak agar menjadi kontrak sewa, yaitu:
         - Kontrak tersebut memiliki aset identifikasian.
         - Pelanggan memiliki hak untuk mengendalikan aset identifikasian selama suatu jangka waktu.

      Syarat 1 : <u>Apakah kontrak tersebut memiliki aset identifikasian?</u>[70]
      i. Aset identifikasian pada umumnya dapat disebutkan secara eksplisit dalam kontrak atau secara implisit pada saat aset tersebut tersedia untuk digunakan oleh pelanggan. Bagian kapasitas dari suatu aset juga merupakan aset identifikasian jika secara fisik dapat dibedakan (sebagai contoh, lantai dari suatu gedung).
      ii. Sebaliknya, kapasitas atau bagian lain dari suatu aset yang tidak dapat dibedakan secara fisik (sebagai contoh, bagian kapasitas dari kabel fiber optik) bukan merupakan aset identifikasian, kecuali jika bagian tersebut merepresentasikan secara substansial seluruh kapasitas aset sehingga memberikan pelanggan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset.
      iii. Meskipun aset disebutkan dalam kontrak, pelanggan tidak memiliki hak untuk menggunakan aset identifikasian jika pemasok memiliki hak substantif untuk mensubstitusi aset selama periode penggunaan. Hak pemasok untuk mensubstitusi aset dikatakan bersifat substantif hanya jika kedua kondisi di bawah ini terpenuhi:
         - Pemasok memiliki kemampuan praktis untuk mensubstitusi aset alternatif selama periode penggunaan; dan
         - Pemasok akan mendapat manfaat secara ekonomik dari mengeksekusi haknya untuk mensubstitusi aset (yaitu manfaat ekonomis yang terkait dengan mensubstitusi aset

[69] PSAK 73 p.9-p.11, p.PP09-p.PP33
[70] PSAK 73 p.PP13-p.PP20

diperkirakan melebihi biaya yang terkait dengan mensubstitusi aset).

iv. Pemasok dikatakan memiliki kemampuan praktis contohnya ketika pelanggan tidak dapat mencegah pemasok untuk mensubstitusi aset dan pemasok memiliki aset pengganti atau pemasok dapat menyediakan aset pengganti tersebut dalam periode waktu yang rasional.

v. Jika pemasok memiliki hak atau kewajiban untuk mensubstitusi aset hanya pada atau setelah tanggal tertentu atau terjadinya peristiwa tertentu, maka hak substitusi pemasok tidak bersifat substantif karena pemasok tidak memiliki kemampuan praktis untuk mensubstitusi aset alternatif selama periode penggunaan

vi. Evaluasi Perusahaan mengenai apakah hak substitusi pemasok bersifat substantif dilakukan berdasarkan fakta dan keadaan pada insepsi kontrak dan mengecualikan pertimbangan atas kejadian masa depan yang, pada insepsi kontrak, dianggap tidak mungkin terjadi. Contoh kejadian masa depan yang, pada insepsi kontrak, dianggap tidak akan mungkin terjadi sehingga dikecualikan dari evaluasi adalah sebagai berikut:
   - Perjanjian oleh pelanggan masa depan untuk membayar di atas harga pasar untuk penggunaan aset;
   - Pengenalan teknologi baru yang secara substansial belum dikembangkan pada insepsi kontrak
   - Perbedaan substansial antara penggunaan aset oleh pelanggan, atau kinerja aset, dan penggunaan atau kinerja yang dianggap cukup pasti pada insepsi kontrak; dan
   - Perbedaan substansial antara harga pasar aset selama periode penggunaan, dan harga pasar yang dianggap cukup pasti pada awal kontrak.

vii. Pertimbangan manfaat dan biaya diartikan bahwa manfaat ekonomis yang terkait dengan mensubstitusi aset diperkirakan melebihi biaya yang terkait dengan mensubstitusi aset. Biaya untuk mensubtitusi dinilai akan lebih besar dari manfaat ekonomis jika aset pengganti berada di tempat pelanggan atau di tempat lain, atau bukan berada di tempat pemasok.

viii. Namun demikian, hak atau kewajiban pemasok untuk mensubstitusi aset untuk perbaikan dan pemeliharaan tidak menghalangi pelanggan dalam memiliki hak untuk menggunakan aset identifikasian.

ix. Jika pelanggan tidak dapat menentukan apakah pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka pelanggan menganggap bahwa hak substitusi tersebut tidak bersifat substantif.

Syarat 2 : <u>Apakah Pelanggan memiliki hak untuk mengendalikan aset identifikasian selama suatu jangka waktu?</u>[71]

i. Terdapat dua indikator utama untuk menilai syarat kedua dari kontrak sewa yaitu apakah pelanggan memiliki hak pengendalian aset indentifikasian selama periode penggunaan. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:
   - Pelanggan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian; dan
   - Pelanggan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian.

[71] PSAK 73 p.PP21-p.PP33

ii. Hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian:
   - Dengan memiliki penggunaan eksklusif aset selama periode penggunaan, maka pelanggan dikatakan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian.
   - Pelanggan bisa mendapatkan manfaat ekonomis dari penggunaan aset secara langsung atau tidak langsung melalui berbagai cara, seperti:
     - Dengan menggunakan, menguasai, atau mensubsewakan aset.
     - Manfaat ekonomis dari penggunaan aset mencakup output utamanya dan produk sampingan (termasuk potensi arus kas yang berasal dari item ini), dan
     - Manfaat ekonomis lain dari menggunakan aset yang dapat direalisasikan dari transaksi komersial dengan pihak ketiga.
   - Hal lain yang perlu diperhatikan adalah ketika menilai hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset, Perusahaan hanya mempertimbangkan manfaat ekonomis yang berasal dari penggunaan aset dalam ruang lingkup hak pelanggan untuk menggunakan aset yang telah ditentukan. Sebagai contoh:
     - Jika kontrak membatasi penggunaan kendaraan bermotor hanya untuk satu wilayah tertentu selama periode penggunaan (hak protektif pemasok), maka Perusahaan hanya mempertimbangkan manfaat ekonomis dari penggunaan kendaraan bermotor dalam wilayah tersebut, dan tidak lebih.
     - Jika kontrak menetapkan bahwa pelanggan dapat mengendarai kendaraan bermotor hanya sampai sejumlah mil tertentu selama periode penggunaan (hak protektif pemasok), maka Perusahaan hanya mempertimbangkan manfaat ekonomis dari penggunaan kendaraan bermotor tersebut untuk jarak tempuh yang diizinkan, dan tidak lebih.
   - Selain itu, jika kontrak mensyaratkan pelanggan untuk membayar ke pemasok atau pihak lain bagian arus kas yang bersumber dari penggunaan aset sebagai imbalan, maka arus kas yang dibayarkan sebagai imbalan tersebut dipertimbangkan menjadi bagian dari manfaat ekonomis yang pelanggan peroleh dari penggunaan aset. Sebagai contoh, jika pelanggan disyaratkan untuk membayar ke pemasok persentase penjualan dari penggunaan ruang ritel sebagai imbalan dari penggunaan tersebut, maka persyaratan tersebut tidak membatasi pelanggan untuk memiliki hak mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan ruang ritel. Hal ini disebabkan karena arus kas yang timbul dari penjualan tersebut dipertimbangkan menjadi manfaat ekonomis yang diperoleh pelanggan dari penggunaan ruang ritel, sedangkan bagian dibayarkan kepada pemasok dianggap sebagai imbalan atas hak untuk menggunakan ruang tersebut.

iii. Hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian:
   - Pelanggan dikatakan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian selama periode penggunaan hanya jika:
     - Pelanggan memiliki hak untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan selama periode penggunaan; atau

- Keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan
- Pelanggan memiliki hak untuk mengoperasikan aset (atau mengarahkan pihak lain untuk mengoperasikan aset dengan cara yang telah ditentukan) selama periode penggunaan, tanpa pemasok memiliki hak untuk mengubah instruksi operasi tersebut; atau
- Pelanggan mendesain aset (atau aspek tertentu dari aset) dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

- Pelanggan dianggap memiliki hak untuk mengarahkan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan jika, dalam ruang lingkup kontrak, pelanggan dapat mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan selama periode penggunaan.
  - Contoh hak tersebut adalah:
    - Hak untuk mengubah jenis output yang dihasilkan oleh aset (sebagai contoh, untuk memutuskan apakah akan menggunakan kapal kontainer untuk mengangkut barang atau untuk penyimpanan, atau untuk memutuskan bauran produk yangdijual dari ruang ritel);
    - Hak untuk mengubah kapan output dihasilkan (sebagai contoh, untuk memutuskan kapan mesin atau pembangkit listrik akan digunakan);
    - Hak untuk mengubah di mana output dihasilkan (sebagai contoh, untuk memutuskan tujuan truk atau kapal, atau untuk memutuskan di mana peralatan digunakan); dan
    - Hak untuk mengubah apakah output dihasilkan, dan kuantitas output tersebut (sebagai contoh, untuk memutuskan apakah akan memproduksi listrik dari pembangkit listrik dan berapa banyak listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tersebut).
- Contoh hak pengambilan keputusan yang tidak memberikan hak untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan termasuk hak yang terbatas untuk mengoperasikan atau memelihara aset. Hak seperti itu dapat dimiliki oleh pelanggan atau pemasok. Akan tetapi, hak untuk mengoperasikan aset mungkin memberikan pelanggan hak untuk mangarahkan aset jika keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditetapkan sebelumnya.
- Keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan dapat ditentukan sebelumnya dengan berbagai cara. Sebagai contoh, keputusan yang relevan dapat ditentukan sebelumnya dengan mendesain aset atau dengan pembatasan kontraktual pada penggunaan aset.
- Kontrak terkadang memiliki klausul mengenai hak protektif, yaitu syarat dan ketentuan yang didesain untuk melindungi kepentingan pemasok atas aset atau aset lainnya, untuk melindungi personilnya, atau untuk memastikan kepatuhan pemasok terhadap hukum atau regulasi. Sebagai contoh, kontrak dapat:
  - Menetapkan jumlah maksimum penggunaan aset atau batas di mana dan kapan pelanggan dapat menggunakan aset
  - Mensyaratkan pelanggan untuk mengikuti praktik operasi tertentu, atau

- Mensyaratkan pelanggan untuk menginformasikan pemasok perubahan atas bagaimana aset akan digunakan.

Dengan adanya hak protektif tersebut, pelanggan tetap dikatakan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset

b. Memisahkan Kontrak Sewa/Mengandung Sewa dengan Kontrak NonSewa[72]

i. Banyak kontrak berisi sewa ditambah dengan perjanjian untuk membeli atau menjual barang atau jasa lain (yaitu, komponen nonsewa seperti pemeliharaan). Untuk kontrak-kontrak seperti ini, komponen nonsewa diidentifikasi dan dicatat secara terpisah dari komponen sewa.

ii. Sebagai cara praktis, penyewa dapat memilih, berdasarkan kelas aset pendasar, untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dari komponen sewa, dan memilih mencatat masing-masing komponen sewa dan komponen nonsewa terkait sebagai komponen sewa tunggal.

iii. Para penyewa yang tidak melakukan pemisahan terhadap kontrak sewa dengan kontrak nonsewa, diharuskan untuk mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa. Pesewa juga diharuskan untuk menerapkan ketentuan PSAK 73 untuk mengalokasikan pertimbangan dalam kontrak.

3. Perlakuan Akuntansi

a. Pengakuan awal

i. Perusahaan sebagai penyewa (*lessee*)[73]

- Aset hak-guna dan liabilitas sewa

  - Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan sebagai penyewa (*lessee*) mengakui aset hak-guna sebagai aset dan liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan.
  - Aset hak-guna (right-of-use asset) adalah aset yang merepresentasikan hak penyewa untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa.
  - Aset pendasar (underlying asset) adalah aset yang terikat pada suatu sewa, dimana hak untuk menggunakan aset tersebut telah diberikan oleh pesewa kepada penyewa.
  - Biaya-biaya langsung awal yang dikeluarkan sehubungan dengan aktivitas sewa diakui sebagai aset. Biaya-biaya langsung antara lain dapat berupa biaya dalam aktivitas negosiasi dan pemastian pelaksanaan sewa.
  - Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah:
    - Tingkat suku bunga implisit dalam sewa (jika praktis) atau
    - Tingkat suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan

- Sewa operasi

  Apabila suatu transaksi atas sewa tidak memenuhi klasifikasi atas aset hak-guna maupun liabilitas sewa, transaksi atas sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Dalam

[72] PSAK 73 p.12-p.17
[73] PSAK 73 p.22-p.60

sewa operasi, penyewa mengakui pembayaran sewa sebagai beban sewa dalam tahun berjalan pada biaya perolehan. Penjelasan mengenai pengecualian pengakuan atas aset hak-guna dan liabilitas sewa telah dijelaskan pada huruf b bagian pengecualian pengakuan atas aset hak-guna.

ii. Perusahaan sebagai pesewa (*lessor*)[74]

- Sewa Pembiayaan
  - Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar.
  - Apakah suatu sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi bergantung pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya. Contoh situasi yang secara individual atau gabungan yang pada umumnya akan menyebabkan sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah:
    - Sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada penyewa pada akhir masa sewa;
    - Penyewa memiliki opsi untuk membeli aset pendasar pada harga yang diperkirakan cukup rendah dari nilai wajar pada tanggal opsi tersebut
    - Mulai dapat dieksekusi sehingga menjadi cukup pasti, pada tanggal insepsi, bahwa opsi tersebut akan dieksekusi;
    - Masa sewa adalah sebagian besar umur ekonomik dari aset pendasar meski hak kepemilikan tidak dialihkan;
    - Pada tanggal insepsi, nilai kini dari pembayaran sewa setidaknya mencakup secara substansial seluruh nilai wajar aset pendasar; dan
    - Aset pendasar bersifat khusus sehingga hanya penyewa yang dapat menggunakannya tanpa modifikasi signifikan
  - Indikator situasi yang secara individual atau gabungan juga dapat menyebabkan sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah:
    - Jika penyewa dapat membatalkan sewa, maka kerugian pesewa yang terkait dengan pembatalan tersebut ditanggung oleh penyewa;
    - Keuntungan atau kerugian dari fluktuasi nilai wajar residual terutang pada penyewa (sebagai contoh, dalam bentuk potongan harga rental yang sama dengan sebagian besar hasil penjualan pada akhir sewa); dan
    - Penyewa memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua pada harga rental yang secara substansial lebih rendah daripada rental pasar.
  - Contoh dan indikator di atas tidak selalu konklusif. Jika terdapat kejelasan dari fitur lain bahwa sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Sebagai contoh, hal ini dapat terjadi jika kepemilikan aset pendasar beralih pada akhir sewa untuk pembayaran variabel yang sama dengan nilai wajarnya, atau jika terdapat pembayaran sewa variabel, yang mengakibatkan pesewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat.

[74] PSAK 73 p.61-p.97

- Klasifikasi sewa dibuat pada tanggal insepsi dan dinilai kembali hanya jika terdapat modifikasi sewa. Perubahan dalam estimasi (sebagai contoh, perubahan dalam estimasi umur ekonomik atau nilai residual aset pendasar), atau perubahan dalam keadaan (sebagai contoh, penyewa mengalami gagal bayar), tidak menimbulkan klasifikasi sewa baru untuk tujuan akuntansi.
- Pada tanggal permulaan, pesewa mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan dalam Laporan Posisi Keuangan dan menyajikannya sebagai piutang pada jumlah yang sama dengan investasi neto sewa.

- Sewa Operasi
  - Sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar.
  - Pesewa mengakui pembayaran sewa dari sewa operasi sebagai penghasilan dengan dasar garis lurus atau dasar sistematik lain. Pesewa menerapkan dasar sistematik lain jika dasar tersebut lebih merepresentasikan pola manfaat dari penggunaan aset pendasar yang menurun.
  - Pesewa mengakui biaya, termasuk penyusutan, yang timbul dalam mendapatkan penghasilan sewa sebagai beban.
  - Pesewa menambahkan biaya langsung awal yang timbul dalam mendapatkan sewa operasi pada jumlah tercatat aset pendasar dan mengakui biaya tersebut sebagai beban sepanjang masa sewa atas dasar yang sama dengan penghasilan sewa.
  - Kebijakan penyusutan atas aset pendasar yang dapat disusutkan untuk sewa operasi konsisten dengan kebijakan penyusutan normal pesewa untuk aset serupa. Pesewa menghitung penyusutan sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 19: Aset Takberwujud.

iii. Perlakuan akuntansi untuk hak atas tanah adalah sebagai berikut[75]:

- Perusahaan menilai sewa tanah atau lahan dengan cara yang sama dengan kontrak sewa lainnya. Pada umumnya tanah memiliki umur ekonomik yang tidak terbatas, sehingga kecil kemungkinan bahwa masa sewa tanah mencakup sebagian besar dari manfaat ekonomik tanah tersebut.
- Dalam skema HGB di Indonesia, terdapat indikasi yang kuat bahwa risiko dan manfaat secara substansial telah dialihkan kepada Perusahaan yang memiliki hak tersebut. Sebagai contoh, pada umumnya HGB dapat dijual kembali oleh Perusahaan dan Perusahaan dapat menggunakan hak atas tanah tersebut sebagai jaminan atau kolateral. Selain itu, nilai kini dari hak residual tanah diperkirakan kecil karena hanya berupa biaya administrasi dan pajak terkait kepada Pemerintah, dan bahwa biaya pengurusan perpanjangan HGB tidak substansial. Berdasarkan fakta ini, Perusahaan dapat menyimpulkan bahwa transaksi tersebut secara substansi menyerupai pembelian tanah, meskipun hak kepemilikan legal tidak berpindah kepada Perusahaan, sehingga Perusahaan mengacu pada PSAK 16: Aset Tetap.

[75] PSAK 73 p.62-p.66, p.PP53-p.PP57

- Terdapat kemungkinan bahwa, dalam suatu jenis hak atas tanah tertentu atau dalam suatu pola fakta tertentu, Perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk mengarahkan penggunaan aset pendasar, dan tidak memperoleh secara substansial seluruh sisa manfaat dari aset pendasar tersebut, sebagai contoh dalam hal Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL). Dalam kasus tersebut, Perusahaan menyimpulkan bahwa transaksi tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar, melainkan semata mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, sehingga Perusahaan menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi sewa yang diatur dalam PSAK 73: Sewa.
- Perusahan melakukan penilaian dan menggunakan pertimbangannya dalam menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah yang dimilikinya dalam menentukan perlakuan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut.

b. Pengecualian Pengakuan[76]

i. Terdapat ketentuan pengecualian pengakuan di mana penyewa dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:
   - Sewa jangka-pendek
   - Sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah
     - Perusahaan menetapkan batas nilai aset bernilai rendah sebesar USD 5000 (ekuivalen dengan nilai Rupiah pada saat tanggal pengukuran/pelaporan)

ii. Untuk sewa jangka-pendek atau untuk sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah, penyewa mengakui pembayaran sewa yang terkait dengan sewa tersebut sebagai beban baik dengan dasar garis lurus selama masa sewa maupun dasar sistematik lainnya. Penyewa menerapkan dasar sistematik lain jika dasar tersebut lebih merepresentasikan pola manfaat penyewa.

iii. Sewa jangka-pendek adalah sewa yang, pada tanggal permulaan sewa, memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Sewa yang mengandung opsi beli bukan merupakan sewa jangka-pendek.

iv. Penilaian apakah aset pendasar bernilai-rendah dilakukan atas dasar absolut. Sewa aset bernilai-rendah memenuhi perlakuan akuntansi di atas terlepas apakah sewa tersebut material untuk penyewa. Penilaian tidak dipengaruhi oleh ukuran, sifat, atau keadaan penyewa. Dengan demikian, penyewa yang berbeda diharapkan dapat mencapai kesimpulan yang sama mengenai apakah aset pendasar tertentu bernilai-rendah.

v. Aset pendasar dapat bernilai-rendah hanya jika:
   - Penyewa mendapat manfaat dari pengunaan aset pendasar secara terpisah atau bersamaan dengan sumber daya lain yang telah tersedia untuk penyewa; dan
   - Aset pendasar tidak memiliki ketergantungan yang tinggi, atau memiliki interelasi yang tinggi, dengan aset lain.

vi. Sewa aset pendasar tidak memenuhi kualifikasi sebagai sewa aset bernilai-rendah jika sifat aset adalah, ketika baru, aset tersebut biasanya tidak bernilai-rendah. Sebagai contoh, sewa mobil tidak akan memenuhi sebagai sewa aset bernilai-rendah karena mobil baru biasanya tidak akan bernilai-rendah. Contoh aset pendasar bernilai-rendah dapat mencakup komputer tablet dan komputer personal, furnitur kantor yang ringkas, dan telepon. Ketentuan mengenai aset

[76] PSAK 73 p.PP03-p.PP08

pendasar bernilai rendah diatur lebih lanjut oleh kebijakan Perusahaan.

vii. Jika penyewa mensubsewakan aset, atau memperkirakan akan mensubsewakan aset, maka sewa utama tidak memenuhi kualifikasi sebagai sewa aset bernilai-rendah.

c. Pengukuran saat pengakuan awal

i. Perusahaan sebagai penyewa (*lessee*) [77]

- Aset hak-guna
  - Pada tanggal permulaan, aset hak-guna diukur biaya perolehan.
  - Biaya perolehan aset hak-guna meliputi:
    - Jumlah pengukuran awal liabilitas sewa
    - Pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima
    - Biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa, dan
    - Estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh penyewa dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, kecuali biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan. Penyewa dikenai kewajiban atas biaya-biaya tersebut baik pada tanggal permulaan atau sebagai konsekuensi dari telah menggunakan aset pendasar selama periode tertentu.
- Liabilitas sewa
  - Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut.
  - Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa, jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka penyewa menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa.
  - Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini atas hak untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan:
    - Pembayaran tetap dikurangi dengan piutang insentif sewa
    - Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan
    - Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual
    - Harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut, dan
    - Pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.
- Sewa operasi

[77] PSAK 73 p.23-p.28

Beban sewa atas sewa operasi diukur pada nilai perolehan saat penyewa menyetujui kontrak sewa dengan pesewa (*lessor*).

ii. Perusahaan sebagai pesewa (*lessor*)

- Sewa pembiayaan[78]
  - Pesewa menggunakan suku bunga implisit dalam sewa untuk mengukur investasi neto sewa. Dalam hal subsewa, jika suku bunga implisit dalam subsewa tidak dapat ditentukan, maka pesewa-antara dapat menggunakan tingkat diskonto yang digunakan dalam sewa utama (disesuaikan dengan biaya langsung awal yang terkait dengan subsewa) untuk mengukur investasi neto dalam subsewa.
  - Pada tanggal permulaan, pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran investasi neto sewa meliputi pembayaran atas hak untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa yang belum diterima pada tanggal permulaan sebagai berikut:
    - Pembayaran tetap, dikurangi dengan insentif sewa terutang
    - Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan
    - Jaminan nilai residual yang diberikan kepada pesewa oleh penyewa, pihak yang terkait dengan penyewa, atau pihak ketiga yang tidak terkait dengan pesewa yang secara finansial mampu melaksanakan kewajibannya dalam jaminan tersebut
    - Harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup yakin untuk mengeksekusi opsi tersebut, dan
    - Pembayaran penalti karena menghentikan sewa, jika sewa tersebut merefleksikan bahwa penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.
- Sewa operasi[79]
  - Pengukuran saat pengakuan sewa operasi telah dijabarkan pada bagian pengakuan awal sewa operasi.

d. Pengukuran setelah pengakuan awal

i. Perusahaan sebagai penyewa (*lessee*)[80]

- Aset Hak-Guna
  - Setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur aset hak-guna dengan menerapkan model biaya, kecuali Perusahaan menerapkan model pengukuran lain. Dengan model biaya, penyewa mengukur aset hak-guna pada biaya perolehan:
    - Dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, dan
    - Disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa
  - Aset hak-guna yang diakui disusutkan oleh penyewa dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada penyewa pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan aset hak-guna dari tanggal

[78] PSAK 73 p.68-p.70
[79] PSAK 73 p.81-p.87
[80] PSAK 73 p.29-p.46

permulaan hingga akhir manfaat ekonomis aset pendasar.

- Jika tidak, maka penyewa menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir manfaat ekonomis aset hak-guna atau akhir masa sewa.

- Ketentuan penurunan nilai atas aset hak-guna mengacu pada ketentuan dalam PSAK 48: Penurunan Nilai Aset.
- Selain model biaya, aset hak-guna juga dapat diukur dengan model pengukuran lain yaitu:
  - Model nilai wajar

    Jika penyewa menerapkan model nilai wajar sesuai PSAK 13: Properti Investasi untuk aset properti investasinya, maka penyewa juga menerapkan model nilai wajar untuk aset hak-guna yang memenuhi definisi properti investasi dalam PSAK 13: Properti Investasi.
  - Model revaluasi

    Jika aset hak-guna terkait dengan kelas aset tetap di mana penyewa menerapkan model revaluasi sesuai PSAK 16: Aset Tetap, maka penyewa dapat memilih untuk menerapkan model revaluasi tersebut untuk seluruh aset hak-guna yang terkait dengan kelas aset tetap tersebut.

- Liabilitas Sewa
  - Setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa dengan:
    - Meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
    - Mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar; dan
    - Mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa, atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara- substansi revisian
  - Mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian dilakukan jika:
    - Terdapat perubahan masa sewa. Penyewa menentukan pembayaran sewa revisian berdasarkan masa sewa revisian; atau
    - Terdapat perubahan pada penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar, dalam konteks opsi beli. Penyewa menentukan pembayaran sewa revisian untuk merefleksikan perubahan dalam jumlah terutang dalam opsi beli.
  - Mendiskontokan pembayaran sewa revisian namun dengan tingkat diskonto yang tidak berubah, dilakukan jika:
    - Terdapat perubahan dalam jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual. Penyewa menentukan pembayaran sewa revisian untuk merefleksikan perubahan dalam jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual.
    - Terdapat perubahan pembayaran sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau suku bunga yang digunakan untuk menentukan pembayaran tersebut, termasuk sebagai contoh perubahan untuk merefleksikan perubahan dalam harga

rental pasar setelah peninjauan ulang rental pasar. Penyewa mengukur kembali liabilitas sewa untuk merefleksikan pembayaran sewa revisian tersebut hanya ketika terdapat perubahan dalam arus kas (yaitu ketika terdapat penyesuaian pembayaran sewa). Penyewa menentukan pembayaran sewa revisian untuk sisa masa sewa berdasarkan pembayaran kontraktual revisian.

- Penyewa dapat mengukur kembali liabilitas sewa juga dilakukan jika terdapat modifikasi sewa. Modifikasi sewa dapat dicatat sebagai sewa terpisah atau tidak. Penyewa mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:
  - Modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
  - Imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

- Sewa operasi
  - Pembayaran sewa dalam sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lusus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna.

ii. Perusahaan sebagai pesewa (*lessor*)

- Sewa pembiayaan[81]
  - Pesewa mengakui penghasilan keuangan sepanjang masa sewa, berdasarkan suatu pola yang merefleksikan tingkat imbalan periodik yang konstan atas investasi neto sewa pesewa.
  - Pesewa bermaksud untuk mengalokasikan penghasilan keuangan sepanjang masa sewa dengan dasar yang sistematik dan rasional. Pesewa menerapkan pembayaran sewa yang terkait dengan periode tersebut terhadap investasi bruto sewa untuk mengurangi pokok dan penghasilan keuangan yang belum diterima.
- Sewa operasi[82]
  - Pesewa mengakui penyusutan atas aset pendasar yang dapat disusutkan untuk sewa operasi konsisten dengan kebijakan penyusutan normal pesewa untuk aset serupa. Pesewa menghitung penyusutan sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 19: Aset Takberwujud.
  - Pesewa menerapkan PSAK 48: Penurunan Nilai Aset untuk menentukan apakah aset pendasar untuk sewa operasi mengalami penurunan nilai. Apabila terjadi penurunan nilai atas aset sewa, pesewa mencatat kerugian penurunan nilai yang telah di identifikasi.

e. Penghentian pengakuan

i. Perusahaan sebagai penyewa (*lessee*)

- Aset hak-guna dan liabilitas sewa

[81] PSAK 73 p.75-p.78
[82] PSAK 73 p.84-p.85

- Penyewa menghentikan pengakuan baik atas aset, liabilitas, serta beban penyusutan sewa pada saat masa kontrak sewa sudah selesai (tidak diperpanjang) dan aset sewa sudah dikembalikan kepada pesewa (*lessor*)
- Penyewa menghentikan pengakuan saat aset tersebut dibeli oleh Perusahaan sehingga aset sewa tersebut direklas ke aset tetap Perusahaan dan harus dihitung kembali nilai wajar dari aset sewa yang dibeli tersebut

- Sewa operasi
  Penyewa menghentikan pengakuan atas beban sewa saat kontrak sewa sudah berakhir dengan pihak pesewa.

ii. Perusahaan sebagai pesewa (*lessor)*

- Sewa pembiayaan
  Pesewa menghentikan pengakuan atas pendapatan sewa saat pesewa sudah menerima kembali aset yang disewakan dan mengakui kembali aset sewa tersebut sebagai aset Perusahaan.
- Sewa operasional
  Pesewa menghentikan pengakuan atas beban penyusutan saat masa kontrak aset sewa sudah selesai.

f. Penyajian

i. Perusahaan sebagai penyewa (*lessee*) [83]

- Aset hak-guna dan liabilitas sewa
  - Penyewa menyajikan dalam laporan posisi keuangannya, atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:
    - Aset hak-guna disajikan pada bagian aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai pada aset hak guna (jika ada) dalam Laporan Posisi Keuangan.
    - Jika aset hak-guna memenuhi definisi properti investasi, maka disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan sebagai properti investasi.
    - Liabilitas sewa disajikan secara terpisah dari liabilitas lain dalam Laporan Posisi Keuangan pada pos sewa pembiayaan yang dibagi berdasarkan jatuh tempo atas sewa pembiayaan baik liabilitas jangka pendek maupun liabilitas jangka panjang.
  - Dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, penyewa menyajikan beban bunga atas liabilitas sewa secara terpisah dari beban penyusutan untuk aset hak-guna. Beban bunga atas liabilitas sewa merupakan komponen biaya keuangan yang harus disajikan secara terpisah dalam Laporan Laba Rugi dan penghasilan komprehensif lain.
    - Dalam Laporan Arus Kas, Perusahaan sebagai penyewa menerapkan ketentuan berikut:
    - Pembayaran arus kas untuk bagian pokok liabilitas sewa diklasifikasikan kedalam aktivitas pendanaan

[83] PSAK 73 p.47-p.50

- Pembayaran arus kas untuk bagian bunga libilitas sewa dengan menerapkan persyaratan dalam PSAK 2 : Laporan Arus Kas
- Pembayaran sewa jangka-pendek, pembayaran sewa aset bernilai-rendah, dan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa dalam aktivitas operasi.

- Sewa operasi

  Penyewa menyajikan pembayaran atas sewa operasi sebagai beban dalam Laporan Laba Rugi.

ii. Perusahaan sebagai pesewa (*lessor*)

- Sewa pembiayaan[84]
  - Pesewa menyajikan piutang dalam Laporan Posisi Keuangan pada nilai aset sewa yang diserahkan kepada penyewa.
- Sewa operasi[85]
  - Pesewa menyajikan aset pendasar sewa operasi dalam Laporan Posisi Keuangan sesuai dengan nilai wajar dari aset sewa tersebut.
  - Pesewa mengakui penghasilan atas sewa operasi dalam Laporan Laba Rugi dengan dasar garis lurus atau dasar sistematik lain.
  - Beban penyusutan atas aset sewa tersebut disajikan dalam Laporan Laba Rugi.

[84] PSAK 73 p.67
[85] PSAK 73 p.88

BAB IX
EKUITAS

1. Dasar pengaturan ekuitas menggunakan SAK efektif per 1 Januari 2020:
   a. PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan
   b. PSAK 50 Instrumen Keuangan : Penyajian

   Selain menggunakan SAK, pengaturan ekuitas diatur didalam peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas yang berlaku di Republik Indonesia
2. Penjelasan[86]
   a. Ekuitas adalah hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Meskipun ekuitas didefinisikan sebagai residual, unsur ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan menjadi pos-pos ekuitas. Misalnya, setoran pemegang saham, saldo laba, penyisihan saldo laba, dan penyisihan pemeliharaan modal disajikan dalam pos-pos yang terpisah.
   b. Pembentukan cadangan, kadang-kadang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan perlindungan tambahan kepada Perusahaan terhadap kerugian yang terjadi. Pemindahan ke cadangan tersebut merupakan penyisihan saldo laba. Eksistensi cadangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan informasi yang relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan bagi para pemakai laporan keuangan.
   c. Jumlah ekuitas yang disajikan dalam laporan posisi keuangan tergantung pada pengukuran aset dan liabilitas. Ekuitas Perusahaan terdiri dari:
      i. Modal saham
      ii. Tambahan Modal Disetor
      iii. Saldo Laba
      iv. Ekuitas Lainnya:
         - Selisih restrukturisasi entitas sepengendali.
           Ketentuan mengenai selisih restrukturisasi entitas sepengendali telah diatur pada Bab II nomor 2.3.
         - Selisih kurs karena penjabaran Laporan Keuangan
           Ketentuan mengenai selisih kurs karena penjabaran Laporan Keuangan telah diatur pada Bab II nomor 2.7.
         - Surplus revaluasi aset tetap
           Ketentuan mengenai surplus revaluasi aset tetap telah diatur pada Bab X bagian pengukuran setelah pengakuan awal.
         - Keuntungan aktuaria atas program imbalan pasti
           Ketentuan mengenai keuntungan aktuaria atas program imbalan pasti telah diatur pada Bab XIII bagian pengakuan dan pengukuran.
   d. Modal Saham dan Tambahan Modal Disetor
      i. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham sesuai dengan Anggaran Dasar.
      ii. Modal ditempatkan adalah modal dasar yang telah ditempatkan secara notarial.

[86] PSAK 50 p.11

iii. Modal disetor adalah modal yang telah efektif diterima Perusahaan sebesar nilai nominal saham.
iv. Modal saham merupakan bagian dari modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemegang saham.
v. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari:
   - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   - Kapitalisasi cadangan;
   - Sumber lainnya.
vi. Modal saham akan berkurang karena kerugian yang disetujui sebagai pengurang modal disetor oleh RUPS apabila tidak dapat ditutupi oleh cadangan umum dan cadangan bertujuan.

e. Saldo Laba
   i. Saldo laba menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba-rugi periode lalu. Akun ini dinyatakan terpisah dari akun modal saham. Seluruh saldo laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen, kecuali jika diberikan indikasi mengenai pembatasan terhadap saldo laba, misalnya dicadangkan atau untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan maupun ikatan tertentu.
   ii. Perusahaan menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan
   iii. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS.
   iv. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
   v. Saldo laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai dividen karena pembatasan-pembatasan tersebut, disajikan sebagai saldo laba yang ditentukan penggunaannya (appropriated retained earnings)
   vi. Saldo laba didistribusikan sesuai dengan keputusan RUPS antara lain untuk:
      - Cadangan umum
      - Cadangan bertujuan
   vii. Kewajiban yang timbul dalam program bagi laba dan bonus merupakan akibat dari jasa pekerja dan bukan transaksi dengan pemilik Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan mengakui bagi laba dan bonus ini sebagai beban tahun berjalan dan bukan sebagai distribusi saldo laba.

f. Cadangan Umum
   i. Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba untuk tujuan tertentu setelah mendapatkan persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Cadangan umum digunakan untuk:
      - Menutup kerugian yang diderita
      - Perluasan usaha
      - Modal kerja
      - Tujuan lainnya yang sesuai dengan kepentingan Perusahaan
   ii. Penambahan cadangan umum berasal dari penyisihan saldo laba setelah pajak dari setiap periode berdasarkan persetujuan RUPS.
   iii. Pengurangan cadangan umum berasal dari penggunaan sesuai dengan tujuan tersebut diatas.

g. Cadangan Bertujuan

i. Cadangan bertujuan adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba untuk tujuan tertentu setelah mendapatkan persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Cadangan bertujuan digunakan untuk:
   - Membiayai belanja modal;
   - Menutup kerugian yang diderita apabila melebihi cadangan umum;
   - Tujuan lainnya yang sesuai dengan kepentingan Perusahaan.
   - Cadangan bertujuan ditetapkan sebagai sumber pembelanjaan untuk tujuan tertentu.

ii. Penambahan cadangan bertujuan berasal dari penyisihan saldo laba dari setiap periode berdasarkan persetujuan RUPS.

h. Ekuitas Lainnya

i. Komponen ekuitas lainnya terdiri dari selisih restrukturisasi entitas sepengendali dan akumulasi dari penghasilan komprehensif lain periode berjalan. Contoh penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi sebagai berikut:
   - Keuntungan revaluasi aset tetap
   - Pengukuran kembali atas program imbalan pasti
   - Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi

ii. Sedangkan untuk penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasi ke laba rugi terdiri atas:
   - Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan
   - Keuntungan atau kerugian nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual
   - Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian lindung nilai arus kas

3. Perlakuan akuntansi [87]

a. Pengakuan dan Pengukuran

i. Modal saham diakui pada saat penerimaan setoran modal dari pemilik baik berupa dana kas maupun aset nonkas yang sudah diaktakan secara notarial.

ii. Modal saham diakui sebesar nilai nominal atau nilai par

iii. Harga penerbitan saham diukur sebagai berikut:
   - Jika setoran modal berupa kas maka dinilai sebesar kas yang diterima.
   - Jika setoran modal berupa aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar aset nonkas yang diterima. jika nilai wajar aset nonkas tersebut tidak dapat diukur secara andal, maka sebesar nilai wajar saham yang diterbitkan.

iv. Apabila harga saham perdana atau harga penerbitan saham lebih tinggi daripada nilai nominal, maka perusahaan akan mencatat timbulnya agio saham.

v. Apabila harga saham perdana atau harga penerbitan saham lebih rendah daripada nilai nominal, maka perusahaan akan mencatat timbulnya disagio saham.

vi. Saham diperoleh kembali diakui sebesar biaya perolehan.

vii. Saham diperoleh kembali akan berkurang ketika saham tersebut dijual kembali ke pasar. Selisih antara harga jual dengan biaya perolehan diakui sebagai agio/disagio saham diperoleh kembali.

b. Penyajian

[87] PSAK 1 p.106-107

i. Perusahaan menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagaimana disyaratkan oleh PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan paragraf 10 mengenai Laporan Keuangan Lengkap. Laporan perubahan ekuitas mencakup informasi sebagai berikut:
   - Total penghasilan komprehensif selama periode berjalan, yang menunjukkan secara tersendiri jumlah: total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali;
   - Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penetapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubaban Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan;
   - Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara tersendiri mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari:
     - Laba rugi;
     - Penghasilan komprehensif lain; dan,
     - Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara tersendiri kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak: kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian.

ii. Perusahaan menyajikan, baik dalam laporan perubahan ekuitas atau dalam catatan atas laporan keuangan, jumlah dividen yang diakui sebagai; distribusi kepada pemilik selama periode, dan jumlah dividen per saham terkait.

BAB X
IMBALAN KERJA

1. Dasar pengaturan imbalan kerja menggunakan SAK efektir per 1 Januari 2020:
   a. PSAK 24 : Imbalan Kerja
2. Penjelasan[88]
   a. Imbalan pascakerja adalah imbalan kerja yang disediakan perusahaan (selain pesangon) dan akan diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan masa kerjanya. Pesangon bukan merupakan imbalan pascakerja karena karyawan berhenti sebelum masa kerja normalnya.
   b. Imbalan pascakerja meliputi:
      i. Tunjangan pensiun
      ii. Imbalan pascakerja lainnya, seperti tunjangan kesehatan pascakerja, tunjangan penghargaan
   c. Program imbalan pascakerja terdiri atas dua jenis, bergantung pada karakteristiknya yaitu sebagai berikut:
      i. Program Iuran Pasti, yaitu pemberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada Dana Pensiun. Pada program iuran pasti, pemberi kerja tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika Dana Pensiun tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja terkait dengan jasa yang diberikan oleh pekerja pada periode berjalan dan periode sebelumnya.
      ii. Program Imbalan Pasti, yaitu pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan yang disepakati akan diterima pekerja saat selesai masa kerja nanti. Oleh karena itu, pemberi kerja memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika Dana Pensiun tidak memiliki aset (dana) yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja sebesar nilai yang telah disepakati. Dengan kata lain, pemberi kerja harus menanggung risiko atas kekurangan dana tersebut.

   Dana atas program imbalan pascakerja dikelola secara terpisah dari kekayaan perusahaan.
3. Perlakuan Akuntansi[89]
   a. Pengakuan awal dan pengukuran saat pengakuan
      i. Program Iuran Pasti
         - Ketika pekerja telah memberikan jasa kepada perusahaan selama suatu periode, maka perusahaan harus mengakui iuran terutang untuk program iuran pasti atas jasa pekerja:
            - sebagai liabilitas, setelah dikurangi dengan iuran yang telah dibayar. Jika iuran tersebut melebihi iuran terutang untuk jasa sebelum akhir periode pelaporan, maka perusahaan mengakui kelebihan tersebut sebagai aset (beban dibayar di muka) sepanjang kelebihan tersebut akan mengurangi pembayaran iuran di masa depan atau dikembalikan; dan
            - sebagai beban, kecuali jika PSAK lain mensyaratkan atau mengizinkan iuran tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset (misalnya sebagai komponen Persediaan sesuai

[88] PSAK 24 p.08
[89] PSAK 24 p.50-p.54, p.55-p.60

PSAK 14 atau Aset Tetap sesuai PSAK 16).

- Dalam program iuran pasti, jika iuran tidak jatuh tempo seluruhnya dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode saat pekerja memberikan jasanya, maka iuran tersebut didiskonto dengan menggunakan tingkat diskonto.

ii. Program imbalan pasti

- Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pasti merupakan jumlah neto dari:
  - Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan
  - Dikurang nilai wajar aset program pada tanggal laporan posisi keuangan (jika ada) yang akan digunakan untuk penyelesaian kewajiban secara langsung
- Perusahaan mengakui jumlah neto berikut sebagai beban atau penghasilan, kecuali jika ada PSAK lain yang mensyaratkan atau mengizinkan imbalan tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset:
  - Biaya jasa kini
  - Biaya jasa lalu
  - keuntungan atau kerugian atas penyelesaian
  - Biaya bunga
  - Hasil yang diharapkan dari aset program;
- Perusahaan mengakui jumlah neto berikut sebagai penghasilan komprehensif lain:
  - Keuntungan atau kerugian aktuarial akibat pengukuran kembali;
  - Hasil aktual dari aset program dikurangi hasil yang diharapkan dari aset program; dan
  - Perubahan dampak batasan di PSAK 24
- Liabilitas imbalan pascakerja berkurang pada saat dibayarkan.
- Kewajiban Pascakerja Lainnya

  Mencakup imbalan kesehatan pascakerja untuk pensiunannya. Imbalan ini diberikan kepada pekerja yang tetap bekerja sampai usia pensiun dan memenuhi masa kerja minimum. Biaya yang diharapkan timbul atas imbalan ini diakru selama masa kerja dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Kewajiban ini dinilai setiap tahun oleh aktuaris independen yang memenuhi syarat.
- Pesangon

  Perusahaan mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal diantaranya:
  - Ketika Perusahaan tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
  - Ketika Perusahaan mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

  Perusahaan mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

b. Penyajian

i. Liabilitas imbalan pascakerja disajikan dalam liabilitas.

ii. Perusahaan menyajikan pos-pos berikut di penghasilan komprehensif lain:

- Keuntungan atau kerugian aktuarial akibat pengukuran kembali
- Hasil aktual dari aset program dikurangi hasil yang diharapkan dari aset program

BAB XI
PENDAPATAN

1. Dasar pengaturan pendapatan menggunakan SAK efektif per 1 Januari 2020:
   a. PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan
   b. PSAK 72 : Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
2. Penjelasan[90]
   a. Penghasilan merupakan peningkatan pengakuan dan pengukuran manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan pada ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
   b. Pendapatan lain-lain mencakup imbalan yang diperoleh dari penggunaan aset, seperti pendapatan bunga, sewa dan royalti, diakui sejalan dengan berlalunya waktu, atau pada saat digunakannya aset yang bersangkutan. Dengan demikian, penerimaan kas yang terjadi sebelum realisasi pendapatan, dicatat sebagai Pendapatan Yang Ditangguhkan (*Deferred Income*). Pendapatan lain-lain juga meliputi pendapatan laba/rugi selisih kurs dan pendapatan laba/rugi dari penjualan aset tetap.
   c. Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Dikatakan tidak terdapat suatu kontrak, jika setiap pihak dalam kontrak memiliki hak yang dapat dipaksakan secara sepihak untuk mengakhiri kontrak takterlaksana penuh (*wholly unperformed contract*) tanpa adanya kompensasi kepada pihak lain.
   d. Pelanggan adalah pihak yang berkontrak dengan Perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa yang merupakan output dari aktivitas normal Perusahaan dalam pertukaran dengan imbalan. Secara sederhana, pelanggan adalah pihak yang membeli barang atau jasa Perusahaan. Pihak lawan kontrak tidak memenuhi definisi pelanggan jika, sebagai contoh, pihak lawan kontrak memiliki kontrak dengan Perusahaan untuk berpartisipasi dalam aktivitas atau proses di mana para pihak dalam kontrak berbagi risiko dan manfaat yang dihasilkan dari aktivitas atau proses (seperti mengembangkan aset dalam suatu pengaturan kolaborasi) daripada untuk memperoleh output dari aktivitas normal Perusahaan.
   e. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
   f. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan - atau unit akun untuk akuntansi kontrak. Kewajiban pelaksanaan dapat diidentifikasi secara eksplisit dalam kontrak atau tersirat berdasarkan praktik bisnis sebelumnya, kebijakan yang diterbitkan atau pernyataan spesifik.

3. Pengakuan Pendapatan[91]

[90] PSAK 72 Lampiran A
[91] PSAK 72 p.09-p.16, p.22-p.30, p.47-p.72, p.73-p.86, p.31-p.38

a. Terdapat 5 langkah dalam mengidentifikasi pengakuan pendapatan:
   i. Mengidentifikasi kontrak

      Suatu kontrak dapat berbentuk tertulis, lisan, atau dapat disiratkan dari praktik-praktik usaha yang lazim dilakukan oleh suatu Perusahaan. Secara umum, perjanjian apa pun yang menciptakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat diberlakukan secara hukum memenuhi definisi suatu kontrak. Kriteria yang harus dipenuhi ketika Perusahaan mempertimbangkan suatu kontrak dengan pelanggan adalah sebagai berikut:

      - Para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak (secara tertulis, lisan atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya) dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing
      - Perusahaan dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan
      - Perusahaan dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan
      - Kontrak memiliki substansi komersial (yaitu risiko, waktu atau jumlah arus kas masa depan Perusahaan diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak), dan
      - Kemungkinan besar (*probable*) Perusahaan akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan.

      <u>Modifikasi Kontrak</u>

      Suatu modifikasi kontrak dapat mengubah lingkup kontrak, harga kontrak, atau kedua-duanya. Suatu modifikasi kontrak terjadi apabila para pihak kontrak menyetujui modifikasi tersebut secara tertulis, secara lisan, atau berdasarkan praktik usaha yang lazim dari para pihak. Modifikasi kontrak diperhitungkan sebagai kontrak terpisah atau sebagai bagian dari kontrak yang ada, bergantung pada sifat modifikasi tersebut, sebagaimana dirangkum dalam bagan berikut ini.

Gambar 2 - Modifikasi Kontrak

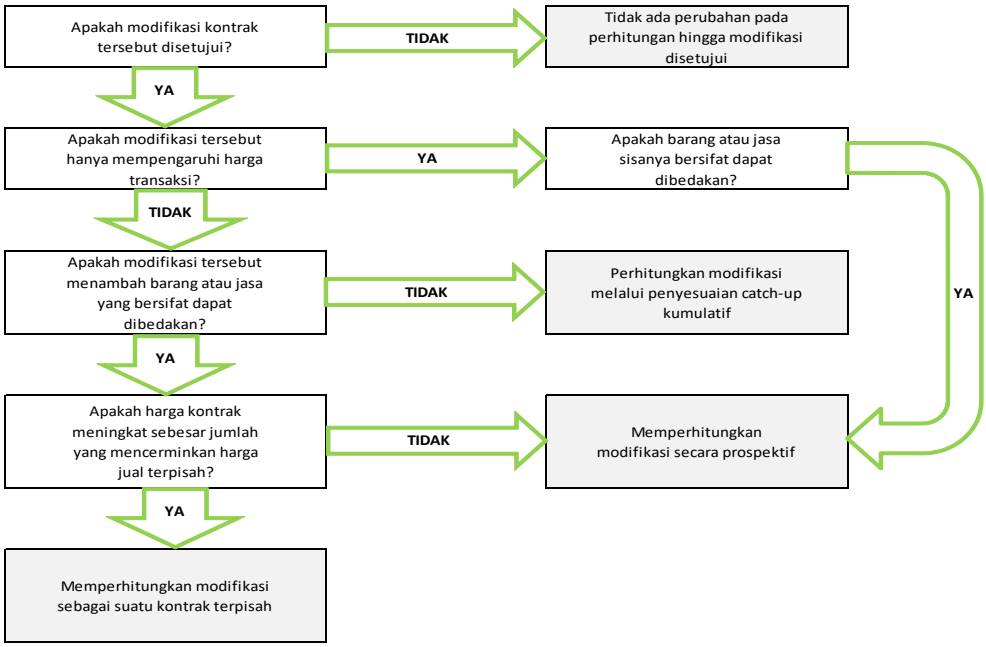

Pertimbangan seringkali diperlukan untuk menentukan apakah perubahan terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ada harus diperhitungkan sebagai bagian dari pengaturan awal (dengan kata lain, seharusnya dapat diantisipasi berdasarkan praktik-praktik usaha Perusahaan) atau diperhitungkan sebagai modifikasi kontrak.

<u>Kombinasi Kontrak</u>

Perusahaan mengombinasikan dua atau lebih kontrak yang disepakati pada waktu yang sama atau berdekatan dengan pelanggan yang sama (atau pihak berelasi dari pelanggan) dan mencatat kontrak tersebut sebagai kontrak tunggal jika satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi:

- kontrak dinegosiasikan sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal
- jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain, atau
- barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak (atau beberapa barang atau jasa yang dijanjikan dalam setiap kontrak) merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal.

ii. Mengidentifikasi kewajiban-kewajiban pelaksanaan

Pada insepsi kontrak, Perusahaan menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan, baik:

- suatu barang atau jasa (atau sepaket barang atau jasa) yang bersifat dapat dibedakan, atau
- serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan.

iii. Menetapkan harga transaksi

Perusahaan mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum Perusahaan untuk menentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak Perusahaan dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga (sebagai contoh, beberapa pajak penjualan). Imbalan yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dapat mencakup jumlah tetap, jumlah variabel, atau keduanya.

Penetapan harga transaksi dapat dilakukan langsung, seperti misalnya apabila suatu kontrak dibuat untuk suatu jumlah imbalan yang tetap sebagai ganti barang atau jasa dalam jumlah yang tetap dalam kerangka waktu yang relatif pendek.

- Imbalan Variabel

  Jika imbalan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, maka Perusahaan mengestimasi jumlah imbalan yang akan menjadi hak Perusahaan dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Imbalan variabel memiliki berbagai bentuk, termasuk (namun tidak terbatas pada) konsesi harga, diskonto volume, rabat, pengembalian dana, kredit, insentif, bonus kinerja, dan royalti. Praktik-praktik usaha di masa lalu dari Perusahaan dapat menyebabkan imbalan menjadi variabel apabila terdapat riwayat pemberian diskonto atau konsesi setelah barang terjual.

  - Konsesi Harga

    Konsesi harga adalah penyesuaian-penyesuaian terhadap jumlah yang dibebankan pada pelanggan yang biasanya dilakukan diluar ketentuan-ketentuan awal kontrak. Konsesi harga diberikan atas dasar berbagai alasan. Sebagai contoh, suatu vendor dapat menerima pembayaran yang lebih kecil dari jumlah yang seharusnya dibayarkan oleh pelanggan secara kontraktual untuk mendorong pelanggan agar membayar pembelian-pembelian sebelumnya dan kembali melakukan pembelian di kemudian hari. Konsesi harga juga kadangkala diberikan ketika pelanggan merasa tidak puas dengan barang atau jasa yang diberikan (selain hal-hal yang termasuk dalam garansi).

  - Potongan harga untuk pembayaran dini

    Pengaturan pembelian dengan pelanggan dapat mencakup potongan harga untuk pembayaran yang dilakukan lebih awal. Sebagai contoh, Perusahaan dapat menawarkan diskon 2 persen apabila suatu faktur dibayarkan dalam waktu 10 hari sejak penerimaan. Sebagian imbalan bersifat variabel dalam keadaan ini, karena terdapat ketidakpastian mengenai apakah pelanggan akan membayar faktur tersebut dalam jangka waktu potongan harga. Perusahaan perlu membuat estimasi imbalan yang ingin diterimanya sebagai hak dengan adanya penawaran insentif ini. Pengalaman dengan para pelanggan serupa dan transaksi-transaksi yang serupa harus dipertimbangkan dalam menetapkan jumlah pelanggan yang diharapkan menerima potongan harga tersebut.

- Diskon volume
  Kontrak dengan pelanggan dapat mencakup diskon volume yang ditawarkan sebagai insentif untuk mendorong pembelian tambahan dan kesetiaan pelanggan. Diskon volume mengharuskan pelanggan untuk membeli sejumlah barang atau jasa tertentu, dimana setelah itu harganya dikurangi secara prospektif untuk pembelian barang atau jasa tambahan berikutnya, atau potongan harga diberlakukan secara retrospektif untuk semua pembelian. Diskon volume secara prospektif harus dipertimbangkan untuk menentukan apakah akan memberikan hak material kepada pelanggan. Pengaturan dengan diskon volume yang berlaku restrospektif termasuk imbalan variabel karena harga transaksi untuk pembelian-pembelian saat ini tidak diketahui hingga terdapat kepastian mengenai apakah pembelian pelanggan akan melampaui jumlah yang disyaratkan untuk memperoleh diskon. Diskon volume yang bersifat prospektif atau restrospektif biasanya akan menimbulkan penghasilan tertunda apabila pelanggan diharapkan memperoleh diskon.

- Rabat
  Rabat adalah insentif penjualan. Para pelanggan membayar harga penuh untuk barang atau jasa pada awal kontrak, kemudian menerima rabat tunai di kemudian hari. Rabat tunai dapat dikaitkan dengan tingkat agregat penjualan. Perusahaan perlu mempertimbangkan volume penjualan yang diharapkan dan rabat yang diharapkan untuk menentukan pendapatan yang harus diakui atas setiap penjualan. Imbalan bersifat variabel dalam keadaan-keadaan ini karena dihitung berdasarkan volume transaksi yang memenuhi syarat. Rabat juga dapat diberikan berdasarkan hanya satu transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Ketidakpastian seputar jumlah pelanggan yang tidak akan memanfaatkan penawaran (seringkali disebut sebagai "*breakage*") menyebabkan imbalan untuk penjualan bersifat variabel.

- Penetapan harga berdasarkan indeks
  Harga transaksi mencakup imbalan variabel di awal kontrak apabila jumlah imbalan dihitung berdasarkan suatu indeks pada suatu tanggal tertentu. Imbalan kontrak dapat dikaitkan pada indeks-indeks seperti indeks harga konsumen atau indeks-indeks keuangan. Perusahaan perlu mempertimbangkan jangkauan dimana pembalikan yang signifikan dari pendapatan kumulatif yang diakui dapat terjadi apabila ketentuan-ketentuan tersebut dimasukkan dalam pengaturan dengan pelanggan. Penilaian ini membutuhkan pertimbangan, dan Perusahaan perlu mempertimbangkan apakah jumlah minimum perlu dimasukkan ke dalam harga transaksi. Perusahaan juga harus mempertimbangkan apakah pengaturan tersebut memuat suatu derivatif yang harus dipisahkan berdasarkan pedoman instrumen keuangan apabila harga transaksi tersebut dikaitkan dengan perubahan-perubahan dalam suatu indeks. Sebagai contoh, suatu kontrak dengan harga transaksi yang bervariasi berdasarkan harga saham dari suatu

perusahaan terbuka dapat mengandung derivatif yang harus diperhitungkan secara terpisah. Tingkat variasi harga transaksi tidak akan mempengaruhi pendapatan apabila diperhitungkan berdasarkan pedoman instrumen keuangan yang relevan. Perusahaan juga harus mempertimbangkan pedoman instrumen keuangan apabila harga transaksi dikaitkan dengan perubahan-perubahan pada suatu indeks setelah Perusahaan telah memenuhi kewajiban pelaksanaannya.

- Penetapan harga berdasarkan rumus
  Suatu kontrak dapat mencakup imbalan variabel apabila penetapan harganya dihitung berdasarkan suatu rumus atau tarif kontraktual per unit *output* dan terdapat jumlah *output* yang tidak dapat ditentukan. Harga transaksi bersifat variabel karena dihitung berdasarkan *output* yang jumlahnya tidak diketahui.

- Periode setelah pengakhiran kontrak, namun sebelum pembaruan kontrak
  Situasi-situasi tertentu dapat muncul dimana suatu Perusahaan tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan ketentuan-ketentuan dari suatu kontrak dengan pelanggan yang telah berakhir sementara Perusahaan menegosiasikan perpanjangan atau pembaruan kontrak tersebut. Perpanjangan atau pembaruan kontrak dapat mencakup perubahan-perubahan atas penetapan harga atau ketentuan-ketentuan lainnya, yang seringkali berlaku retrospektif hingga periode setelah kontrak asli berakhir namun sebelum memfinalkan negosiasi atas kontrak baru. Pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah kewajiban-kewajiban para pihak dapat diberlakukan sebelum penandatanganan perpanjangan atau pembaruan dan, jika demikian, jumlah pendapatan yang harus dicatat selama periode ini. Perusahaan akan memperkirakan harga transaksi apabila pihaknya menyimpulkan bahwa terdapat kewajiban-kewajiban yang dapat diberlakukan sebelum memfinalkan kontrak baru. Perusahaan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan potensial dari pembaruan kontrak tersebut, termasuk apakah penyesuaian apa pun terhadap ketentuan-ketentuan akan diterapkan secara retrospektif atau hanya prospektif. Penyesuaian yang diperkirakan sebagai akibat negosiasi ulang ketentuan-ketentuan kontrak harus dinilai berdasarkan pedoman imbalan variabel, termasuk batasan atas imbalan variabel. Situasi ini berbeda dengan modifikasi kontrak dimana harga transaksi tidak diharapkan bersifat variabel pada awal pengaturan, namun berubah karena suatu peristiwa yang terjadi di kemudian hari.

- Perlindungan harga dan pencocokan harga
  Klausul-klausul perlindungan harga memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan pengembalian dana apabila penjual menurunkan harga produk untuk para pelanggan lain selama suatu jangka waktu tertentu. Klausul-klausul perlindungan harga memastikan agar pelanggan tidak dibebani dengan harga yang lebih tinggi oleh penjual dibandingkan dengan pelanggan lain selama jangka waktu ini. Ketentuan-ketentuan pencocokan harga mengharuskan Perusahaan untuk mengembalikan sebagian dari harga transaksi apabila

kompetitor menurunkan harganya untuk produk serupa. Kedua ketentuan ini membawa imbalan variabel ke dalam suatu pengaturan karena terdapat kemungkinan penyesuaian-penyesuaian berikutnya terhadap harga transaksi yang dicantumkan.

- Jaminan (termasuk kesepakatan tingkat layanan)
  Kontrak dengan pelanggan kadangkala mencakup jaminan yang diberikan oleh penjual. Garansi harus diperhitungkan dengan mengikuti PSAK yang relevan, misalnya PSAK 71: Instrumen Keuangan. Jaminan yang tidak termasuk dalam lingkup PSAK lain harus dinilai untuk menentukan apakah menghasilkan harga transaksi yang bersifat variabel. Sebagai contoh, Perusahaan dapat memberikan jaminan kepada pelanggan yang merupakan *reseller*, margin laba minimum atas penjualan kepada para pelanggannya. Imbalan akan dibayarkan kepada pelanggan apabila margin yang ditentukan tidak tercapai. Jenis jaminan ini tidak memenuhi definisi kontrak garansi keuangan dalam lingkup PSAK 71. Karena jaminan tersebut tidak termasuk dalam lingkup PSAK lain, maka perlu dipertimbangkan dalam situasi ini, mengingat adanya ketidakpastian harga transaksi yang ditimbulkan dari garansi tersebut.

Perusahaan mengestimasi jumlah imbalan variabel dengan menggunakan salah satu metode berikut, bergantung pada metode mana yang diperkirakan Perusahaan lebih baik dalam memprediksi jumlah imbalan yang akan menjadi haknya:

- Nilai ekspektasian - nilai ekspektasian adalah jumlah probabilitas tertimbang dalam kisaran jumlah imbalan yang mungkin terjadi. Nilai ekspektasian dapat menjadi estimasi yang sesuai dari jumlah imbalan variabel jika Perusahaan memiliki sejumlah besar kontrak dengan karakteristik yang serupa.
- Jumlah yang paling mungkin - jumlah yang paling mungkin adalah jumlah tunggal yang paling mungkin dalam kisaran jumlah imbalan yang mungkin terjadi (yaitu hasil tunggal yang paling mungkin dari kontrak). Jumlah yang paling mungkin dapat menjadi estimasi yang sesuai dari jumlah imbalan variabel jika kontrak memiliki dua kemungkinan hasil (sebagai contoh, Perusahaan mencapai bonus pelaksanaan atau tidak).

- <u>Komponen pembiayaan yang signifikan</u>
  Dalam menentukan harga transaksi, Perusahaan menyesuaikan jumlah imbalan yang dijanjikan terhadap dampak nilai waktu uang jika waktu pembayaran yang disepakati oleh para pihak dalam kontrak (baik secara eksplisit atau implisit) memberikan pelanggan atau Perusahaan manfaat signifikan berupa pendanaan atas pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan. Dalam keadaan tersebut, kontrak mengandung komponen pendanaan signifikan. Komponen pendanaan signifikan dapat muncul tanpa memperhatikan apakah janji dari pendanaan dinyatakan secara eksplisit dalam kontrak atau tersirat dalam syarat pembayaran yang disetujui oleh pihak dalam kontrak.

Tujuan ketika menyesuaikan komponen pendanaan signifikan dalam jumlah imbalan yang dijanjikan adalah agar Perusahaan mengakui pendapatan pada jumlah yang mencerminkan harga yang akan dibayar oleh pelanggan atas barang atau jasa yang dijanjikan jika pelanggan telah membayar secara kas barang atau jasa tersebut ketika (atau selama) Perusahaan mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan (yaitu harga jual kas). Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan relevan dalam menilai apakah kontrak terdiri dari komponen pendanaan dan apakah komponen pendanaan adalah signifikan terhadap kontrak, termasuk kedua hal berikut:

- Perbedaan, jika ada, antara jumlah imbalan yang dijanjikan dan harga jual kas atas barang atau jasa yang dijanjikan; dan
- Dampak kombinasi dari kedua hal berikut:
  - Lamanya waktu yang diperkirakan ketika Perusahaan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan ketika pelanggan membayar barang atau jasa tersebut; dan
  - Suku bunga yang berlaku dalam pasar yang relevan.

- <u>Imbalan Non Tunai</u>

  Setiap imbalan non-tunai yang diterima dari pelanggan harus diperhitungkan ketika menentukan harga transaksi. Imbalan dalam bentuk non-tunai akan didasarkan pada nilai wajar. Hal tersebut konsisten dengan pengukuran imbalan lain yang lebih mempertimbangkan nilai dari suatu hal yang diterima oleh Perusahaan penjualan, dan bukan atas nilai yang hilang setelah menyerahkan hal tersebut.

  Perusahaan mungkin tidak dapat menentukan nilai wajar imbalan non-tunai secara andal dalam beberapa situasi. Nilai dari imbalan non-tunai yang diterima harus diukur secara tidak langsung dalam situasi tersebut dengan mengacu pada harga jual berdiri sendiri (*standalone*) atas barang atau jasa yang disediakan oleh Perusahaan.

- <u>Imbalan yang harus dibayarkan kepada pelanggan</u>

  Perusahaan dapat membayar, atau memperkirakan akan membayar, suatu imbalan kepada pelanggannya. Pembayaran imbalan tersebut dapat berupa uang tunai, baik dalam bentuk rabat atau pembayaran dimuka, atau dapat berupa kredit atau bentuk insentif lain yang mengurangi jumlah terhutang pelanggan kepada Perusahaan.

  Utang imbalan kepada pelanggan mencakup jumlah kas yang dibayar Perusahaan, atau diperkirakan untuk dibayar, kepada pelanggan (atau kepada pihak lain yang membeli barang atau jasa Perusahaan dari pelanggan). Utang imbalan kepada pelanggan juga mencakup kredit atau item lainnya (sebagai contoh, kupon atau voucher) yang dapat diterapkan terhadap jumlah terutang kepada Perusahaan (atau terhadap pihak lain yang membeli barang atau jasa Perusahaan dari pelanggan). Perusahaan mencatat utang imbalan kepada pelanggan sebagai pengurang harga transaksi dan, oleh karena itu, atas pendapatan, kecuali

pembayaran kepada pelanggan adalah pertukaran untuk barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan, yang dialihkan oleh pelanggan kepada Perusahaan.

iv. Mengalokasikan harga transaksi pada kewajiban pelaksanaan yang terpisah

Tujuan ketika mengalokasikan harga transaksi adalah Perusahaan mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan (atau barang atau jasa bersifat dapat dibedakan) dalam jumlah yang menggambarkan jumlah imbalan yang, diperkirakan menjadi hak Perusahaan dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.

Harga transaksi harus dialokasikan atas setiap kewajiban pelaksanaan berdasarkan harga jual berdiri sendiri (*standalone*) relatif atas barang atau jasa yang disediakan untuk pelanggan. Untuk mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan dengan dasar harga jual berdiri sendiri relatif, Perusahaan menentukan harga jual berdiri sendiri pada insepsi kontrak atas barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang mendasari setiap kewajiban pelaksanaan dalam kontrak dan mengalokasikan harga transaksi secara proporsional terhadap harga jual berdiri sendiri tersebut.

Harga jual yang berdiri sendiri dapat diperkirakan dengan beberapa cara.

- Pendekatan yang disesuaikan atas penilaian pasar
- Biaya yang diharapkan ditambah pendekatan margin
- Pendekatan residual, dalam keadaan terbatas

<u>Mengalokasikan potongan harga (diskon)</u>

Pelanggan menerima diskon untuk pembelian sepaket barang atau jasa jika jumlah harga jual berdiri sendiri dari barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak melebihi imbalan yang dijanjikan dalam kontrak. Kecuali ketika Perusahaan memiliki bukti yang dapat diobservasi bahwa seluruh diskon hanya berkaitan dengan satu atau lebih, tetapi bukan seluruh, kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, Perusahaan mengalokasikan diskon secara proporsional terhadap seluruh kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Alokasi proporsional dari diskon dalam keadaan tersebut adalah konsekuensi dari Perusahaan yang mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan berdasarkan harga jual berdiri sendiri relatif dari barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang mendasarinya.

Perusahaan mengalokasikan keseluruhan diskon terhadap satu atau lebih, tetapi bukan seluruh, kewajiban pelaksanaan dalam kontrak jika seluruh kriteria berikut terpenuhi:

- Perusahaan secara reguler menjual setiap barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan (atau setiap paket barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan) dalam kontrak dengan basis berdiri sendiri.

- Perusahaan juga secara reguler menjual dengan basis berdiri sendiri, sepaket (atau beberapa paket) dari beberapa barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dengan diskon terhadap harga jual berdiri sendiri barang atau jasa dalam setiap paket.
- diskon yang dapat diatribusikan kepada setiap paket barang atau jasa yang dideskripsikan dalam bagian kedua secara substansial sama dengan diskon dalam kontrak dan analisis atas barang atau jasa dalam setiap paket memberikan bukti yang dapat diobservasi atas kewajiban pelaksanaan (atau beberapa kewajiban pelaksanaan) dimana seluruh diskon dalam kontrak tercakup.

v. Mengakui Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat atau setelah dipenuhinya kewajiban pelaksanaan dengan cara mengalihkan kendali atas barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Kendali akan beralih baik dari waktu ke waktu maupun pada suatu saat, yang akan berlaku ketika pendapatan telah tercatat. Pertimbangan mungkin diperlukan dalam beberapa keadaan untuk menentukan waktu pengalihan kendali. Berbagai metode dapat digunakan untuk mengukur perkembangan dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan ketika pendapatan diakui dari waktu ke waktu.

Tabel 7 - Kriteria *Life Time* dan *Point of Time*

No	Kriteria	*Life Time*	*Point of Time*
1	Pelanggan menerima dan mengkonsumsi manfaat dari waktu ke waktu	Ya	Tidak
2	Kinerja perusahaan dapat membuat atau meningkatkan aset yang dikontrol oleh pelanggan	Ya	Tidak
3	Kinerja perusahaan tidak membuat aset dengan penggunaan alternatif bagi perusahaan dan perusahaan memiliki hak atas pembayaran sebesar nilai yang setidaknya sama dengan kinerja yang diselesaikan hingga saat ini (termasuk laba - bukan hanya biaya)	Ya	Tidak
4	Pendapatan diakui pada satu titik waktu tertentu	Tidak	Ya
5	Semua *control*/kendali telah diperoleh pelanggan. Terdapat indikator terjadi perpindahan *control*/ kendali ke pelanggan: ● Perusahaan memiliki hak atas pembayaran saat ini ● Owner memiliki hak secara legal ● Owner menguasai secara fisik ● Owner memiliki risiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan	Tidak	Ya

<u>Kewajiban pelaksanaan yang terpenuhi dari waktu ke waktu (*Life Time*)</u>

Perusahaan mengalihkan pengendalian barang atau jasa sepanjang waktu dan, oleh karena itu, memenuhi kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu, jika satu dari kriteria berikut terpenuhi:

- Pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan dari pelaksanaan Perusahaan selama Perusahaan melaksanakan kewajiban pelaksanaannya

Kriteria ini terutama berlaku untuk kontrak untuk penyediaan layanan, seperti pemrosesan transaksi atau jasa keamanan. Perusahaan mengalihkan manfaat dari layanan kepada pelanggan ketika melakukan kegiatan tersebut dan karena itu memenuhi kewajiban pelaksanaannya dari waktu ke waktu. Kriteria ini juga bisa berlaku untuk pengaturan yang biasanya tidak dilihat sebagai jasa, seperti kontrak untuk menyediakan layanan jaringan.

Misalnya, Perusahaan yang menyediakan pasokan layanan jaringan terus-menerus berdasarkan permintaan dapat menyimpulkan bahwa layanan jaringan secara bersamaan diterima dan dikonsumsi oleh pelanggan. Penilaian ini membutuhkan pertimbangan. Batasan kontraktual atau praktis yang mencegah Perusahaan mengalihkan kewajiban yang tersisa ke perusahaan lain tidak akan dipertimbangkan dalam penilaian ini. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah pengalihan kendali dari waktu ke waktu menggunakan penilaian hipotetis bahwa perusahaan lain harus mengerjakan ulang pekerjaan yang telah diselesaikan hingga saat ini. Oleh karena itu, keterbatasan yang akan mencegah Perusahaan mengalihkan kontrak ke perusahaan lain akan diabaikan. Pelanggan menerima dan mengonsumsi manfaat seiring dengan dilakukannya kegiatan pelaksanaan tersebut oleh Perusahaan jika perusahaan lain tidak perlu secara substansial mengerjakan ulang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Perusahaan hingga saat ini dalam memenuhi kewajiban yang tersisa. Fakta bahwa perusahaan lain tidak perlu mengerjakan ulang pekerjaan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pelanggan telah menerima dan mengonsumsi manfaat selama pengaturan.

- Pelaksanaan Perusahaan menimbulkan atau meningkatkan aset (sebagai contoh, pekerjaan dalam proses) yang dikendalikan pelanggan selama aset tersebut ditimbulkan atau ditingkatkan

  Kriteria ini berlaku dalam situasi dimana pelanggan mengendalikan pekerjaan yang sedang diproses saat Perusahaan memproduksi barang atau menyediakan layanan. Aset yang dihasilkan dapat bersifat berwujud atau tidak berwujud. Pengaturan semacam itu dapat mencakup kontrak konstruksi dimana pelanggan mengontrol pekerjaan yang sedang diproses, atau kontrak penelitian dan pengembangan dimana pelanggan memiliki temuan.

  Perusahaan harus menerapkan prinsip pengendalian untuk menentukan apakah pelanggan mendapatkan kendali atas aset yang telah dibuat oleh Perusahaan. Menentukan apakah pelanggan mengontrol pekerjaan yang sedang diproses dapat memerlukan pertimbangan dalam beberapa pengaturan.

- Pelaksanaan Perusahaan tidak menimbulkan suatu aset dengan penggunaan alternatif bagi Perusahaan dan Perusahaan memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai saat ini.

Kriteria terakhir ini dikembangkan untuk membantu Perusahaan dalam penilaian kendali mereka ketika menghadapi kesulitan dalam menerapkan dua kriteria pertama untuk mengakui pendapatan dari waktu ke waktu. Perusahaan yang menghasilkan aset yang tidak memiliki penggunaan alternatif dengan hak untuk pembayaran atas kinerja hingga saat ini, mengakui pendapatan ketika aset diproduksi, bukan pada titik waktu tertentu (misalnya, saat pengiriman). Kriteria ini mungkin juga dapat digunakan dalam mengevaluasi layanan yang khusus untuk pelanggan.

Contohnya adalah kontrak untuk memberikan layanan konsultasi dimana pelanggan menerima laporan tertulis ketika pekerjaan selesai dan berkewajiban untuk membayar pekerjaan yang telah terselesaikan hingga saat ini jika kontrak dibatalkan. Pendapatan diakui dari waktu ke waktu dalam situasi ini karena tidak menghasilkan aset yang memiliki penggunaan alternatif, dengan asumsi hak atas pembayaran mengompensasi Perusahaan untuk kinerjanya hingga saat ini.

Hak atas pembayaran untuk pemenuhan pelaksanaan pada tanggal yang telah ditentukan

Jumlah pembayaran setidaknya harus mengompensasi Perusahaan atas pemenuhan pelaksanaan hingga saat ini, pada waktu kapan pun selama masa berlakunya kontrak. Jumlah tersebut harus mencerminkan harga jual barang atau jasa yang tersedia hingga saat ini, dan bukan mengompensasi Perusahaan hanya untuk biaya yang timbul hingga saat ini atau untuk potensi kehilangan keuntungan yang akan dialami oleh Perusahaan jika kontrak dihentikan. Jumlah tersebut adalah jumlah yang mencakup biaya Perusahaan ditambah margin keuntungan yang wajar atas pekerjaan yang diselesaikan. Suatu Perusahaan yang hanya berhak atas biaya yang telah dikeluarkan tidak memiliki hak atas pembayaran untuk pekerjaan saat ini. Kompensasi untuk margin laba yang wajar tidak harus sama dengan margin laba yang diharapkan jika kontrak dipenuhi sebagaimana yang dijanjikan, tetapi kompensasi yang menjadi hak Perusahaan merupakan salah satu dari jumlah berikut:

- Proporsi dari margin laba ekspektasian dalam kontrak yang secara wajar mencerminkan cakupan pelaksanaan Perusahaan dalam kontrak sebelum penghentian oleh pelanggan (pihak lain)
- Tingkat imbal hasil yang wajar atas biaya modal Perusahaan untuk kontrak serupa (atau margin operasi Perusahaan pada umurnnya untuk kontrak serupa) jika margin yang spesifik dalam kontrak lebih tinggi daripada tingkat imbal hasil yang biasanya diperoleh Perusahaan dari kontrak serupa.

Ukuran perkembangan dari waktu ke waktu

Tujuan mengukur perkembangan menuju pemenuhan kewajiban pelaksanaan adalah untuk mengakui pendapatan dalam pola yang mencerminkan adanya pengalihan kendali atas barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Perusahaan dapat menggunakan berbagai metode

untuk mengukur perkembangan, tetapi harus memilih metode yang paling mencerminkan pengalihan kendali atas barang atau jasa. Metode untuk mengukur perkembangan meliputi:

- Metode *Output*, yang mengakui pendapatan berdasarkan pengukuran langsung atas nilai yang beralih ke pelanggan
- Metode *Input*, yang mengakui pendapatan berdasarkan upaya Perusahaan untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan

Pemenuhan kewajiban pelaksanaan pada titik waktu tertentu (*Point of Time)*

Kewajiban pelaksanan dianggap terpenuhi pada titik waktu tertentu apabila tidak satupun kriteria pemenuhan kewajiban pelaksanaan telah terpenuhi dari waktu ke waktu. Panduan atas pengendalian harus dipertimbangkan ketika menentukan kapan kewajiban pelaksanaan telah dianggap terpenuhi dengan mengalihkan kendali atas barang atau jasa kepada pelanggan. Terdapat 5 indikator bahwa pelanggan telah memperoleh kendali atas aset:

- Perusahaan memiliki hak atas pembayaran yang berlaku saat ini.
- Pelanggan memiliki gelar yang sah.
- Pelanggan menguasai kepemilikan fisik atas aset.
- Pelanggan memiliki risiko dan imbalan signifikan atas kepemilikannya.
- Pelanggan telah menerima aset tersebut.

Tidak semua indikator harus dipenuhi untuk dapat disimpulkan oleh perusahaan bahwa kendali telah beralih dan pendapatan dapat diakui. Perusahaan perlu menggunakan pertimbangan dalam menentukan apakah seluruh faktor telah mengindikasikan bahwa pelanggan telah mendapatkan kendali. Penilaian ini harus difokuskan terutama pada perspektif pelanggan.

b. Prinsipal vs Agen

Prinsipal adalah Perusahaan yang telah menyanggupi untuk memberikan barang atau jasa kepada para pelanggannya. Agen mengatur penyediaan barang atau jasa yang diberikan oleh prinsipal kepada pelanggan akhir. Agen biasanya menerima komisi atau imbalan jasa untuk aktivitas tersebut. Agen akan, dalam beberapa kasus, mengurangi jumlah yang diutang dari perhitungan bruto yang diterima dari pelanggan akhir dan mengembalikan jumlah bersih kepada prinsipal.

Tabel 8 - Kriteria Prinsipal dan Agen

NO	KRITERIA	PRINSIPAL	AGEN
1	**Entitas mengendalikan** barang atau jasa tertentu sebelum barang atau jasa tersebut dialihkan kepada pelanggan.	Ya	Tidak, entitas hanya **mengatur penyediaan** barang atau jasa tertentu **dari pihak lain**.
2	**Entitas** secara utama **bertanggung jawab** atas pemenuhan janji untuk **menyediakan** barang atau jasa tertentu.	Ya	**Tidak, pemasok utama** bertanggung jawab untuk memenuhi janji untuk memberikan barang kepada pelanggan.
3	Melakukan **pembelian di muka** terhadap barang atau jasa.	Ya	Tidak
4	Entitas **memiliki risiko persediaan** sebelum barang atau jasa dialihkan kepada pelanggan.	Ya	Tidak
5	Entitas memiliki diskresi dalam menetapkan harga barang atau jasa tertentu.	Ya	Tidak

Perbedaan jumlah dan waktu pendapatan yang diakui dapat secara signifikan bergantung pada kesimpulan apakah Perusahaan adalah prinsipal dalam transaksi atau agen. Kesimpulan ini menentukan apakah Perusahaan mengakui pendapatan atas dasar "bruto" atau "neto". Prinsipal mengakui jumlah "bruto" yang dibayarkan oleh pelanggan untuk barang atau jasa spesifik sebagai pendapatan. Prinsipal mencatat pengeluaran yang sesuai untuk komisi atau imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada agen selain biaya langsung untuk memenuhi kontrak.

Agen mencatat komisi atau imbalan jasa yang diperoleh dari memfasilitasi transfer barang atau jasa spesifik (jumlah "neto" yang dipertahankan) sebagai pendapatan. Dengan kata lain, agen mencatat perhitungan bersih yang didapatkan setelah membayar kepada prinsipal untuk barang atau jasa spesifik yang diberikan kepada pelanggan sebagai pendapatan.

Saat pengakuan pendapatan dapat juga berbeda tergantung pada apakah Perusahaan adalah prinsipal atau agen. Ketika Perusahaan telah menuangkan kesanggupannya dalam sebuah kontrak dan menentukan apakah Perusahaan tersebut adalah prinsipal atau agen untuk kesanggupan tersebut, Perusahaan mengakui pendapatan ketika (atau pada saat) kewajiban pelaksanaan terpenuhi. Oleh karena itu penting untuk menuangkan kesanggupan dalam kontrak untuk menentukan kapan kesanggupan tersebut dipenuhi, dan, dengan demikian, juga waktu pengakuan pendapatan.

Agen dapat memenuhi kewajiban pelaksanaannya (memfasilitasi transfer barang atau jasa spesifik) sebelum pelanggan akhir menerima barang atau jasa spesifik dari prinsipal dalam beberapa situasi. Sebagai contoh, agen yang sanggup untuk mengatur penjualan antara vendor dan pelanggan vendor dengan imbalan komisi akan pada umumnya mengakui komisinya sebagai pendapatan pada saat penjualan selesai (yaitu ketika jasa agensi diberikan). Sebaliknya, vendor tidak akan mengakui pendapatan sampai dengan ketika vendor mengalihkan kendali barang atau jasa yang dimaksud kepada pelanggan akhir.

Appendix 1

Simplifikasi Peniliaan Model Bisnis dan Pengujian *SPPI*

BM & SPPI Checklist

PT MULTIMEDIA NUSANTARA (PARENT ONLY)
Simplifikasi penilaian model bisnis

No	Pengelola aset keuangan	Tujuan unit bisnis				Penjualan aset keuangan dalam 2 tahun terakhir?	Alasan penjualan aset keuangan			Potensi Model bisnis	Action	Supporting document (KPI dan kebijakan unit bisnis
		Untuk memperoleh pokok/*collection* atas piutang 0. Tidak 1. Ya	Untuk memperoleh pendapatan bunga atau tingkat pengembalian lainnya 0. Tidak 1. Ya	Untuk menjaga likuiditas perusahaan 0. Tidak 1. Ya	Untuk mendapatkan *capital gain* atas *short-term profit taking* 0. Tidak 1. Ya		Terkait risiko kredit 0. Tidak 1. Ya	Untuk likuiditas 0. Tidak 1. Ya	Untuk mendapatkan *short-term profit taking* 0. Tidak 1. Ya			
1	Treasury - Cash management	1	1	0	0	N	0	0	0	I	OK	
2	Merger & Acquisition - Investment to New Co.	1	1	0	0	N	0	0	0	I	OK	
3	SBU MetraSat (include BroadBand) [Account Receivable]	1	0	0	0	N	1	0	0	I	OK	
4	Billing & Collection - SBUMediahub [Account Receivable]	1	0	0	0	N	1	0	0	I	OK	
5	Billing & Collection - SBUT [Account Receivable]	1	0	0	0	N	1	0	0	I	OK	
6	Billing & Collection - SBUL [Account Receivable]	1	0	0	0	N	1	0	0	I	OK	
7	Billing & Collection - SBUX [Account Receivable]	1	0	0	0	N	1	0	0	I	OK	

Legend
I - Held to collect
II - Held to collect and sell
III - Others

PT MULTIMEDIA NUSANTARA (PARENT ONLY)
Simplifikasi pengujian SPPI

Aset keuangan	Divisi	Tipe kontrak	Noref sampel	Outstanding aset keuangan per desember 2019	Simplified contractual cash flow test result	*Principal*	*Interest*		*Prepayment*		*Currency*		Further assessment result (SPPI checklist)	Adjustment on transition		Metode Impairment	Keterangan
						Kontrak adalah tanpa *recourse* (i.e. reksadana, efek beragunan aset)	Terdapat bunga 0. Tidak 1. Ya	Bunga Fix / Floating? 0. N/A atau Fix 1. Mengacu pada suatu index, *return* dari suatu *underlying*	Kontrak mengizinkan pembayaran dipercepat (*prepayment*)	*Prepayment* menyebabkan penalti yang melebihi kewajaran.	Pembayaran dapat diselesaikan dalam mata uang yang berbeda	Nilai tukar pembayaran sudah ditetapkan pada kontrak 0. N/A atau Tidak		Klasifikasi IAS 39 L&R, HTM, AFS, FVTPL	Klasifikasi IFRS 9		
Cash and cash equivalent	Treasury - Cash Management	Deposito	Deposito - BNI	50.000.000.000	No SPPI issue	0	1	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost	PD VASICEK	-
		Deposito	Deposito - BNI	14.000.000.000	No SPPI issue	0	1	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost		-
Piutang Usaha Non Afiliasi	SBU MetraSat (include BroadBand) [Account Receivable]	Satkomindo Mediyasa, PT	075/MS-MD/AMD/X/2017	-	No SPPI issue	0	0	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost	Roll Rate Enhancement	-
		Alfamart	-	2.459.669.081	No SPPI issue	0	0	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost		-
		Customer Broadband (Bill)	-	101.831.841	No SPPI issue	0	0	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost		-
		Lain-lain	-	2.041.106.220	No SPPI issue	0	0	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost		-
cost reimbursement		AXN Holdings, LLC	Mediahub perjanjian layanan (23 April 2019)	702.546.636	No SPPI issue	0	0	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost		-
broadcast (100% provision)	Billing & Collection - SBUMediahub [Account Receivable]	Sarana Usaha Cakap	-	733.536.000	No SPPI issue	0	0	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost		-
Adsales (100% provision)		Mediahub	NEO TV 2017	-	No SPPI issue	0	0	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost		-
Adsales		PT Amananta Eka Putra	MT.ART.19040024/USE/NTW/000	315.660.908	No SPPI issue	0	0	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost		-
		PT. Omnicomm Media Group Indonesia	57552 NISSAN0660	-	No SPPI issue	0	0	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost		-
		Lain-lain	-	779.873.578	No SPPI issue	0	0	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost		-
	Billing & Collection - SBUL [Account Receivable]	PT Sinar Niaga Sejahtera (SNS)	CLD/P/067/X/2017	-	No SPPI issue	0	0	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost		-
		ASP global pro	-	1.074.260.000	No SPPI issue	0	0	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost		-
		PT. LEU RITEL INDONESIA	001/MN-DN/SBUL/BAK/III/2018	903.228.702	No SPPI issue	0	0	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost		-
		Rajawali Jelajah Nusantara	-	27.575.400	No SPPI issue	0	0	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost		-
		Lain-lain	-	487.980.000	No SPPI issue	0	0	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost		-
Pendapatan yang belum ditagih Non Afiliasi	SBU MetraSat (include BroadBand) [Account Receivable]	XL Axiata, Tbk. PT	031/MN-DU/PKS/IX/2012	6.766.318.383	No SPPI issue	0	0	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost		-
		Customer Broadband (Bill)	-	2.239.600.000	No SPPI issue	0	0	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost		-
		Satkomindo Mediyasa, PT	075/MS-MD/AMD/X/2017	867.000.000	No SPPI issue	0	0	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost		-
		Alfamart	-	1.236.100.000	No SPPI issue	0	0	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost		-
		Lain-lain	-	18.800.000	No SPPI issue	0	0	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost		-
Broadcast	Billing & Collection - SBUMediahub	PT. Sinema Karya Bangsa	002/NOKES-MH/V/2019	-	No SPPI issue	0	0	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost		-
		ASP global pro	-	-	No SPPI issue	0	0	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost		-
	Billing & Collection - SBUL [Account Receivable]	PT Sinar Niaga Sejahtera (SNS)	CLD/P/067/X/2017	-	No SPPI issue	0	0	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost		-
		PT. LEU RITEL Indonesia	001/MN-DN/SBUL/BAK/III/2018	723.708.210	No SPPI issue	0	0	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost		-
		PT Anugerah Karya Rahmat	012/MN-SBUL/PKS/VIII/2019	-	No SPPI issue	0	0	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost		-
		Lain-lain	-	-	No SPPI issue	0	0	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost		-
Piutang lain - lain	Treasury - Cash management	Piutang non usaha Intercompany (SHL)	SHL	689.018.109.642	No SPPI issue	0	1	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost	Simplified approach	Not subject to be impaired, afiliasi telkom grup
		Dividen Receivable	RUPS 2018	94.893.088.801	No SPPI issue	0	0	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost		
	SBU MetraSat (include BroadBand)	Debet Note Afiliasi Telkom	-	13.877.605.402	No SPPI issue	0	0	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost		
	Treasury - Cash management	Advance Payment To Employee		5.169.456.641	No SPPI issue	0	0	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost		
		Piutang ESOP (Employee Stock Ownership Program)		2.609.749.540	No SPPI issue	0	0	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost		
Aset lancar lainnya		Other Current Aset (project financing)	Project Financing	843.758.319.393	No SPPI issue	0	1	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost		
Aset tidak lancar lainnya	Treasury - Cash management	Uang jaminan (Telecommunication dan Rent Of Building)	-	1.909.556.040	No SPPI issue	0	0	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost	PD VASICEK	Not subject to be impaired, afiliasi telkom grup
	Billing & Collection - SBUT	Restricted Cash	Bank Garansi	876.627.015	No SPPI issue	0	0	0	0	0	0	0	Pass SPPI	L&R	Amortised cost		

BM & SPPI Tools

SPPI TEST

Corporate Finance – Cash Management

Pengantar

SPPI Test Tool ini hanya akan digunakan untuk menilai arus kas kontraktual aset keuangan dengan kriteria berikut:

- Aset keuangan dibeli oleh portofolio dengan model bisnis mendapatkan arus kas kontraktual dan model bisnis mendapatkan arus kas kontraktual serta menjual; dan
- Aset bukan merupakan instrumen ekuitas atau derivatif.

Arus kas kontraktual yang semata dari pembayaran pokok dan bunga atau *Solely Payments of Principal and Interest* ("SPPI") konsisten dengan pengaturan pemberian pinjaman dasar.

Pada suatu pengaturan pemberian pinjaman dasar, pertimbangan mengenai imbalan nilai waktu dari uang dan risiko kredit merupakan elemen yang paling signifikan dari bunga. Akan tetapi, dalam pengaturan tersebut, komponen bunga juga dapat memasukkan pertimbangan risiko (sebagai contoh, risiko likuiditas) dan biaya peminjaman dasar lainnya (sebagai contoh, biaya administratif) yang terkait dengan kepemilikan aset keuangan selama suatu periode. Selain itu, komponen bunga juga dapat termasuk margin keuntungan yang konsisten dengan pengaturan pemberian pinjaman dasar.

Persyaratan kontraktual yang memasukkan eksposur risiko dan volatilitas arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan pengaturan pemberian pinjaman dasar (sebagai contoh, perubahan harga ekuitas, harga komoditas) menimbulkan arus kas kontraktual yang tidak konsisten dengan pembayaran pokok dan bunga.

Unit Bisnis	**Treasury - Cash Management**
Jenis Produk	**Deposito On Call pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI")**
Informasi Lainnya *(jika ada)*	Nomor: PCG/20.8/104/2019 Nominal: Rp15,000,000,000 Jangka waktu: 3 Hari Tanggal penempatan: 28 Juni 2019 Tanggal jatuh tempo: 1 Juli 2019 Suku bunga : 4.75%

Analisis

Referensi IFRS 9	Poin yang perlu dipertimbangkan	Panduan dan contoh	Analisis
		Pokok	
B 4.1.7 B 4.1.7B	1. Instrumen keuangan memiliki komponen pokok yang sesuai dengan definisi IFRS 9 (jumlah pokok adalah nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.)	Jika **ya**, maka berpotensi **lulus** tes SPPI.	Ya
B 4.1.16	2. Pokok instrumen secara kontraktual tidak dapat dibatalkan, atau wajib dibayar secara penuh.	Jika **ya**, mohon melanjutkan ke bagian Bunga. Jika **tidak**, mohon melanjutkan ke no. 3. Panduan: Instrumen keuangan dengan pokok kontraktual yang dapat dibatalkan berpotensi tidak memenuhi definisi dari investasi pada instrumen utang dan perlu diklasifikasi sebagai investasi pada instrumen ekuitas.	Ya
	3. Bagaimana bentuk dari instrumen tersebut? (*pilih salah satu*)		
	• Instrumen berhubungan dengan *structured investment vehicle* dengan arus kas yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman dalam pengaturan *waterfall* atau sejenisnya (contoh: efek beragun aset)	Jika **ya**, mohon mengisi no. 4.1, 4.2 dan 4.3.	N/A
	• Instrumen merepresentasikan sebuah investasi atas aset *underlying* atau arus kas tertentu (contoh: reksa dana)	Jika **ya**, mohon mengisi no. 5.	N/A
	• Lainnya	Jika **ya**, mohon melanjutkan ke no. 6.	N/A

Referensi IFRS 9	Poin yang perlu dipertimbangkan	Panduan dan contoh	Analisis
B 4.1.20, B 4.1.21 B 4.1.23	4.1. *Tranche* memiliki karakteristik arus kas kontraktual yang hanya berupa pembayaran pokok dan bunga, tanpa melihat ke dalam kelompok instrumen yang mendasarinya. 4.2. Kelompok instrumen yang mendasari (*underlying instruments*) yang dikelola oleh entitas yang menerbitkan *tranche* tersebut terdiri dari satu atau lebih aset keuangan dengan arus kas kontraktual yang semata dari pembayaran dari pokok dan bunga. 4.3. Eksposur entitas terhadap risiko kredit pada kelompok instrumen keuangan yang mendasarinya inheren dalam *tranche* yang setara atau lebih rendah dari eksposur risiko kredit dari kelompok instrumen keuangan yang mendasarinya (sebagai contoh, *credit rating* dari *tranche* yang diuji klasifikasinya adalah setara atau lebih tinggi daripada *credit rating* sebuah *tranche* yang mendanai kelompok instrumen keuangan yang mendasari).	Jika 4.1, 4.2 dan 4.3 **ya**, maka berpotensi **lulus** tes SPPI.	N/A
B 4.1.17	5. Hasil *assessment* menunjukkan arus kas dari aset *underlying* konsisten mewakili pembayaran dari pokok dan bunga. Ketentuan dalam instrumen tersebut tidak menimbulkan arus kas lainnya, dan tidak membatasi arus kasnya dengan cara yang tidak konsisten dengan pembayaran dari pokok dan bunga.	Jika **ya**, maka berpotensi **lulus** tes SPPI. Panduan: Aset keuangan *non-recourse* tidak dengan sendirinya menghalangi aset keuangan untuk memenuhi ketentuan SPPI. <u>Kreditor disyaratkan untuk melakukan *assessment*</u> atas aset *underlying* atau arus kas tertentu untuk menentukan apakah arus kas kontraktual dari aset keuangan yang diklasifikasikan adalah pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Jika	N/A

Referensi IFRS 9	Poin yang perlu dipertimbangkan	Panduan dan contoh	Analisis
		ketentuan dalam instrumen menimbulkan arus kas lainnya atau membatasi arus kas dengan cara yang tidak konsisten dengan pembayaran yang mewakili pokok dan bunga, aset keuangan tidak memenuhi SPPI. Apakah aset underlying adalah aset keuangan atau aset non-keuangan tidak dengan sendirinya memengaruhi penilaian ini. Contoh yang tidak memenuhi: Jika keuntungan kontraktual dari sebuah pinjaman bergantung kepada kinerja sebuah properti, sehingga pembayaran 'pokok' terhubung kepada pendapatan dari penjualan properti tersebut, maka kompensasi yang diperoleh tidak konsisten dengan nilai waktu dari uang serta risiko kredit dari peminjam karena pinjaman memiliki bunga sintetis dari properti.	
	6. Instrumen merupakan instrumen utang yang memiliki arus kas kontraktual berupa pokok dan bunga yang terutang dan wajib dibayar oleh peminjam.	Jika **ya**, maka berpotensi **lulus** tes SPPI.	N/A
		Bunga	
B 4.1.7A	1. Instrumen keuangan memiliki komponen bunga yang sesuai dengan definisi IFRS 9 (imbalan nilai waktu dari uang, risiko kredit, risiko pinjaman dasar lainnya, biaya-biaya terkait dan margin laba yang konsisten dengan pengaturan pinjaman dasar) ("bunga").	Jika **ya**, maka berpotensi **lulus** tes SPPI.	Ya
B 4.1.14H	2. Bunga tidak dapat dibatalkan.	Jika **ya**, maka berpotensi **lulus** tes SPPI.	Ya

Referensi IFRS 9	Poin yang perlu dipertimbangkan	Panduan dan contoh	Analisis
-	3. Suku bunga tetap (tidak mengambang).	Jika **ya**, mohon melanjutkan ke no. 10. Jika **tidak**, mohon melanjutkan no. 4.	Ya
B 4.1.9A	4. Suku bunga referensi yang digunakan sesuai dengan tingkat bunga pada mata uang relevan.	Jika **ya**, maka berpotensi **lulus** tes SPPI. Panduan: Jika denominasi mata uang dari bunga dan pokok berbeda dapat menimbulkan arus kas kontraktual yang tidak konsisten dengan nilai mata uang dan risiko kredit. Contoh: EUR -> EURIBOR; USD -> USDLIBOR	N/A
B 4.1.9B, 4.1.9C	5. Elemen nilai waktu dari uang atas tingkat bunga tidak dimodifikasi.	Jika **ya**, mohon melanjutkan ke no. 6. Jika **tidak**, mohon melanjutkan ke no. 5.1. Panduan: Modifikasi yang dimaksud terjadi jika misalnya, tingkat bunga aset ditetapkan ulang secara berkala tetapi frekuensi penetapan tidak sama dengan tenor. Contoh: 1. 6M Libor dengan frekuensi penetapan ulang tahunan. 2. 6M Libor dengan frekuensi penetapan ulang setiap 3 bulan.	N/A
	5.1 Modifikasi tersebut tidak menyebabkan *undiscounted* arus kas kontraktual modifikasi berbeda signifikan dari arus kas yang tidak dimodifikasi.	Jika **ya**, maka berpotensi **lulus** tes SPPI.	N/A
B 4.1.13C	6. Tidak ada fitur *interest rate cap* atau *floor*.	Jika **ya**, mohon melanjutkan ke no. 7. Jika **tidak**, mohon melanjutkan ke no. 6.1.	N/A

Referensi IFRS 9	Poin yang perlu dipertimbangkan	Panduan dan contoh	Analisis
B 4.3.8	6.1. Interest rate cap sama atau lebih besar daripada suku bunga pasar; dan interest rate floor sama atau lebih rendah daripada suku bunga pasar saat kontrak tersebut diterbitkan.	Jika **ya**, maka berpotensi **lulus** tes SPPI.	N/A
B 4.1.14G	7. Tidak terdapat fitur *inverse floating interest rate*.	Jika **ya**, maka berpotensi **lulus** tes SPPI. Contoh: Tingkat bunga 10% - Libor 3M	N/A
B 4.1.9	8. Tidak terdapat fitur *leverage*.	Jika **ya**, maka berpotensi **lulus** tes SPPI. Panduan: *Leverage* berpotensi menambah variabilitas dari arus kas kontraktual dan sebagai hasilnya fitur *leverage* tidak konsisten dengan SPPI. Contoh: 1. 2% + 1.5x LIBOR 2. 5% + 2.5x HICP (*Harmonized Index of Consumer Prices*)	N/A
B 4.1.13A	9. Tidak terdapat fitur pembayaran pokok atau bunga yang terhubung pada indeks inflasi dari mata uang berbeda.	Jika **ya**, maka berpotensi **lulus** tes SPPI. Panduan: Selama keuntungan secara keseluruhan dari instrumen keuangan memberikan Perusahaan bunga yang dianggap sebagai pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit dari peminjam, instrumen dapat memenuhi tes karakteristik arus kas kontraktual.	N/A
B 4.1.13B	10. Tidak terdapat fitur untuk mengubah suku bunga.	Jika **ya**, mohon melanjutkan ke *section* Mata Uang. Jika **tidak**, mohon melanjutkan ke pertanyaan no. 10.1.	Tidak

Referensi IFRS 9	Poin yang perlu dipertimbangkan	Panduan dan contoh	Analisis
B 4.1.7A	10.1. Perubahan tersebut konsisten dengan pengaturan pinjaman dasar.	Jika **ya**, maka berpotensi **lulus** tes SPPI. Contoh yang memenuhi: Peningkatan suku bunga akibat peningkatan risiko kredit, risiko likuiditas, *cost of fund*, dan margin laba yang wajar. Contoh yang tidak memenuhi: Peningkatan suku bunga akibat peningkatan laba perusahaan, harga komoditas, atau indeks lain.	N/A
		Mata Uang	
B 4.1.10	1. Pokok dan bunga tidak dapat dikonversi ke dalam mata uang lain.	Jika **ya**, mohon melanjutkan ke *section* selanjutnya. Jika **tidak**, mohon melanjutkan pertanyaan no. 2.1 dan 2.2	Ya
	2.1. Pokok dan/atau bunga dikonversikan menggunakan kurs yang berlaku saat itu.	Jika **ya**, maka berpotensi **lulus** tes SPPI. Contoh: *spot rate*	N/A
	2.2. Bunga yang berlaku setelah konversi adalah suku bunga mata uang hasil konversi.	Jika **ya**, maka berpotensi **lulus** tes SPPI.	N/A
		Penangguhan Pembayaran Pokok dan Bunga	
B 4.1.14H	1. Kontrak tidak memiliki fitur penangguhan pembayaran pokok dan/atau bunga.	Jika **ya**, mohon melanjutkan ke *section* berikutnya. Jika **tidak**, mohon melanjutkan ke pertanyaan no. 1.1.	Ya
	1.1. Penangguhan pembayaran pokok dan/atau bunga tersebut akan diberi bunga tambahan.	Jika **ya**, maka berpotensi **lulus** tes SPPI. Contoh yang mungkin tidak memenuhi SPPI Test: Debitur memiliki hak untuk menangguhkan pembayaran kewajiban utang tanpa bunga kapitalisasi.	N/A

Referensi IFRS 9	Poin yang perlu dipertimbangkan	Panduan dan contoh	Analisis
		Opsi Pembayaran Dipercepat	
B 4.1.11	1. Perusahaan/peminjam tidak memiliki hak untuk meminta/melakukan pelunasan dipercepat.	Jika **ya**, mohon melanjutkan ke *section* selanjutnya.	Ya
B 4.1.10	2. Hak tersebut tidak bergantung pada suatu kejadian kontijensi. 2.1. Kejadian kontijensi terkait pada pengaturan pemberian pinjaman dasar (pelanggaran kontrak, penurunan kualitas kredit peminjam)?	Jika **ya**, mohon melanjutkan ke pertanyaan no.3 Jika **tidak**, mohon melanjutkan ke pertanyaan no. 2.1. Jika **ya**, maka berpotensi **lulus** tes SPPI. Panduan: • Karakteristik dari peristiwa kontijensi sendiri bukan merupakan faktor yang menentukan pemenuhan syarat SPPI, namun mungkin menjadi indikator, • Pemenuhan SPPI tetap bergantung pada arus kas saat terjadi pembayaran dipercepat.	N/A N/A
B 4.1.11	3. Jumlah pembayaran/pelunasan yang dipercepat hanya terdiri dari pokok, bunga, dan mungkin kompensasi yang wajar atas pembayaran/ pelunasan dipercepat.	Jika **ya**, maka berpotensi **lulus** tes SPPI.	N/A=e
		Opsi Perpanjangan	
B 4.1.11	1. Kontrak tidak memiliki fitur perpanjangan.	Jika **ya**, mohon melanjutkan ke *section* selanjutnya. Jika **tidak**, mohon melanjutkan ke pertanyaan no. 2.	Ya
B 4.1.11	2. Perpanjangan tetap menimbulkan arus kas kontraktual yang terdiri dari: • pembayaran pokok dan bunga dan • mungkin termasuk kompensasi tambahan yang wajar	Jika **ya**, maka berpotensi **lulus** tes SPPI. Contoh yang tidak memenuhi: Opsi perpanjangan mencakup klausul bahwa tidak terdapat bunga pada periode perpanjangan.	N/A

Referensi IFRS 9	Poin yang perlu dipertimbangkan	Panduan dan contoh	Analisis
		Fitur *Performance Linked*	
B 4.1.13A	1. Syarat kontraktual pokok, bunga atau imbalan tidak berhubungan dengan kinerja dari peminjam.	Jika **ya**, maka berpotensi **lulus** tes SPPI. Panduan: Instrumen yang memberikan pemberi peminjam suatu keuntungan ekonomis atau partisipasi dalam risiko yang tidak konsisten dengan pengaturan pemberian pinjaman dasar, umumnya tidak lulus pengujian karakteristik arus kas kontraktual. Contoh: • Bunga/kupon bertambah seiring dengan keuntungan perusahaan	Ya
		Fitur Konversi ke Saham	
B 4.1.14F	1. Instrumen keuangan tidak memiliki fitur untuk diubah menjadi saham ekuitas penerbit instrumen.	Jika **ya**, mohon melanjutkan ke *section* selanjutnya. Jika **tidak**, mohon melanjutkan ke pertanyaan no. 1.1. Contoh: *Convertible loan*	Ya
	1.1. Konversi nilai pinjaman menjadi saham ekuitas menggunakan kurs yang berlaku saat itu.	Jika **ya**, maka berpotensi **lulus** tes SPPI. Panduan: Arus kas kontraktual menjadi bukan semata dari pembayaran pokok dan bunga pada jumlah pokok terutang apabila arus kas tersebut mencerminkan keuntungan yang tidak konsisten dengan pengaturan pinjaman dasar (IFRS 9 B 4.1.7A) seperti misalnya, keuntungan terhubung dengan nilai ekuitas milik penerbit.	N/A

Referensi IFRS 9	Poin yang perlu dipertimbangkan	Panduan dan contoh	Analisis
		Fee	
B 4.1.7A	1. Seluruh *fee* yang dikenakan kepada peminjam mewakili kompensasi yang wajar dalam pemberian jasa pinjaman dan/atau biaya administrasi lainnya.	Jika **ya**, maka berpotensi **lulus** tes SPPI. Panduan: Komponen bunga terdiri dari imbalan atas nilai waktu dari uang, risiko kredit terkait jumlah pokok terutang selama suatu periode, risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya, serta margin keuntungan.	Ya
		Perjanjian	
	1. Apakah terdapat perjanjian yang belum dipertimbangkan?	-	Tidak

Kesimpulan

Kesimpulan Hasil SPPI *test*	
Apakah arus kas kontraktual dari aset keuangan semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang?	**Ya**

Sign-offs* dan *Review

Disusun oleh:	Di-*review* oleh:	Di-*review* oleh:
Nama:	**Nama:**	**Nama:**
Perusahaan:	**Perusahaan:**	**Perusahaan: Akuntansi**

BUSINESS MODEL TEST

Pengantar

Model bisnis sebuah entitas ditentukan berdasarkan bagaimana sekelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai suatu tujuan bisnis. Model bisnis entitas tidak semata-mata bergantung pada intensi manajemen untuk sebuah instrumen. Oleh karena itu, pengujian ini tidak menggunakan pendekatan untuk klasifikasi pada masing-masing instrumen dan harus ditentukan pada level agregasi yang lebih tinggi dan entitas dapat memiliki lebih dari satu model bisnis dalam mengelola instrumen keuangangannya.

Lini Bisnis	**Treasury - Cash Management**
Portofolio	Kas dan setara kas - Deposito, jasa giro dan penempatan jangka panjang lainnya
Nomor Portofolio	Deposito On Call pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (“BNI”) Nomor: PCG/20.8/104/2019

Analisis

1. Apa aktivitas dan strategi bisnis unit terkait?
Indikasi Model Bisnis *Amortised Cost*
☐ Bertujuan untuk menerima arus kas dari piutang penjualan kredit
☒ Bertujuan untuk menerima arus kas kontraktual (contoh: imbal hasil dan pokok)
Indikasi Model Bisnis FVTOCI
☐ Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas
☐ Bertujuan untuk *yield enhancement* dan/atau mendapatkan *fee based income* dengan nilai yang tidak signifikan
Indikasi Model Bisnis Lainnya
☐ Bertujuan untuk aktivitas *trading*
Lainnya, mohon dijelaskan:
Mohon melampirkan kebijakan investasi, manual produk, kebijakan kompensasi atas pencapaian target, dsb.
Nutech memiliki prosedur pengendalian dan penagihan Standar Operasi Perusahaan (SOP) Piutang yang telah tertuang dalam SOP.

2. Bagaimana kinerja unit bisnis yang dilaporkan kepada personil manajemen kunci? (2017) Mohon mengisi dengan angka RKAP tahun berjalan serta melampirkan sampel laporan.	
Target *collection* & *yield* (jika ada)	**Target penjualan aset keuangan**
N/A	N/A

3. Ekspektasi penjualan kredit (pembelian surat berharga) dan penjualan aset keuangan atas portofolio yang bersangkutan	
Ekspektasi pemilikan aset keuangan	
Volume pemilikan aset keuangan (Nilai penjualan kredit (pembelian surat berharga))	N/A
Frekuensi penjualan kredit (pembelian surat berharga) dalam 1 periode laporan keuangan	N/A
Ekspektasi penjualan aset keuangan	
Volume penjualan aset keuangan *(Nilai penjualan)*	N/A
Frekuensi penjualan dalam 1 periode laporan keuangan	Tidak ada penjualan
Perbandingan ekspektasi volume pemilikan & penjualan	N/A

4. Apa alasan untuk ekspektasi penjualan tersebut? Jika terdapat beberapa alasan, mohon jelaskan proporsi volume dan frekuensinya.
Indikasi Model Bisnis *Amortised Cost*
☒ Penjualan yang disebabkan oleh peningkatan risiko kredit
Indikasi Model Bisnis FVTOCI
☐ Penjualan yang disebabkan oleh kebutuhan likuiditas
☐ Penjualan yang disebabkan untuk *yield enhancement* dan/atau realisasi laba/rugi dalam jumlah yang tidak signifikan
Indikasi Model Bisnis Lainnya
☐ Penjualan untuk realisasi laba/rugi aktivitas trading

Penjelasan:

5. Apa risiko yang memengaruhi kinerja unit bisnis? Bagaimana cara risiko-risiko tersebut dikelola?
Risiko yang memengaruhi: 1. Risiko pasar 2. Risiko kredit 3. Risiko likuiditas 4. Risiko politik dan ekonomi 5. Risiko peraturan perpajakan

6. Komentar lainnya?
N/A

Kesimpulan

Business Model Assessment	**Portofolio dengan model bisnis Amortised Cost**

Sign-offs* dan *Review

Disusun oleh unit bisnis:	

Di-*review* oleh unit bisnis:	

Di-*review* oleh Divisi Akuntansi:	

Appendix 2

***Position Paper* Penurunan Nilai**

Appendix 3
PD Vasicheck

Introduction

Petunjuk Penggunaan:

> Dalam KKP ini, input utama yang digunakan dalam menghitung penyisihan IFRS 9 untuk surat berharga dan *time deposit* adalah PD Vasicek yang dikalikan dengan LGD, *Principal,* dan penyesuaian tenor (tenure/360 hari).

> *Field* berwarna adalah *input* yang perlu dimasukkan oleh *user*

> *Field* berwarna adalah *output* utama penghitungan PPU IFRS 9

Langkah-Langkah:

1. Memperoleh data *rating* dari lembaga pemeringkat eksternal (Sheet **2. Pefindo Credit Rating**).

2. Memperoleh data input dari KKP Cash and Cash Equivalent.xlsx, Aset Keuangan Lancar Lainnya_YE_03_rev.xlsx, BondApp_Description_Aug 29, 2018T11_26.xlsx (Sheet **3. Raw Data Time Deposit**).

Laporan outstanding placement deposit as of Dec 2018.txt

3. Memperoleh nilai *Loss Given Default (LGD)* dari referensi Basel II (45%).

4. Menghitung PD yang disesuaikan dengan model Vasicek (Sheet **7. PD Vasicek**) dengan mengisi seluruh data/nilai faktor makroekonomi kebelakang (historis) dan 1 tahun kedepan (proyeksi) pada Sheet **7.2 Macroeconomic Factors**.

5. Mengisi seluruh *rating counterpart* pada Sheet **8. Daftar Rating.**

6. Menggunakan hasil perhitungan PD Vasicek, LGD, dan data input lainnya (*Counterpart*, *Principal,* dan *Tenure*) untuk menghitung nilai *Expected Credit Loss* (ECL) pada Sheet **9. Time Deposit, 10. Surat Berharga**

7. Ringkasan hasil perhitungan ECL secara keseluruhan dapat dilihat pada Sheet **11. Ringkasan**.

Pefindo Credit Rating

2018 Corporate Default and Rating Transition Study

Cumulative Average Default Rates (2007-2018)

Rating	Time Horizon To Default [Years]											
	Population [#]	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11
idAAA	98	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
idAA	265	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
idA	385	0,24%	1,01%	1,83%	2,70%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
idBBB	127	2,05%	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%
idBB	10	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
idB	1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
idCCC	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: http://www.pefindo.com/index.php/pageman/page/default-studies.html

Figure 4. Cumulative Average Default Rate

Rating	Time Horizon to Default (Year)										
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11
AAA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%
A	0.24%	1.01%	1.83%	2.70%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
BBB	2.05%	4.32%	4.32%	4.32%	4.32%	4.32%	4.32%	4.32%	4.32%	4.32%	4.32%
BB	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%
B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CCC	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

PD Vasicheck Pefindo Based

PD VASICEK Pefindo Based

Pefindo Rating	TTC PD (Pefindo)	Asset Correlation (Basel formula)	PIT PD 2019
idAAA	0,00%	24,000%	0,00%
idAA	0,00%	24,000%	0,00%
idA	0,24%	22,643%	0,13%
idBBB	2,05%	16,306%	1,90%
idBB	20,00%	12,001%	22,25%
idB	0,00%	24,000%	0,00%
idCCC	100,00%	12,000%	100,00%

**TTC PD tidak dapat bernilai 0% (tidak terdapat risiko default) karena akan menyalahi standar IFRS 9 dan tidak dapat bernilai 100% karena eksposur tersebut telah default*

Macroeconomic Adjustment

PD Vasicek with Macroeconomic Factor

	Historical								Projection
Year	Dec-12	Dec-13	Dec-14	Dec-15	Dec-16	Dec-17	Dec-18	Dec-19	Dec-20
GDP_IND	5,87	5,58	5,05	5,15	4,94	5,19	5,18	5	5,13
SMEF	1,9622	1,0517	-0,6122	-0,2983	-0,9575	-0,1727	-0,2041	-0,7692	-0,3610

Historical Mean	5,25
Historical StDev	0,32
Confidence Level	99,0%
T-distribution	2,58

**0,99 confidence level digunakan untuk membatasi nilai standarisasi faktor makroekonomi agar tidak melewati batas ekstrem*

Macroeconomic Factor

Snapshot	GDP_IND
Jan-11	6,49
Feb-11	6,48
Mar-11	6,48
Apr-11	6,41
May-11	6,34
Jun-11	6,27
Jul-11	6,18
Aug-11	6,10
Sep-11	6,01
Oct-11	5,99
Nov-11	5,96
Dec-11	5,94
Jan-12	6,00
Feb-12	6,05
Mar-12	6,11
Apr-12	6,14
May-12	6,18
Jun-12	6,21
Jul-12	6,12
Aug-12	6,03
Sep-12	5,94
Oct-12	5,92

Snapshot	GDP_IND
Jul-14	4,94
Aug-14	4,93
Sep-14	4,93
Oct-14	4,97
Nov-14	5,01
Dec-14	5,05
Jan-15	4,98
Feb-15	4,90
Mar-15	4,83
Apr-15	4,80
May-15	4,77
Jun-15	4,74
Jul-15	4,75
Aug-15	4,77
Sep-15	4,78
Oct-15	4,90
Nov-15	5,03
Dec-15	5,15
Jan-16	5,08
Feb-16	5,01
Mar-16	4,94
Apr-16	5,03

Snapshot	GDP_IND
Feb-18	5,10
Mar-18	5,06
Apr-18	5,13
May-18	5,20
Jun-18	5,27
Jul-18	5,24
Aug-18	5,20
Sep-18	5,17
Oct-18	5,17
Nov-18	5,18
Dec-18	5,18
Jan-19	5,14
Feb-19	5,11
Mar-19	5,07
Apr-19	5,06
May-19	5,06
Jun-19	5,05
Jul-19	5,04
Aug-19	5,03
Sep-19	5,02
Oct-19	5,01
Nov-19	5,01

Nov-12	5,89
Dec-12	5,87
Jan-13	5,76
Feb-13	5,65
Mar-13	5,54
Apr-13	5,56
May-13	5,57
Jun-13	5,59
Jul-13	5,57
Aug-13	5,54
Sep-13	5,52
Oct-13	5,54
Nov-13	5,56
Dec-13	5,58
Jan-14	5,43
Feb-14	5,27
Mar-14	5,12
Apr-14	5,06
May-14	5,00
Jun-14	4,94
Jul-14	4,94

May-16	5,12
Jun-16	5,21
Jul-16	5,15
Aug-16	5,09
Sep-16	5,03
Oct-16	5,00
Nov-16	4,97
Dec-16	4,94
Jan-17	4,96
Feb-17	4,99
Mar-17	5,01
Apr-17	5,01
May-17	5,01
Jun-17	5,01
Jul-17	5,03
Aug-17	5,04
Sep-17	5,06
Oct-17	5,10
Nov-17	5,15
Dec-17	5,19
Jan-18	5,15

Dec-19	*5,00*
Jan-20	*5,01*
Feb-20	*5,01*
Mar-20	*5,02*
Apr-20	*5,01*
May-20	*5,01*
Jun-20	*5,00*
Jul-20	*5,02*
Aug-20	*5,05*
Sep-20	*5,07*
Oct-20	*5,09*
Nov-20	*5,11*
Dec-20	*5,13*

*Data dalam text merah merupakan nilai proyeksi as of 7 Januari 2020.

GDP per Des 2019 - Des 2020 masih merupakan data proyeksi.

Daftar Rating

Bank-Rating Mapping

1. PD Vasicek

Rating	Pefindo
idAAA	0,00%
idAA	0,00%
idA	0,24%
idBBB	2,05%
idBB	20,00%
idB	0,00%
idCCC	100,00%

2. Pemetaan PD Vasicek terhadap *Counterpart*

Bank	Kode Bank	Rating	Pefindo Rating	PD	LGD*	PD X LGD
PT BNI		idAAA	idAAA	0,24%	45,00%	**0,11%**
PT BRI		idAAA	idAAA	0,24%	45,00%	**0,11%**
PT BTN		idAA+	idAA	0,24%	45,00%	**0,11%**
PT Bank Mandiri		idAAA	idAAA	0,24%	45,00%	**0,11%**
CIMB Niaga		idAAA	idAAA	0,24%	45,00%	**0,11%**

"* Nilai LGD diperoleh dari referensi Basel II (45%) untuk *senior claim*"

Time Deposit

Expected Credit Loss (ECL) *Time Deposit*

As of 31/12/2019

No	ID	*Counterpart*	*Principal*	*Sisa Tenor (days)*	*Due Date*	PD	LGD	ECL
1	METRA	PT BNI	14.000.000.000	2	02/01/2020	0,24%	45,00%	84.100
	METRA	PT BNI	50.000.000.000	6	06/01/2020	0,24%	45,00%	901.064
Sub Total		**PT BNI**	64.000.000.000					985.164
Total			64.000.000.000					985.164

Surat Berharga

Expected Credit Loss (ECL) *Surat Berharga*

As of 31/12/2019

No	ID	*Counterpart*	*Principal*	*Sisa Tenor (days)*	*Due Date*	PD	LGD	ECL
1	N/A	N/A	-	N/A	N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Total			-					#N/A

Restricted Cash and Sinking Fund

Expected Credit Loss (ECL) *Refundable Deposit*

As of 31/12/2019

No	ID	*Counterpart*	*Principal*	*Sisa Tenor (days)*	*Due Date*	PD	LGD	ECL
1	N/A	N/A	-	N/A	N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Total			-					#N/A

Ringkasan

Expected Credit Loss (ECL)

No	ID	*Counterpart*	*Principal*	ECL	% ECL
1	*Time Deposit*	PT BNI	64.000.000.000	985.164	0,0015%
2	*Surat Berharga*				-
3	*Restricted Cash*	PT BNI	355.323.750	442.442	0,1245%
4	*Refundable Deposit*				-
Total			64.355.323.750	1.427.606	0,0022%

Memo Jurnal PD Vasicheck

PT MULTIMEDIA NUSANTARA (PARENT)
NOTA DINAS JURNAL PENYESUAIAN DAN PENDAFTARAN COA - PENERAPAN KETENTUAN PENURUNAN NILAI IFRS 9
Per 31 Desember 2019

Latar belakang

Disahkannya IFRS 9: Instrumen Keuangan (amandemen 2014) pada bulan Juli 2014 untuk menggantikan IAS 39 mengharuskan PT Telekomunikasi Indonesia dan Anak Perusahaan (dalam dokumen ini disebut sebagai "Telkom") untuk menerapkan IFRS 9 pada periode pelaporan tahunan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018. Atas implementasi IFRS 9 terhadap laporan keuangan, terdapat dampak perubahan klasifikasi menurut IAS 39 dan klasifikasi menurut IFRS 9 atas aset keuangan Telkom.

Tujuan

Nota dinas ini disusun untuk mengakomodasi kebutuhan jurnal penyesuaian dan pendaftaran COA baru yang dibutuhkan atas dampak:
1. pengukuran penyisihan kerugian aset keuangan sesuai dengan persyaratan IFRS 9
2. pengakuan perbedaan pengukuran di komponen ekuitas berdasarkan ketentuan transisi IFRS 9

Memo jurnal

Tanggal	CoCd	GL	D	K	Entry	Keterangan
31/12/2019	1004	Beban Penyisihan Kas dan Setara Kas	985.164,09		1	
	1004	*New* Penyisihan Kas dan Setara Kas		985.164,09		
	1004	Beban Penyisihan Surat Berharga	-		2	
	1004	12103001 Penyisihan penurunan nilai Srt Berharga		-		
	1004	Beban Penyisihan Rescticted Cash & Sinking Fund	442.442,41		3	
	1004	12103001 Penyisihan penurunan nilai Restricted Cash & Sinking Fund		442.442,41		
	1004	Beban Penyisihan Refundable Deposit	-		4	
	1004	12103001 Penyisihan penurunan nilai Refundable Deposit		-		

Pendaftaran CoA baru

Tanggal	Identifikasi kebutuhan CoA baru	
31/12/2019	1	Penyisihan kas dan setara kas Penyisihan penurunan nilai Restricted Cash & Sinking Fund